



PEMERINTAH KOTA MADIUN

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMER 34 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021**



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 34
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2021

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengintegrasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/S-HP/XVIII.SBY/03/2021 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2021.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Juli 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Juli 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. AHSAN SRI HASTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680509 198809 1 002

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 35/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19750117 199602 1 001

DAFTAR ISI

PERWAL	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Dasar Hukum	6
1.4. Sistematika Penulisan Dokumen	9
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2021	10
2.1. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 Sampai dengan Semester I	10
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 Sampai dengan Triwulan II	11
2.3. Gambaran Umum Kondisi Daerah	100
2.3.1. Aspek Geografi dan Demografi	100
2.3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	102
2.3.4. Fokus Daya Saing Daerah	107
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	124
3.1. Perubahan Asumsi Dasar Perubahan RKPD Tahun 2021	125
3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan daerah	129
3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	130
3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan daerah	131
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	134
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	153
BAB VI PENUTUP	298
6.1. Kaidah Pelaksanaan	298
6.2. Tindak Lanjut	298

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan/Keselarasn Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Kota Madiun	2
Tabel 2.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sampai dengan 30 Juni 2021	10
Tabel 2.2	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2021	12
Tabel 2.3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Tahun 2020	102
Tabel 2.4	Pertumbuhan ekonomi regional dan nasional Tahun 2018-2020	102
Tabel 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016 – 2020	103
Tabel 2.6	Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	107
Tabel 2.7	Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kota Madiun, Tahun 2014-2020	108
Tabel 2.8	Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan di Kota Madiun Tahun 2014-2020	109
Tabel 2.9	Ketaatan Terhadap RTRW, Tahun 2013-2020	111
Tabel 2.10	Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kota Madiun, Tahun 2013-2020	111
Tabel 2.11	Luas Wilayah Industri (Ha) di Kota Madiun Tahun 2013-2020	111
Tabel 2.12	Luas Wilayah Perkotaan (Ha) di Kota Madiun Tahun 2014-2020	112
Tabel 2.13	Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Madiun, Tahun 2013-2020	112
Tabel 2.14	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun Tahun 2015-2020	113
Tabel 2.15	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan di Kota Madiun Tahun 2015-2020	113
Tabel 2.16	Ketersediaan Daya Listrik di Kota Madiun, Tahun 2012-2020	114
Tabel 2.17	Angka Kriminalitas di Kota Madiun Tahun 2016-2020	115
Tabel 2.18	Jumlah Demonstrasi di Kota Madiun, Tahun 2013-2020	115
Tabel 2.19	Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2020	116
Tabel 2.20	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Madiun Tahun 2015-2020	120

Tabel 2.21	Persentase Perda yang Mendukung Dunia Usaha di Kota Madiun, Tahun 2015-2020	120
Tabel 2.22	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di Kota Madiun, 2020	121
Tabel 2.23	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Madiun, 2014-2020	122
Tabel 2.24	Usia Produktif, Usia Tidak Produktif di Kota Madiun, 2013-2020	123
Tabel 3.1	Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2021	127
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2021	129
Tabel 3.3	Belanja dan Perubahan Belajna Tahun 2021	130
Tabel 3.4	Perubahan Anggaran Tahun 2021	132
Tabel 4.1	Perbandingan Tujuan dan Sasaran Per Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021 dengan Perubahan RKPD Tahun 2021	134
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 pada Perubahan RKPD Tahun 2021	137
Tabel 4.3	Tema Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota Madiun	149
Tabel 4.4	Prioritas Nasional/Prioritas Provinsi/Prioritas Kota/Program Prioritas	151
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah	154
Tabel 5.2	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Pada RKPD Perubahan Tahun 2021	296

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administratif Kota Madiun	101
Gambar 2.2	Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2010-2020	106
Gambar 3.1	Perbandingan Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Madiun Tahun 2020 - 2021	128

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Juli 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada Tahun 2021, dinamika situasi dan kondisi di Indonesia yang terdampak Pandemi kian kompleks, begitu pula dengan Kota Madiun. Guna adaptasi dengan perkembangan yang terjadi, diperlukan adanya Perubahan RKPD. Perubahan tersebut sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja program maupun kegiatan sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Selain itu perubahan tersebut dilaksanakan untuk mengharmonisasai terhadap target dan sasaran baik yang melampaui maupun yang belum sesuai capaian.

Tema dalam RKPD 2021 adalah **“Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Infrastruktur di Kota Madiun”** sehingga di fokuskan dengan Tema **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Kehidupan Sosial dan Masyarakat”**.

Prioritas Pembangunan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- **Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan;**
- **Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualiatas SDM yang Berdaya Saing;**
- **Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata;**
- **Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah;**
- **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;**
- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.**

Berikut adalah keterkaitan/keselarasan tema pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Madiun:

Tabel 1.1

Keterkaitan/Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Kota Madiun

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	3	4
1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualiatas SDM yang Berdaya Saing
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal	Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
7	Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Secara prinsip 6 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tersebut tetap menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021. Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 tersebut, serta evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan, saat ini secara umum program kegiatan pada RKPD 2021 sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, utamanya dalam ***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Kehidupan Sosial dan Masyarakat.***

Pandemi *covid-19* pada akhir semester I menunjukkan lonjakan kasus, sehingga diestimasi akan berpengaruh capaian kegiatan, program dan pada akhirnya mengancam pencapaian prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, target-target program dan kegiatan yang mendukung prioritas perlu disesuaikan dengan lebih realistis. Perubahan RKPD Tahun 2021, juga dimanfaatkan pada penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya pada tahun berjalan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, sedangkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024. RPJMD Kota Madiun sendiri perlu adanya perubahan, menyesuaikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Penyesuaian regulasi dalam penyusunan RPJMD, yang meliputi :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 menjadi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat perbedaan mendasar dari kedua PP tersebut diantaranya adalah perbedaan dari struktur APBD baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Hasil evaluasi Dokumen RPJMD yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Substansi Dokumen RPJMD

Substansi Dokumen RPJMD 2019-2024 sebelum perubahan, belum memuat arah kebijakan tahunan dan spesifik, sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD belum terfokus dengan jelas. Selain itu, arah kebijakan belum secara spesifik menjelaskan dan mengkaitkan dengan masing-masing strategi pembangunannya. Perumusan isu strategis berubah dari sebelas menjadi lima poin isu strategis. Perubahan tersebut merupakan bagian dari *refocusing* dari berbagai isu strategi yang saat ini sedang berkembang sehingga akan memudahkan untuk merumuskan berbagai strategi dan prioritas pembangunan dalam perubahan RPJMD.

b. Capaian Kinerja Pembangunan

Beberapa target tujuan dan sasaran pembangunan khususnya terkait dengan kondisi sosial ekonomi yang terdampak Covid-19 khususnya target tahun 2020 sampai 2024 perlu disesuaikan.

3. Perubahan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak bencana pandemi Covid-19 yang perlu penyesuaian berbagai kebijakan oleh pemerintah Kota Madiun.

Beberapa target tujuan dan sasaran pembangunan khususnya terkait dengan kondisi sosial ekonomi yang terdampak Covid-19 khususnya target tahun 2021 perlu disesuaikan. Secara umum, target indikator tujuan dan sasaran sampai dengan tahun 2020 yang belum memenuhi target masing-masing sebesar 57 persen (4 dari 7 indikator tujuan yang mencapai target) dan 67 persen (16 dari 24 indikator sasaran yang mencapai target kinerja). Apabila dilihat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran per Misi, pada misi I sampai dengan tahun 2020, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Indeks Pemberdayaan Gender masih belum mencapai target yang ditentukan. Pada misi kedua, kinerja ruas jalan belum memenuhi target. Pada misi ketiga, realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Pada misi keempat, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, ICOR, pertumbuhan sektor perdagangan dan pengolahan jauh di bawah target sebagai dampak pandemic Covid-19. Dari realisasi keuangan daerah baik pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa capaian realisasi terhadap target APBD dalam RPJMD 2019-2024 masih belum memenuhi. Dari sisi pendapatan daerah, capaian realisasi terhadap target RPJMD tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 97,78% dan 90,43%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target pendapatan sudah baik meskipun pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 karena capaiannya diatas 90%. Pada sisi belanja, capaian keuangan realisasi terhadap target RPJMD yang ditetapkan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 96,15% dan 75,88%. Masih rendahnya capaian target belanja daerah khususnya tahun 2020 disebabkan adanya refocusing dan realokasi belanja daerah guna penanganan Covid-19. Sehingga beberapa belanja daerah khususnya pada belanja modal dan serta barang dan jasa dialihkan untuk belanja lain dalam upaya penanganan Covid-19.

Dengan demikian, maka RKPD Tahun 2021 dilakukan perubahan mengikuti penyesuaian-penyesuaian yang terdapat pada Perubahan RPJMD 2019-2024, agar cepat merespon kondisi yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya, RKPD 2021 Perubahan akan menjadi dasar penyusunan dalam penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021 serta menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai penentu kebijakan yang akan dilakukan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan menjadi Dokumen Publik, serta sebagai landasan pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (**KUPA**) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (**PPASP**) Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 antara lain :

- a. memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan RKPD yang ditetapkan sebelumnya dalam merespon perubahan yang terjadi selama semester I.
- b. melakukan pergeseran terkait kinerja dan keuangan dalam kegiatan maupun sub kegiatan, penghapusan maupun penambahan kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran dari asumsi RKPD Tahun 2021.
- c. menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran 2020 yang harus digunakan untuk Tahun 2021.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan ;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2021;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

40. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
41. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen

BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2021

- 2.1. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 Sampai dengan Triwulan II
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 Sampai dengan Triwulan II

BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

- 3.1. Perubahan Asumsi Dasar Perubahan RKPD Tahun 2021
- 3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
- 3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
- 3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI. Penutup

- 6.1 Kaidah Pelaksanaan
- 6.2 Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)
TAHUN 2021

Pemerintah Kota Madiun sudah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021 dan APBD Tahun 2021. Pada akhir semester 1 terjadi dinamika perubahan yang cukup signifikan, sehingga perlu adanya evaluasi kinerja maupun anggaran pada RKPD 2021. Hasil evaluasi tersebut dijelaskan pada sub bab 2.1 dan sub bab 2.2.

2.1 Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 Sampai Dengan Semester I

Realisasi Anggaran pelaksanaan APBD tahun 2021 sampai dengan triwulan kedua adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
 Sampai Dengan 30 Juni 2021

Kode	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	985.592.869.144,00	385.642.314.276,89	599.950.554.867,11	39,13
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	226.891.939.093,00	52.253.517.628,89	174.638.421.464,11	23,03
4.1.01	Pajak Daerah	76.978.000.000,00	36.591.651.426,40	40.386.348.573,60	47,54
4.1.02	Retribusi Daerah	16.731.224.667,00	3.243.865.535,56	13.487.359.131,44	19,39
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.092.455.426,00	8.862.173.054,17	6.230.282.371,83	58,72
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.090.259.000,00	3.555.827.612,76	114.534.431.387,24	3,01
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	739.301.330.051,00	333.360.775.648,00	405.940.554.403,00	45,09
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	677.911.879.000,00	317.531.728.820,00	360.380.150.180,00	46,84
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.389.451.051,00	15.829.046.828,00	45.560.404.223,00	25,78
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.399.600.000,00	28.021.000,00	19.371.579.000,00	0,14
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.399.600.000,00	28.021.000,00	19.371.579.000,00	0,14
5	BELANJA DAERAH	1.254.507.301.445,00	325.568.061.658,00	928.939.239.787,00	25,95
5.1	BELANJA OPERASI	996.795.371.029,00	306.324.871.875,00	690.470.499.154,00	30,73
5.1.01	Belanja Pegawai	477.592.308.497,00	196.923.907.325,00	280.668.401.172,00	41,23
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.027.238.152,00	99.803.080.550,00	379.224.157.602,00	20,83
5.1.05	Belanja Hibah	17.526.572.380,00	3.723.077.000,00	13.803.495.380,00	21,24
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.649.252.000,00	5.874.807.000,00	16.774.445.000,00	25,94
5.2	BELANJA MODAL	202.464.337.498,00	18.132.614.440,00	184.331.723.058,00	8,96

Kode	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.078.859.038,00	944.589.501,00	53.134.269.537,00	1,75
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.376.450.494,00	8.857.943.339,00	48.518.507.155,00	15,44
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.974.356.300,00	8.320.026.600,00	80.654.329.700,00	9,35
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.034.671.666,00	10.055.000,00	2.024.616.666,00	0,49
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	55.247.592.918,00	1.110.575.343,00	54.137.017.575,00	2,01
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	55.247.592.918,00	1.110.575.343,00	54.137.017.575,00	2,01
	SURPLUS / DEFISIT	-268.914.432.301,00	60.074.252.618,89	-328.988.684.919,89	-22,34
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	268.933.182.301,00	0,00	268.933.182.301,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	268.933.182.301,00	0,00	268.933.182.301,00	0,00
	Silpa Tahun Berjalan	18.750.000,00	60.074.252.618,89	-60.055.502.618,89	320.39 6,01

Sumber: BKAD Kota Madiun

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan II

Pandemi Covid – 19 masih melanda di wilayah Kota Madiun sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Hal ini mengakibatkan proses pencapaian tujuan sasaran pembangunan Pemerintahan Kota Madiun perlu disesuaikan. Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang sudah direncanakan oleh Perangkat Daerah perlu dievaluasi agar pencapaian tujuan sasaran yang disesuaikan memiliki keselarasan. Tentunya hal ini berdampak indikator, target, pagu anggaran. Hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Triwulan II Tahun 2021

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1	01			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	wajib belajar 9 tahun	%	100	154.191.888		3.247.408			0	3.247.408	0%	2%			
		2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	terlaksananya 8 Standar Nasional Pendidikan	%	100	103.763.338		2.453.583			0	2.453.583	0%	2%			
			08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Lembaga yang direhab	Lembaga	20	28.200.000	0	-	10	2.802.576	10	2.802.576	50%	10%	Dinas Pendidikan		
			16		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Laptop	Unit	5450	47.121.250	0	6.804	4854	67.142	4854	73.946	89%	0%	Dinas Pendidikan		
			23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	398.922	0	58.570	0	44.807	0	103.377	0%	26%	Dinas Pendidikan		
			23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	174.226	0	30.727	0	23.791	0	54.518	0%	31%	Dinas Pendidikan		
			23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	158.714	0	26.570	0	22.241	0	48.810	0%	31%	Dinas Pendidikan		
			23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	439.917	0	55.347	0	64.710	0	120.056	0%	27%	Dinas Pendidikan		
			23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	235.868	0	75.195	0	18.619	0	93.814	0%	40%	Dinas Pendidikan		
			23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	427.646	0	141.457	0	57.444	0	198.901	0%	47%	Dinas Pendidikan		
			23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	188.682	0	66.092	0	24.822	0	90.914	0%	48%	Dinas Pendidikan		
			23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	404.181	0	128.983	0	38.193	0	167.176	0%	41%	Dinas Pendidikan		
			23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	152.984	0	53.417	0	23.751	0	77.169	0%	50%	Dinas Pendidikan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	118.578	0	35.754	0	21.832	0	57.586	0%	49%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	203.514	0	59.563	0	26.560	0	86.123	0%	42%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	236.473	0	95.247	0	24.980	0	120.227	0%	51%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	325.999	0	79.983	0	19.999	0	99.982	0%	31%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	133.034	0	25.014	0	23.115	0	48.129	0%	36%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	434.648	0	29.602	0	31.607	0	61.209	0%	14%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	245.295	0	34.494	0	25.143	0	59.637	0%	24%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	201.133	0	32.471	0	34.369	0	66.840	0%	33%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	219.314	0	14.787	0	3.375	0	18.163	0%	8%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	442.250	0	39.999	0	64.634	0	104.633	0%	24%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	361.332	0	69.803	0	41.633	0	111.437	0%	31%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	168.804	0	19.997	0	10.775	0	30.773	0%	18%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	200.240	0	20.000	0	19.999	0	39.999	0%	20%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	187.440	0	16.480	0	22.005	0	38.485	0%	21%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10	
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	713.782	0	55.841	0	88.761	0	144.603	0%	20%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	368.391	0	79.327	0	21.655	0	100.982	0%	27%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	404.274	0	65.497	0	38.558	0	104.055	0%	26%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	215.169	0	39.995	0	18.631	0	58.626	0%	27%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	171.753	0	15.447	0	19.237	0	34.684	0%	20%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	367.122	0	34.991	0	62.579	0	97.570	0%	27%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	163.859	0	16.776	0	10.380	0	27.156	0%	17%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	311.610	0	35.000	0	28.600	0	63.600	0%	20%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	182.399	0	19.940	0	20.363	0	40.303	0%	22%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	165.505	0	16.209	0	16.420	0	32.629	0%	20%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	392.924	0	57.841	0	49.007	0	106.848	0%	27%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	171.380	0	14.442	0	33.902	0	48.344	0%	28%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	289.616	0	29.307	0	12.494	0	41.801	0%	14%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	237.278	0	19.957	0	4.497	0	24.453	0%	10%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	448.761	0	99.291	0	56.257	0	155.548	0%	35%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	139.473	0	19.981	0	23.188	0	43.169	0%	31%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	216.523	0	18.418	0	38.320	0	56.738	0%	26%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	359.065	0	59.889	0	30.025	0	89.914	0%	25%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	408.004	0	61.368	0	52.489	0	113.857	0%	28%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	483.713	0	50.000	0	132.498	0	182.498	0%	38%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	259.986	0	19.160	0	39.886	0	59.046	0%	23%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	572.308	0	68.930	0	66.208	0	135.138	0%	24%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	432.337	0	69.593	0	48.371	0	117.963	0%	27%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	330.217	0	33.659	0	36.668	0	70.327	0%	21%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	275.373	0	20.840	0	49.641	0	70.481	0%	26%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	382.671	0	50.685	0	29.830	0	80.515	0%	21%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	190.640	0	18.708	0	20.925	0	39.634	0%	21%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	198.443	0	19.925	0	13.386	0	33.312	0%	17%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	215.164	0	19.138	0	16.860	0	35.999	0%	17%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	193.994	0	19.744	0	21.070	0	40.814	0%	21%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10	
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	180.272	0	27.539	0	23.560	0	51.099	0%	28%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	181.820	0	35.367	0	26.060	0	61.427	0%	34%	Dinas Pendidikan
	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	162.479	0	19.821	0	27.786	0	47.607	0%	29%	Dinas Pendidikan
	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Lembaga	73	746.342		3.900	0	81.630	0	85.530	0%	11%	Dinas Pendidikan
	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	Bidang Kreatifitas	14	1.016.686		704	0	25.840	0	26.544	0%	3%	Dinas Pendidikan
	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Lembaga	73	797.965		-	0	21.988	0	21.988	0%	3%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	288.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	52.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	66.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	296.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	121.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	287.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	85.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	228.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	84.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	51.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	92.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	136.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	143.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	33.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Piliangbango)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	184.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	133.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	86.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	141.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	272.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	248.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	114.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	105.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	122.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	419.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	293.600	0	-			0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	362.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	124.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	164.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	247.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	122.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	277.600	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	54.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	197.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	288.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	77.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	256.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	145.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	364.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	64.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	82.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	288.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	264.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	374.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	109.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	436.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	283.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	251.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	145.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	194.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	130.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	138.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	149.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	145.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	86.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	50.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	68.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%		
1					2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10
1	01	02	2.02					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
					Bengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	terlaksananya 8 Standar Nasional Pendidikan	%	100	38.165.027		755.907			0	755.907	0%	2%	
				13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Lembaga yang direhab	Lembaga	6	11.800.000		17.280		644.754	0	662.034	0%	6%	Dinas Pendidikan
				27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah	Kain Seragam	5960	3.384.371		1.800		13.013	0	14.813	0%	0%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	1.102.907	0	74.021	0	138.578	0	212.599	0%	19%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	960.417	0	19.896	0	94.383	0	114.279	0%	12%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	723.469	0	65.459	0	127.448	0	192.907	0%	27%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	896.884	0	36.008	0	103.023	0	139.032	0%	16%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	447.271	0	74.741	0	94.983	0	169.725	0%	38%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	848.058	0	59.438	0	139.332	0	198.770	0%	23%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	856.073	0	29.910	0	41.587	0	71.497	0%	8%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	647.542	0	34.610	0	140.144	0	174.754	0%	27%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	970.102	0	71.494	0	136.496	0	207.990	0%	21%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	990.883	0	75.350	0	149.144	0	224.494	0%	23%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	572.025	0	65.344	0	123.269	0	188.613	0%	33%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	788.114	0	37.732	0	119.247	0	156.979	0%	20%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	721.871	0	63.133	0	78.507	0	141.640	0%	20%	Dinas Pendidikan
				36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	549.837	0	14.211	0	46.968	0	61.178	0%	11%	Dinas Pendidikan
				37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Lembaga	23	677.310	0	7.800	0	68.560	0	76.360	0%	11%	Dinas Pendidikan
				38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	Bidang Kreatifitas	14	1.207.005		-	0	2.662	0	2.662	0%	0%	Dinas Pendidikan
				41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Lembaga	23	656.888		7.680	0	95.725	0	103.405	0%	16%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%	10						
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	1.303.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	744.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	573.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	886.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	462.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	650.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	764.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	550.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	439.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	518.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	651.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	723.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	725.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	376.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	2,03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	100	9.483.619	0	37.918		1.666.907	0	1.704.825	0%	18%	
	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga yang terpenuhi anggaran pengelolaannya	Lembaga	1	376.297	0	37.918	0	30.407	0	68.325	0%	18%	Dinas Pendidikan
	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang memahami kurikulum PAUD	Lembaga	163	3.195.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Prosentase lembaga paud yang berizin	%	30	5.912.322	0	-	0	1.636.500	0	1.636.500	0%	28%	Dinas Pendidikan
	2,04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase lembaga yang terakreditasi	%	65	2.779.904	0	-		475.000	0	475.000	0%	17%	
	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Lulus Ujian	Siswa	175	964.840	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%	10								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah tenaga kependidikan yang memahami pengelolaan perpustakaan sekolah	Tenaga Pendidik	92	625.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan		
	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang bersertifikat	%	60	1.190.064	0	-	0	475.000	0	475.000	0%	40%	Dinas Pendidikan		
1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase sekolah yang berkurikulum SNP	%	100	681.084	0	-	0	-	0%	0%			
		2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase sekolah yang melaksanakan kurikulum SNP	%	100	681.084	0	-	0	-	0%	0%			
			04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	%	100	681.084	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan		
1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase tenaga pendidik bersertifikasi yang berprestasi	%	60	6.616.572	18.450	0	343.034	0	361.484	0%	5%		
		2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase tenaga pendidik bersertifikasi yang berprestasi	%	60	6.616.572	18.450	0	343.034	0	361.484	0%	5%		
			01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru berprestasi	%	50	5.382.509	0	18.450	0	226.515	0	244.965	0%	5%	Dinas Pendidikan
			02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase sekolah yang memiliki guru berprestasi min 10%	%	10	1.234.063	0	-	0	116.520	0	116.520	0%	9%	Dinas Pendidikan
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Keluarga Sehat	Indeks/ Nilai	0,39	145.046.778		9.714.195	0	11.723.178	0	21.437.373	0%	15%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	96.066.766		132.306	0	301.299	0	433.606	0%	0%	
			08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	Unit	1	4.021.431	0	-			0	-	0%	0%	RSUD
			09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
			12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Unit	1	3.116.724	0	-			0	-	0%	0%	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10			
	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	kegiatan	2	1.860.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Unit	20	3.404.950	0	-		0	-	0%	0%	RSUD	
	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													
	16	Pengadaan Obat, Vaksin (Dinkes)	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	paket	1	5.696.091	0	132.306	301.299	0	433.606	0%	8%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	16	Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD)	Jenis obat/vaksin yang diadakan	Jenis	6	502.609	6	-		6	-	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinkes)	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	kegiatan	2	1.310.409	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat (Dinkes) Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					0	-	0	-					
	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					0	-	0	-					
	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	%	100	76.153.952	100	-		100	-	100%	0%	RSUD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II						
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%					
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM mencapai target	%	100	48.980.013	9.581.888	0	11.421.879	0	21.003.767	0%	43%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	%	100	657.104	0	6.600	0	41.198	0	47.798	0%	7%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	3.060		2.660	0	8.604	0	11.264	0%	368%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	3.060	0	-	0	1.220	0	1.220	0%	40%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	31.760		1.010		1.960	0	2.970	0%	9%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	1.440		264		288	0	552	0%	38%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	504.563		-		2.971	0	2.971	0%	1%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100	1.440		-		864	0	864	0%	60%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (dinas kesehatan)	%	100	9.364	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	3.850		-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	40.565		-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target	%	100	150.800		-	0	1.830	0	1.830	0%	1%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mencapai target	%	100	600.836		8.200		49.705	0	57.905	0%	10%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi stunting	%	9,7	412.899		1.260	0	2.130	0	3.390	0%	1%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manguharjo)						0		19.120	0	19.120	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Patihan)						0	24.785	0	24.785	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Oro - Oro Ombo)						0	40.860	0	40.860	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tawangrejo)						0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banjarejo)						0	40.605	0	40.605	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Demangan)						0	60.540	0	60.540	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pekerja yang dilayani	%	40	65.716		-	9.058	0	9.058	0%	14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indek Keluarga Sehat	%	85	232.743	0	864	0	21.838	0	22.702	0%	10%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0	-	0		-				
	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100	152.401	0	54.000	100	94.162	100	148.162	100%	97%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	%	100	217.113	1.350	0	32.444	0	33.794	0%	16%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	%	100	242.113	9.500	15.259	24.759	0	24.759	0%	10%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			Prosentase penyakit tidak menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	%	62,5					0		0%			
	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Orang	88966	23.627.334	9.355.491	9.471.113	0	18.826.604	0%	80%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase kasus potensial KLB konfirmasi lab	%	60	9.910	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan	%	60	442.024	0	4.400	0	15.610	0	20.010	0%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Manguharjo)	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	%	89	3.187.530	-	0	183.689	0	183.689	0%	6%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Patihan)	PKP Puskesmas	%	88	2.516.603	-	0	219.609	0	219.609	0%	9%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Oro - Oro Ombo)	PKP Puskesmas	%	92,66	3.014.274	-	0	192.867	0	192.867	0%	6%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%							
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10				
	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tawangrejo)	PKP Puskesmas	%	90	2.922.392	-	0	248.068	0	248.068	0%	8%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjarejo)	Presentase PKP Puskesmas	%	85	3.564.193	-	0	228.598	0	228.598	0%	6%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Demangan)	Presentase PKP Puskesmas	%	80	3.173.854	-	0	176.664	0	176.664	0%	6%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	terlaksananya pelayanan gawat darurat	%	100	2.484.156	0	50.749	0	31.161	0	81.910	0%	3%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	%	100	247.615	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	terlaksananya pelayanan gawat darurat	%	100	459.300	85.540	0	185.059	0	270.599	0%	59%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	%	90	318.637	0	29.622	0	65.614	0	95.235	0%	30%	
		2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Dokter	1	30.000	1	5.000	1	17.500	1	22.500	100%	75%	
		02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Dokter	1	30.000	0	5.000	0	17.500	0	22.500	0%	75%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II										
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%									
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%	10									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)					
	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	%	0,92	288.637	0	24.622	0	48.114	0	72.735	0%	25%			
	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar	%	92	288.637	0	24.622	0	48.114	0	72.735	0%	25%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	%	85	247.445	0	1.719	0	39.503	0	41.222	0%	17%	
	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	%	0,85	196.245	0	1.719	0	35.579	0	37.298	0%	19%			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah jenis Fasilitas Pelayanan kefarmasian (Fasyanfar) yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	Jenis	6	196.245	0	1.719	0	35.579	0	37.298	0%	19%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Prosentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang mendapat No.P-IRT	%	0,85	51.200	0	-	0	3.924	0	3.924	0%	8%			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Prosentase IRT yang sehat	%	65	51.200	0	-	0	3.924	0	3.924	0%	8%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	%	57,14	10.414.912	0	72.912	0	13.649	0	86.561	0%	1%	
	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	kegiatan	1	500.437	0	10.007	0	13.649	0	23.656	0%	5%			
	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	Jenis	6	500.437		10.007		13.649	0	23.656	0%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan		kegiatan		2												
	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Puskesmas	1	3.885.744	0	-	0	-	0	-	0%	0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II						
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%					
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10		
	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	%	100	789.041	0	-	0	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Manguharjo)	%	100	463.002	0	-	0	-	0	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Patihan)	%	100	456.810	0	-	0	-	0	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Oro Oro Ombo)	%	100	496.964	0	-	0	-	0	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Tawangrejo)	%	100	564.295	0	-	0	-	0	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Banjarejo)	%	100	580.632	0	-	0	-	0	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Demangan)	%	100	535.000	0	-	0	-	0	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	42,86	6.028.731	0	62.905	0	0	62.905	0%	1%		
	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%	33,33	4.346.761	0	62.905	0	46.591	0	109.496	0%	3%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	%	41		0		0						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10					
	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah jenis fasilitasi kegiatan promotif preventif	%	33,33	266.050	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			
	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Patihan)	Jumlah jenis fasilitasi kegiatan promotif preventif	%	88	212.330	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			
	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Oro - Oro Ombo)	Prosentase puskesmas membina UKBM sesuai standart	%	33,33	281.900	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			
	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah jenis fasilitas kegiatan promotif preventif	%	90	249.475	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			
	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah jenis fasilitasi kegiatan promotif preventif	%	33,33	346.215	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			
	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Demangan)	Jumlah jenis fasilitasi kegiatan promotif preventif	%	88	326.000	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Banjir	%	15	27.250.000	1	85.826	2	381.962	3	467.788	20%	2%		
		2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Daerah genangan	%	15	27.250.000	1	85.826	2	381.962	3	467.788	20%	2%		
			11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung yg dibangun	Tiitik	2	3.657.399	0	42.913	0	-	0	42.913	0%	1%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		Jumlah stasiun pompa banjir yg direhab	Titik	4	194.913	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
	46	Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang sungai yg dinormalisasi	Km	1,5	22.942.602	0	19.007	0	111.309	0	130.315	0%	1%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		Persentase Berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	Titik	2	455.086	0	23.907	1	270.654	1	294.560	50%	65%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	%	90,5	31.450.000	0	233.424	10	957.978	10	1.191.401	11%	4%	
			2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kondisi baik	Km	10	31.450.000	0	233.424	10	957.978	10	1.191.401	100%	4%	
				01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	Dokumen	8	1.000.000	-	0	-	0	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
				05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun	Km	1,5	27.950.000	-	0	270.692	0	270.692	0%	1%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara	Km	10	2.500.000	233.424	3	687.286	3	920.709	30%	37%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	%	100	29.300.000	10	-	0	585.350	10	585.350	10%	2%	
			2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	100	29.300.000	10	-	0	585.350	10	585.350	10%	2%	
				01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase jumlah permohonan yg ditindaklanjuti	%	100	200.000	10	-	0	-	10	10%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
				02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung	Gedung	5	29.100.000	-	1	585.350	1	585.350	20%	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	%	100	17.481.400	0	-	5	298.801	5	298.801	5%	2%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II						
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%					
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase bangunan sesuai ketentuan	%	100	17.481.400	0	-	5	298.801	5	298.801	5%	2%	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	Lokasi	30	17.481.400	5	-	1	298.801	6	298.801	20%	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	%	94,5	76.589.000	10	127.288	0	10.147.655	10	10.274.943	11%	13%	
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Km	409,835	76.589.000	0	127.288	0	10.147.655	0	10.274.943	0%	13%	
	01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	jumlah dokumen yang ditindaklanjuti	Dokumen	10	2.017.000	0	4.900	3	934.392	3	939.292	30%	47%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan yang dibebaskan	Hektar	5	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	04 Survey Kondisi Jalan / Jembatan	jumlah dokumen	Dokumen	2	412.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	05 Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Meter	200	22.450.000	0	-	25	4.699.272	25	4.699.272	13%	21%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah ruas yg dilebarkan	Ruas	6	1.320.000	0	-	2	1.176.042	2	1.176.042	33%	89%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	07 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jumlah ruas yg ditambah lajunya	Ruas	1	5.075.000	0	-	0	587.752	0	587.752	0%	12%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	09 Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yg direhab	Km	6	12.580.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yg dipelihara secara berkalan	Km	6	14.540.000	0	-	0	1.401.645	0	1.401.645	0%	10%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan yg dipelihara	Ruas	28	2.335.000	0	122.388	10	1.048.509	10	1.170.896	36%	50%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
	12 Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan	1	655.000	0	-	0	200.841	0	200.841	0%	31%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%	10								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jembatan	10	205.000	0	-	8	99.202	8	99.202	80%	48%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR		
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi	%	95	800.000	10	1.500	0	-	10	1.500	11%	0%		
		2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yg bersertifikat	Orang	100	550.000	10	1.500	0	-	10	1.500	10%	0%		
			04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta	Orang	100	550.000	10	1.500	0	-	10	1.500	10%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah rekomendasi IUJK	Dokumen	50	250.000	0	-	0	-	0	0%	0%		
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah BUJK	BUJK	50	250.000		-	0	-	0	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RT/RW	%	100	1.500.000		3.368	10	112.832	10	116.200	10%	8%		
			2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen tata ruang yg ditetapkan	Dokumen	1	800.000	0	1.403	0	44.606	0	46.009	0%	6%	
			01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yg disusun	Dokumen	1	800.000	0	1.403	0	44.606	0	46.009	0%	6%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	300.000	0	1.966	0	32.110	0	34.075	0%	11%	
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yg ditindaklanjuti	%	100	300.000	10	1.966	10	32.110	20	34.075	20%	11%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaata Ruang	Dokumen	1	400.000	0	-	0	36.116	0	36.116	0%	9%	
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	%	100	400.000		-		36.116	0	36.116	0%	9%	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	%	100	1.676.950	10	56.083	10	250.833	20	306.915	20%	18%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%							
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	566.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%			
	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen	1	566.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lokasi	1	1.110.950	0	56.083	0	250.833	0	306.915	0%	28%			
	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lokasi	1	1.110.950	1	56.083	1	250.833	1	306.915	100%	28%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	98,5	4.264.200	0	29.408	0	3.135.524	0	3.164.933	0%	74%	
	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	%	0,5	504.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%			
	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	204.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	300.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	%	98,5	3.760.200	0	29.408	0	3.135.524	0	3.164.933	0%	84%			
	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	3	203.850	0	1.562	0	165.745	0	167.307	0%	82%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10					
	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	%	100	2.800.350	0	8.814	60	2.486.120	60	2.494.934	60%	89%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Lokasi	3	756.000	0	19.032	0	483.660	0	502.692	0%	66%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100	8.954.200	20	778.867	30	6.590.979	50	7.369.845	50%	82%	
		2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase Penyelenggaraan PSU Perumahan yang memadai	%	100	8.954.200	0	778.867	0	6.590.979	0	7.369.845	0%	82%	
		02		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi Prasarana,sarana dan utilitas umum yang disediakan	Kecamatan	3	8.854.000	0	778.867	0	6.590.979	0	7.369.845	0%	83%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		03		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	1	100.200	0	0	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	%	96	2.116.260		267.753	0	1.168.693	0	1.436.446	0%	68%	
		2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	%	96	1.776.260		245.420	0	820.794	0	1.066.214	0%	60%	
		01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	%	100	250.000	0	26.850	20	238.640	20	265.490	20%	106%	SatPol PP dan PK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10					
	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Prosentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada yang tertangani	%	96	986.030	0	137.400	0	405.034	0	542.434	0%	55%	SatPol PP dan PK	
	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Prosentase peserta koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	%	90	58.500	0	2.250	0	20.429	0	22.679	0%	39%	SatPol PP dan PK	
	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Prosentase kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	%	92	181.730	0	36.000	0	54.000	0	90.000	0%	50%	SatPol PP dan PK	
	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Prosentase SDM Satpol Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Damkar yang berkompeten	%	80	300.000	0	42.920	0	102.691	0	145.611	0%	49%	SatPol PP dan PK	
	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		persentase penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	%	100	340.000	0	22.333	30	347.899	30	370.232	30%	109%		
	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Prosentase peserta sosialisasi yang paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	%	100	210.000	0	-	0	50.463	0	50.463	0%	24%	SatPol PP dan PK	
	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Prosentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota yang tertangani	%	100	130.000	0	22.333	50	297.436	50	319.769	50%	246%	SatPol PP dan PK	
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	%	100	1.584.327	78,5	238.968	0	366.206	78,5	605.174	79%	38%	
	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	131.700	0	-	0	20.129	0	20.129	0%	15%		
	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	%	100	131.700	0	-	0	20.129	0	20.129	0%	15%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%				
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	1.299.067	67	216.280	0	346.077	67	562.357	67%	43%	
		02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	%	100	155.953	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	%	100	131.764	0	-	100	48.037	100	48.037	100%	36%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Persentase dokumen yang disusun	%	100	186.350	27,5	13.000	12,5	20.611	40	33.611	40%	18%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	%	100	825.000	39,5	203.280	19,75	277.429	59,25	480.709	59%	58%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	153.560	90	22.688	0	-	90	22.688	90%	15%	
		04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	%	100	153.560	90	22.688	0	-	90	22.688	90%	15%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		100	1.799.306		154.075	0	340.635	0	494.710	0%	27%	
	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		persentase penanganan, pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	%	100	1.022.948	0	148.810	0	328.329	0	477.139	0%	47%	
		01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota yang dilaksanakan	%	80	776.358		133.485	50	260.298	50	393.783	63%	51%	SatPol PP dan PK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10					
	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase kasus Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	%	100	246.590		15.325	50	68.031	50	83.356	50%	34%	SatPol PP dan PK	
	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		persentase kegiatan inspeksi proteksi kebakaran	%	90	776.358	0	5.265	0	12.306	0	17.571	0%	2%		
	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Prosentase Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang didata	%	90	776.358	0	5.265	0	12.306	0	17.571	0%	2%	SatPol PP dan PK	
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	%	100	3.511.385	0	22.612	0	288.413	0	311.024	0%	9%	
		2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	Orang	7	3.511.385	0	22.612	0	288.413	0	311.024	0%	9%	
			01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan kemampuan	Orang	135	311.172		-	135	70.601	135	70.601	100%	23%	Dinas Sosial PPPA
			02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang didampingi oleh TKSK	Orang	80	28.920	229	2.030	259	584	488	2.614	610%	9%	Dinas Sosial PPPA
			03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa yang mengikuti sarasehan	Orang	115	43.980		-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
			04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Lembaga	5	3.127.313	3	20.582	4	217.228	7	237.810	140%	8%	Dinas Sosial PPPA
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani	%	100	1.758.015	0	118.960	0	306.168	0	425.128	0%	24%	
		2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang tertangani	%	100	1.507.213	0	97.620	0	245.439	0	343.058	0%	23%	
			01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan pangannya	Orang	155	278.538	182	73.198	359	160.288	541	233.486	349%	84%	Dinas Sosial PPPA
			02	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Orang	10	15.000	6	2.762	34	6.714	40	9.476	400%	63%	Dinas Sosial PPPA
			03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Orang	6	10.500	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
			04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Orang	10	27.300	6	1.420	8	1.080	14	2.500	140%	9%	Dinas Sosial PPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%							
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10				
	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKSyang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	130	276.625	98	9.300	198	14.850	296	24.150	228%	9%	Dinas Sosial PPPA	
	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial	Orang	286	821.400	18	6.520	45	53.632	63	60.152	22%	7%	Dinas Sosial PPPA	
	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang terlayani	Orang	40	77.850	1	4.420	8	8.875	9	13.295	23%	17%	Dinas Sosial PPPA	
	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	%	100	250.802	0	21.340	0	60.729	0	82.069	0%	33%		
	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan layanan kedaruratan	Orang	15	138.302	22	13.590	35	28.247	57	41.837	380%	30%	Dinas Sosial PPPA	
	04	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Orang	105	47.400	0	-	110	18.630	110	18.630	105%	39%	Dinas Sosial PPPA	
	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Orang	6	7.500	2	-	7	3.942	9	3.942	150%	53%	Dinas Sosial PPPA	
	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	39.400	8	5.640	14	6.960	22	12.600	220%	32%	Dinas Sosial PPPA	
	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Orang	10	18.200	3	2.110	5	2.950	8	5.060	80%	28%	Dinas Sosial PPPA	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	90	10.740.275	0	284.689	0	1.960.331	0	2.245.020	0%	21%	
	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	90	7.880	0	-	0	200	0	200	0%	3%		
	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang didata	Orang	24	3.600	0	-	0	200	0	200	0%	6%	Dinas Sosial PPPA	
	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Orang	24	4.080	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA	
	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Orang	24	200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA	
	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	10.732.395	0	284.689	0	1.960.131	0	2.244.820	0%	21%		
	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah fakir miskin yang didata	Orang	10000	871.765	0	10.155	0	160.759	0	170.914	0%	20%	Dinas Sosial PPPA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan	27	757.899	0	-	27	103.480	27	103.480	100%	14%	Dinas Sosial PPPA			
	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KK	4638	9.067.630	273	274.534	3209	1.695.892	3482	1.970.426	75%	22%	Dinas Sosial PPPA			
	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	KUBE	10	35.101	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA			
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100	502.390	0	44.017	0	50.292	0	94.308	0%	19%	
			2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase Taruna Siaga Bencana yang handal	%	100	183.250	0	-	0	950	0	950	0%	1%	
			01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	Orang	3300	40.150	0	0	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
			02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	Orang	1000	10.000	0	0	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
			05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan psikososial	Orang	300	133.100	0	0	0	950	0	950	0%	1%	Dinas Sosial PPPA
			2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana	%	100	319.140	0	44.017	0	49.342	0	93.358	0%	29%	
			01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	Orang	60	13.370	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
			02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang mendapatkan sosialisasi	Orang	20	305.770	20	44.017	20	49.342	20	93.358	100%	31%	Dinas Sosial PPPA
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	115.600	25	6.120	25	15.482	50	21.602	50%	19%	
			2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi taman makam pahlawan nasional yang dilakukan pemeliharaan	Lokasi	1	115.600	1	6.120	1	15.482	1	21.602	100%	19%	
			02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dipelihara	Lokasi	1	115.600	1	6.120	1	15.482	1	21.602	100%	19%	Dinas Sosial PPPA

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						10		
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	%	23	1.282.159	0	8.800	0	31.590	0	40.390	0%	3%	
		2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten	Orang	230	1.143.194	0	8.800	0	15.200	0	24.000	0%	2%	
		01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	Orang	230	1.143.194	0	8.800	0	15.200	0	24.000	0%	2%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPTKS yang terakreditasi	%	20	138.965	0	-	0	16.390	0	16.390	0%	12%	
		01		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKS)	Pembinaan	4	138.965	0	-	1	16.390	1	16.390	25%	12%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	79	457.327	0	8.000	0	32.767	0	40.767	0%	9%	
		2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	Orang	500	457.327	0	8.000	0	32.767	0	40.767	0%	9%	
		01		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersediaanya aplikasi ketenagakerjaan yang terupdate	Aplikasi	1	180.584	0	4.000	0	21.432	0	25.432	0%	14%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan Sosialisasi Bursa Kerja	Orang	500	156.469	0	4.000	27	11.335	27	15.335	5%	10%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		03		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	Orang	75	120.274	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	70	1.993.000	0	153.948	0	466.478	0	620.426	0%	31%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						10		
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB	%	25	511.825	0	-	0	190.535	0	190.535	0%	37%				
	01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah dokumen peraturan ketenagakerjaan	Dokumen	15	200.000	0	-	6	-	6	-	40%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
	03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	jumlah perusahaan yang terdata dan mendapatkan sosialisasi sarana HI	Perusahaan	300	311.825	0	-	100	190.535	100	190.535	33%	61%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	%	100	1.481.175	0	153.948	0	275.944	0	429.891	0%	29%				
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan melalui PB	Kasus	15	206.000	0	4.400	3	9.582	3	13.982	20%	7%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga kerja Sektor Informal yang mendapatkan SIAGAKITA	Tenaga Kerja	3500	1.275.175	0	149.548	4237	266.362	4237	415.910	121%	33%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	10	885.073	0	10.392	0	180.223	0	190.615	0%	22%	
		2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Alokasi anggaran program yang di ARG	%	10	169.823	0	10.392	0	73.106	0	83.497	0%	49%	
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	jumlah peserta pertemuan	Orang	100	98.923	0	-	50	59.147	50	59.147	50%	60%	Dinas Sosial PPPA
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten /Kota	jumlah peserta rakor	Orang	350	43.750	65	5.140	75	13.959	140	19.099	40%	44%	Dinas Sosial PPPA
			03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	jumlah peserta review	Orang	68	12.550	68	5.252	68	-	68	5.252	100%	42%	Dinas Sosial PPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%							
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10		
	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	14.600	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA	
	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase partisipasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	%	92	250.000	0	-	44	102.103	44	102.103	48%	41%		
	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pertemuan movev P3EL dan UP2PKK	Orang	140	37.300	0	-	60	8.980	60	8.980	43%	24%	Dinas Sosial PPPA	
	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan	Orang	162	212.700	0	-	108	93.123	108	93.123	67%	44%	Dinas Sosial PPPA	
	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	%	48,34	465.250	0	-	0	5.015	0	5.015	0%	1%		
	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	pameran	1	65.250	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA	
	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan forum/pembinaan	Orang	150	200.000	0	-	70	5.015	70	5.015	47%	3%	Dinas Sosial PPPA	
	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan	Orang	250	200.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	%	100	301.672	0	23.850	0	49.370	0	73.220	0%	24%	
	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	100	96.115	0	-	0	-	0	-	0%	0%		
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Orang	110	58.630	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%							
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10		
	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	Orang	150	37.485	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA	
	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan	%	100	160.372	0	21.200	0	34.017	0	55.217	0%	34%		
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan sinkronisasi	Orang	60	160.372	30	21.200	60	34.017	90	55.217	150%	34%	Dinas Sosial PPPA	
	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Prosentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifikasinya dalam situasi darurat	%	100	45.186	0	2.650	0	15.353	0	18.003	0%	40%		
	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	Klien	29	26.277	0	2.650	0	300	0	2.950	0%	11%	Dinas Sosial PPPA	
	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Orang	30	18.909	0	-	30	15.053	30	15.053	100%	80%	Dinas Sosial PPPA	
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	%	5	673.060	0	26.709	0	63.396	0	90.105	0%	13%	
	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase peserta yang memahami Kesenjangan Gender dan Hak Anak	%	70	220.000	0	9.930	0	34.702	0	44.632	0%	20%		
	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta review / pelatihan/ lomba	Orang	250	100.000	83	9.930	0	-	83	9.930	33%	10%	Dinas Sosial PPPA	
	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan	%	5	20.000	0	-	140	13.765	140	13.765	2800%	69%	Dinas Sosial PPPA	
	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	Orang	100	100.000	0	-	220	20.937	220	20.937	220%	21%	Dinas Sosial PPPA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor	Orang	300	109.750	135	12.750	0	8.000	135	20.750	45%	19%	Dinas Sosial PPPA
	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta studi tiru/jambore nasional	Orang	200	99.706	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi 10 program pokok PKK	Kelurahan	27	144.000	27	1.565	27	14.892	54	16.456	200%	11%	Dinas Sosial PPPA
	2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan	Orang	100	99.603	30	2.465	180	5.803	210	8.268	210%	8%	Dinas Sosial PPPA
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK												
	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bintek data gender dan anak	Orang	50	100.000	0	-	50	14.119	50	14.119	100%	14%	Dinas Sosial PPPA
	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta monev dan rakor	Orang	50	75.000	0	1.600	50	26.268	50	27.868	100%	37%	Dinas Sosial PPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II										
						6	7	8=6+7							9=8/5 x 100%			
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10				
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	%	100	719.308	0	11.688	0	49.739	0	61.427	0%	9%	
			2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pertemuan gugus tugas	%	100	95.795	0	7.385	0	21.963	0	29.348	0%	31%	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi	Orang	140	95.795	0	7.385	140	21.963	140	29.348	100%	31%	Dinas Sosial PPPA
			2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	%	100	623.513	0	4.303	0	27.776	0	32.079	0%	5%	
					Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi / sinkronisasi	Orang	100	154.256	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang dibina	Orang	100	160.150	0	1.103	65	19.709	65	20.812	65%	13%	Dinas Sosial PPPA
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia	Dokumen	1	179.865	0	3.200	0	8.067	0	11.267	0%	6%	Dinas Sosial PPPA
					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi / sinkronisasi	Orang	150	129.242	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	%	100	214.596	0	-	0	43.184	0	43.184	0%	20%	
			2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	%	100	82.230	0	-	0	42.084	0	42.084	0%	51%	
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah	Sekolah	49	82.230	0	-	0	42.084	0	42.084	0%	51%	Dinas Sosial PPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10	
	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	92.571	0	-	0	-	0	-	0%	0%		
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	2.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA	
	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	90.171	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Sosial PPPA	
	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	39.796	0	-	0	1.100	0	1.100	0%	3%		
	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	60	39.796	0	-	0	1.100	0	1.100	0%	3%	Dinas Sosial PPPA	
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	Skor	95,8	962.000	0	131.960	0	448.959	0	580.919	0%	60%	
	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	16200	357.000	0	4.050	0	30.077	0	34.127	0%	10%	
	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen (Prognosa Panel Harga dan Neraca Bahan Pangan)	Dokumen	2	65.000	0	-	0	4.193	0	4.193	0%	6%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Produksi Pangan Hasil Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kg	2000	210.000	0	4.050	500	23.329	500	27.379	25%	13%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						K	Rp. (000)
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen (Dok. Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Grosir dan Eceran)	Dokumen	2	82.000	0	-	0	2.555	0	2.555	0%	3%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	kkal/kapita	2100	605.000	0	127.910	0	418.882	0	546.792	0%	90%		
	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen (Pola Pangan Harapan & Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	Dokumen	2	65.000	0	6.176	0	8.828	0	15.004	0%	23%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Menu Olahan yang Tercipta (Produk Lomba Cipta Menu)	Produk	190	420.000	0	121.735	0	410.054	0	531.789	0%	127%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen (Dok. Rakor Dewan Ketahanan Pangan & Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan)	Dokumen	2	120.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Peningkatan Sample Pangan Aman yang Teruji (%)	%	1	325.000	0	-	0	56.897	0	56.897	0%	18%	
	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Aman	%	4	325.000	0	-	0	56.897	0	56.897	0%	18%	
	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan (orang)	Orang	450	225.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel yang diperiksa (sampel)	Sampel	45	100.000	0	-	0	56.897	0	56.897	0%	57%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah	%	100	120.000	100	-	10.036	100	10.036	100%	8%		
	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi tanah yang digunakan	Lokasi	10	120.000	10	-	10.036	10	10.036	100%	8%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						10		
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)						
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kali	10	120.000	11	-	10.036	11	10.036	110%	8%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	%	69,23	475.000	64,1	42.520	64,1	110.515	128,2	153.035	185%	32%	
		2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	Dokumen	4	375.000	0	1.750	0	46.540	0	48.290	0%	13%	
			01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	4	375.000	0	1.750	0	46.540	0	48.290	0%	13%	Dinas Lingkungan Hidup
			2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	Dokumen	1	100.000	0	40.770	0	63.975	0	104.745	0%	105%	
			03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	100.000	0	40.770	0	63.975	0	104.745	0%	105%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	48	2.085.000	0	38.983	0	237.512	0	276.494	0%	13%	
			2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	Kegiatan / Usaha	68	1.650.000	5	37.483	48	185.790	53	223.273	78%	14%	
			01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	Kali	20	1.100.000	1	28.398	9	98.198	10	126.595	50%	12%	Dinas Lingkungan Hidup
			02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	1	550.000	0	9.085	0	87.592	0	96.677	0%	18%	Dinas Lingkungan Hidup
			2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	Usaha / Kegiatan	15	435.000	3	1.500	5	51.722	8	53.222	53%	12%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
				1	2	3	4	5		6		7			8=6+7	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan	15	450.000	0	-	4	11.159	4	11.159	27%	2%		
	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	Perusahaan	4	290.000	0	-	2	2.639	2	2.639	50%	1%	Dinas Lingkungan Hidup	
	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat membuat laporan	Wajib Usaha	15	160.000	0	-	4	8.520	4	8.520	27%	5%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	90	1.175.000	0	25.454	0	77.689	0	103.144	0%	9%	
	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota	Kegiatan	15	1.175.000	6	25.454	0	77.689	6	103.144	40%	9%		
	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	Kegiatan	4	1.175.000	3	25.454	0	77.689	3	103.144	75%	9%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	90	85.000	0	-	0	0	-	0%	0%		
	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Kasus	10	85.000	0	-	2	-	2	-	20%	0%		
	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kotantuk	Kasus	10	35.000	0	-	2	5.420	2	5.420	20%	15%	Dinas Lingkungan Hidup	
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentukntuk	Orang	50	50.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7							9=8/5 x 100%
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	74	8.030.000	73,9	871.024	0,01	1.254.301	73,94	2.125.325	100%	26%		
	2.01	Pengelolaan Sampah	jumlah sampah yang ditangani DLH	Ton	32350	7.930.000	7769	870.424	5209	1.253.006	12977,8	2.123.430	40%	27%	
		02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah tempat / lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH	Lokasi	2	360.000	2	950	0	950	2	1.900	100%	1%	Dinas Lingkungan Hidup
		03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah volume sampah harian yang ditangani	Ton	1	5.700.000	1	826.172	0	1.184.772	1	2.010.944	100%	35%	Dinas Lingkungan Hidup
		05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	Jenis	11	1.870.000	0	43.303	4	67.283	4	110.586	36%	6%	Dinas Lingkungan Hidup
	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	Kelompok	35	100.000	6	600	2	1.295	8	1.895	23%	2%	
		02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah (Adipura)	Kecamatan	3	100.000	3	600	0	1.295	3	1.895	100%	2%	Dinas Lingkungan Hidup
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	84	579.680	0	9.715	0	60.575	0	70.290	0%	12%		
	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	Dokumen	37000	328.148	0	9.715	0	60.575	0	70.290	0%	21%	
		04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman KTP EL	Data	30000	177.640	0	5.075	0	31.987	0	37.062	0%	21%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Dokumen	37000	150.508	0	4.640	0	28.588	0	33.228	0%	22%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KTP EL	Dokumen	10000	251.532	0	-	0	-	0	-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						K	Rp. (000)	K
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan KTP EL penduduk usia diatas 18 tahun	Orang	300	251.532	0	0	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	94	824.878	0	1.178	0	126.858	0	128.035	0%	16%	
		2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Dokumen	1200	674.878	0	1.178	0	126.858	0	128.035	0%	19%	
			01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang diterbitkan	Dokumen	1200	130.488	0	-	0	72.697	0	72.697	0%	56%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran penduduk usia diatas 50 tahun	Dokumen	5000	544.390	0	1.178	0	54.161	0	55.338	0%	10%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Dokumen	1200	150.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
			04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akte kelahiran	Dokumen	1500	150.000	0	0	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	akurasi database kependudukan	%	99,1	888.526	0	13.210	0	107.934	0	121.144	0%	14%	
		2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	%	77	458.526	0	13.210	0	107.934	0	121.144	0%	26%	
			01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	Laporan	13	357.223	0	13.210	0	93.193	0	106.403	0%	30%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Inovasi	Buah	4	101.303	0	0	0	14.741	0	14.741	0%	15%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				430.000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	0%			
	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitasi	Kali	8	130.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi	Kali	16	300.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	%	≤ 4	226.618		29.253		0	29.253	#VALUE!	13%			
		2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase OPD yang terlibat dalam program Bangga Kencana (Kampung KB)	%	<50	52.627		-		0	-	#VALUE!	0%			
			07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	terbentuknya RPP Sekolah siaga Kependudukan di 5 sekolah	%	100	52.627	0	-	0	2.509	0	2.509	0%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data PK di 18 kel	%	100	173.991		29.253		0	29.253	0%	17%			
			12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	terdatanya semua keluarga dalam Pendataan Keluarga (PK) 2021 di 18 kelurahan	%	100	173.991		29.253		39.181	0	68.434	0%	39%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8=6+7			9=8/5 x 100%		
1				2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmeet Need	%	< 8	2.716.075	0	11.670			0	11.670	#VALUE!	0%		
			2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	tersedianya data PK di 18 kel	%	100	1.013.763		-			0	-	0%	0%		
			03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK								36.414	0	36.414	#DIV/0!	#DIV/0!		
			07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai KB	Balai	3	1.013.763		-		144.923	0	144.923	0%	14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)														
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								41.000	0	41.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
			2,03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka Drop Out	%	<15	1.702.312		11.670			0	11.670	#VALUE!	1%		
			01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								6.300						
			03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tercapainya KB MKJP 80 aseptor	%	100	961.962		11.670	0	38.511	0	50.181	0%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket pengadaan	paket	2	740.350		0			0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						10	
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)					
	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB							62.217							
2	14	04														
	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
		04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kegiatan	2	88.020	-	2.299	0	2.299	0%	3%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kegiatan	3	454.959	15.400	58.991	0	74.391	0%	16%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
2	15															
2	15	02														
	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	100.000	0	-	0	0	-	0%	0%			
		01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	1	100.000	0	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	
		2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik	%	0,75	24.542.324	0	89.872	0	107.424	0	197.295	0%	1%	
		01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan	Unit	1	13.205.000	0	28.400	0	28.400	0	56.800	0%	0%	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10	
	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan	Unit	1137	7.765.700	0	39.440	0	39.440	0	78.880	0%	1%	Dinas Perhubungan
	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah perlengkapan jalan dipelihara	Unit	6813	3.571.624	0	22.032	0	39.584	0	61.615	0%	2%	Dinas Perhubungan
	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	Lokasi	1	710.062	0	73.653	0	191.569	0	265.223	0%	37%	
	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	luas bangunan	m ²	45	710.062	0	73.653	0	191.569	0	265.223	0%	37%	Dinas Perhubungan
	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan Lulus uji	Kendaraan	1	650.327	0	24.511	0	119.842	0	144.353	0%	22%	
	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji	Buah	4600	544.327	0	24.511	0	119.842	0	144.353	0%	27%	Dinas Perhubungan
	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi	Unit	12	106.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan
	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah MRLL	MRLL	160	1.953.423	0	123.400	0	502.363	0	625.763	0%	32%	
	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah MRLL	Dokumen	1	626.558	0	4.040	0	47.116	0	51.156	0%	8%	Dinas Perhubungan
	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah uji coba dan sosialisasi	Kegiatan	5	170.140	0	3.525	0	20.625	0	24.150	0%	14%	Dinas Perhubungan
	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Kegiatan	2	1.064.725	0	106.008	0	406.041	0	512.049	0%	48%	Dinas Perhubungan
	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah forum	Forum	12	92.000	0	9.827	0	28.580	0	38.407	0%	42%	Dinas Perhubungan
	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kegiatan keselamatan	%	100	115.884	0	-	0	39.592	0	39.592	0%	34%	
	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nilai akreditasi	Lulus	1	73.502	0	-	0	4.720	0	4.720	0%	6%	Dinas Perhubungan
	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Kegiatan	1	42.382	0	-	0	34.873	0	34.873	0%	82%	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						10
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja Angkutan	Nilai	0,4	1.864.171	0	127.368	0	375.815	0	503.183	0%	27%		
	01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan	Kendaraan	41	1.864.171	0	127.368	0	375.815	0	503.183	0%	27%	Dinas Perhubungan	
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	%	50	12.258.826	0	541.008	0	1.019.490	0	1.560.498	0%	13%	
	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	12.258.826	100	541.008	0	1.019.490	100	1.560.498	100%	13%	
		02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	Informasi	1200	4.438.000	189	285.000	375	681.900	564	966.900	47%	22%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	Media	5	2.500.000	5	180.542	5	227.829	10	408.371	200%	16%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sosialisasi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Sosialisasi	10	3.076.826	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	%	100	594.000	100	21.684	100	21.642	100	43.326	100%	7%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Kelompok	27	750.000	27	16.020	27	17.268	27	33.288	100%	4%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II										
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%									
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)					
	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Tema Informasi	6	900.000	2	37.762	2	70.851	4	108.613	67%	12%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan	Skor	3,6	9.949.850	0	144.477	0	1.502.529	0	1.647.006	0%	17%			
		2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	%	100	5.394.650	100	-	0	1.302.534	100	1.302.534	100%	24%			
			02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Domain	126	350.000	238	-	238	6.420	476	6.420	378%	2%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
				03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	Titik	1550	5.044.650	1550	-	1550	1.296.114	3100	1.296.114	200%	26%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan e-Government	%	100	4.555.200	100	144.477	0	199.995	100	344.472	100%	8%			
				01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Paket	1	2.480.200	1	-	1	-	1	-	100%	0%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	Titik	301	400.000	108	32.374	180	44.017	288	76.391	96%	19%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	7	600.000	7	32.027	2	58.654	9	90.681	129%	15%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%							
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10				
	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan	Layanan	1	500.000	1	28.500	1	19.000	2	47.500	200%	10%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah komunitas penunjang Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smart City yang dibina	Komunitas	6	425.000	6	41.850	3	59.904	9	101.754	150%	24%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	Unit	1	150.000	1	9.726	1	18.420	2	28.146	200%	19%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presntase Koperasi Aktif	%	98,69	1.004.010	0	48.518	0	277.294	0	325.812	0%	32%	
		2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi aktif	Koperasi	150	1.004.010	0	48.518	0	277.294	0	325.812	0%	32%	
			01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah koperasi yang tertib melaksanakan RAT	Koperasi	108	1.004.010	0	48.518	57	277.294	57	325.812	53%	32%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	%	30	190.000	0	-	0	10.821	0	10.821	0%	6%	
		2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang meningkat omsetnya	Koperasi	50	190.000	0	-	0	10.821	0	10.821	0%	6%	
			01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kperasi yang dibina	Koperasi	152	190.000	0	-	0	10.821	0	10.821	0%	6%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha Mikro Naik Kelas	%	1,86	1.010.000	0	23.048	0	216.336	0	239.384	0%	24%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						10	
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)					
	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	Orang	3	1.010.000	0	23.048	0	216.336	0	239.384	0%	24%		
	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Orang	145	1.010.000	0	23.048	139	216.336	139	239.384	96%	24%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasi	%	13	472.366	19	1.000	19	35.845	38	36.845	292%	8%	
		2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah investor baru	Investor	10	472.366	3	1.000	3	35.845	6	36.845	60%	8%	
		02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah promosi penanaman modal	Kegiatan	5	472.366	2	1.000	2	35845	4	36.845	80%	8%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	%	80	466.200	89	22.623	99,6	150.129	99,6	172.752	125%	37%	
		2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah pemohon izin	Izin	1500	466.200	819	22.623	1858	150.129	1858	172.752	124%	37%	
		01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah peserta sosialisasi perizinan elektronik	Orang	75	210.000	0	2.000	0	60.156	0	62.156	0%	30%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi	%	10	237.400	10,3	17.402	16,2	82.516	26,5	99.918	265%	42%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah layanan konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Kali	50	18.800	10	3.221	22	7.457	32	10.678	64%	57%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Perusahaan	80	198.225	65	21.430	80	75.128	80	96.558	100%	49%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II										
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%									
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10				
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	%	80	5.700.000	0	6.018	0	31.244	0	37.262	0%	1%	
			2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memenuhi Data Statistik Sektoral	OPD	34	5.700.000	34	6.018	0	31.244	34	37.262	100%	1%	
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	Dokumen	5	5.700.000	0	6.018	1	31.244	1	37.262	20%	1%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Level	II	400.000	II	3.869	0	35.204	II	39.073	100%	10%	
			2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang mengimplementasikan keamanan informasi	%	40	400.000	25	3.869	0	35.204	25	39.073	63%	10%	
				04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	OPD	5	400.000	5	3.869	5	35.204	5	39.073	100%	10%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	%	30	4.570.000	0	3.300	1	475.030	1	478.330	3%	10%	
			2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	Budaya	50	4.570.000	0	3.300	4	475.030	4	478.330	8%	10%	
				01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	Event	25	3.000.000	0	3.300	3	286.645	3	289.945	12%	10%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
				03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	Festival	33	1.570.000	0	-	1	188.386	1	188.386	3%	12%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II						
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%					
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Kesenian	2	210.000	0	-	0		0	-	0%	0%	
	2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Pelatihan	2	210.000	0	-	1		1	-	50%	0%	
	01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Pelatihan	2	210.000	0	-	1	32.326	1	32.326	50%	15%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	21	700.000	0	-	21	55.571	21	55.571	100%	8%	
	2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	21	700.000	0	-	21	55.571	21	55.571	100%	8%	
	Pengembangan Cagar Budaya	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yg dilestarikan	%	21	700.000	0	-	21	55.571	21	55.571	100%	8%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	%	72	2.176.750	0	53.790		196.908	0	250.698	0%	12%	
	2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	5	1.698.750	0	29.550		119.415	0	148.965	0%	9%	
	01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah anggaran	Orang	100000	635.000	0	29.550	3481	119.415	3481	148.965	3%	23%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket	Paket	2	418.750	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi	Eksemplar	3500	645.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2600	-	0	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Minat Baca	Indeks	2	478.000	0	24.240		77.493	0	101.733	0%	21%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						10	
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah perpustakaan terakreditasi	Lembaga	10	338.000	10	24.240	10	77.493	10	101.733	100%	30%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket	Paket	2	140.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Jumlah berkas arsip yang dikelola	Berkas	59500	3.355.000	0	95.063	0	58.704	0	153.767	0%	5%
		2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip dinamis yang dikelola	Berkas	59556	305.000	0	39.902	0	48.036	0	87.938	0%	29%	
		02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah berkas arsip yang dipelihara dan disusutkan	Berkas	59556	305.000	0	39.902	13489	48.036	13489	87.938	23%	29%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip statis yang dikelola	Berkas	250	3.050.000	0	55.161	0	10.668	0	65.829	0%	2%	
		02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas arsip statis statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan layanan akses arsip	Berkas	250	3.050.000	0	55.161	0	10.668	0	65.829	0%	2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%					
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	5	260.000	0	15.869	0	59.412	0	75.281	0%	29%	
		2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan	ton/th	378	260.000	0	15.869	84,21	59.412	84,21	75.281	22%	29%	
		04		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	180	260.000	0	15.869	0	59.412	0	75.281	0%	29%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	%	1	553.000	0	43.542	0	168.856	0	212.398	0%	38%	
		2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Konsumsi Makan Ikan (kg/perkapita/tahun)	kg / perkapita / tahun	15,4	553.000	0	43.542	0	168.856	0	212.398	0%	38%	
		01		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan (orang)	Orang	488	553.000	0	43.542	100	168.856	100	212.398	20%	38%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola	Destinasi	2	398.254	0	-	2		2	-	100%	0%	
		2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Destinasi	2	398.254	0	-	2		2	-	100%	0%	
		03		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	1	250.254	0	-	2		2	-	200%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		06		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pemberdayaan masyarakat	Event	2	148.000	0	-	2	44.823	2	44.823	100%	30%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Pariwisata	Promosi	2	1.058.050	0	-	1	73.028	1	73.028	50%	7%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						10	
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)					
	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Promosi	4	1.058.050	0	-	1	73.028	1	73.028	25%	7%		
	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Event	4	1.058.050	0	-	1	73.028	1	73.028	25%	7%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Event	2	650.000	0	-	0	16.396	0	16.396	0%	3%	
	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Event	2	650.000	0	-	0	16.396	0	16.396	0%	3%		
	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah event pengembangan SDM ekonomi kreatif	Event	2	650.000	0	-	0	16.396	0	16.396	0%	3%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	75	2.391.256	0	30.591	0	192.855	0	223.446	0%	9%	
	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani	%	50	1.952.256	0	14.968	0	145.565	0	160.533	0%	8%		
	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kali	117	620.539	0	4.800	30	133.543	30	138.343	26%	22%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian Pendukung Produksi Pertanian/Peternakan	Paket	1	1.331.718	0	10.168	0	12.022	0	22.190	0%	2%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	%	75	439.000	0	15.624	0	47.290	0	62.914	0%	14%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%	10								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Yang Diawasi	Orang	12	439.000	0	15.624	4	47.290	4	62.914	33%	14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana yang Berfungsi dengan baik	%	15	40.349	0	-	0	2.625	0	2.625	0%	7%		
		2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	20	40.349	0	-	0	2.625	0	2.625	0%	7%		
			02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Laporan Luas Lahan Terdata sebagai Calon LP2B	Laporan	1	40.349	0	0	0	2.625	0	2.625	0%	7%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Jumlah Hewan dan Produk asal Hewan yang Terawasi (%)	%	75	420.000	0	60.232	0	153.581	0	213.813	0%	51%		
		2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Hewan	%	80	220.000	0	41.508	0	118.013	0	159.521	0%	73%		
			01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	3250	220.000	0	41.508	450	118.013	450	159.521	14%	73%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Jumlah sampel Produk asal Hewan yang Aman dikonsumsi	%	80	200.000	0	18.724	0	35.568	0	54.292	0%	27%		
			02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah sampel produk hewan yang diperiksa	Sampel	200	200.000	0	18.724	50	35.568	50	54.292	25%	27%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	05	ROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	70	185.000	0	-	0	53.420	0	53.420	0%	29%		
		2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	Hektar	200	185.000	0	-	0	53.420	0	53.420	0%	29%		
			01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Lahan yang Aman dari Gangguan OPT dengan Penerapan Budidaya Ramah Lingkungan	Hektar	10	185.000	0	0	0	53.420	0	53.420	0%	29%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
1				2	3	4	K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K (%)		RP. (%)		
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	20	160.878	0	15.817	0	37.963	0	53.780	0%	33%			
		2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian Terlatih	Orang	200	160.878	0	15.817	0	37.963	0	53.780	0%	33%			
			02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dokumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani	Dokumen	1	160.878	0	15.817	0	37.963	0	53.780	0%	33%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	%	100	167.200	0	5.871	0	40.345	0	46.216	0%	28%			
		2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase Ijin yang diterbitkan	%	100	167.200	0	5.871	0	40.345	0	46.216	0%	28%			
			01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Perijinan Yang Dikeluarkan	Surat	75	167.200	0	5.871	0	40.345	0	46.216	0%	28%	Dinas Perdagangan		
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar sesuai standar	%	5,88	6.415.335	0	763.346	0	1.418.788	0	2.182.134	0%	34%			
		2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar sesuai standar	Pasar	1	1.940.500	0	49.805	1	330.116	1	379.922	100%	20%			
			01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Direvitalisasi	Pasar	3	110.000	0	-	0	47.990	0	47.990	0%	44%	Dinas Perdagangan		
			02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Pasar	17	1.830.500	0	49.805	0	282.126	0	331.932	0%	18%	Dinas Perdagangan		
		2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah peningkatan omset pasar rakyat	Milyar	3,2	4.474.835	0	713.541	0	1.088.672	0	1.802.213	0%	40%			
			01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pedagang pasar dengan pendapatan diatas UMK perbulan	Orang	500	1.045.885	0	16.110	0	91.182	0	107.292	0%	10%	Dinas Perdagangan		
			02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan pasar	Orang	118	3.428.950	0	697.431	87	997.490	87	1.694.921	74%	49%	Dinas Perdagangan		
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Bahan Pokok dengan Harga Stabil	%	100	137.800	0	4.770	0	7.589	0	12.359	0%	9%			
		2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	%	100	137.800	0	4.770	0	7.589	0	12.359	0%	9%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%	10							
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
		01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan	Kali	3	87.800	0	4.770	0	7.589	0	12.359	0%	14%	Dinas Perdagangan	
		03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Hasil Tembakau Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak Dilekati Pita Cukai	Kali	1	50.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100	260.457	0	25.612	0	44.092	0	69.704	0%	27%	
		2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	Bulan	12	260.457	0	25.612	0	44.092	0	69.704	0%	27%	
			01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Sudah Di Tera Atau Tera Ulang	UTTP	7000	237.457	0	25.612	0	44.092	0	69.704	0%	29%	Dinas Perdagangan
			02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan Produk dalam kemasan yang telah diawasi	Lokasi	9	23.000	0	-	0	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	Produk	15	708.000	0	-	0	14.751	0	14.751	0%	2%	
		2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kali	4	708.000	0	-	0	14.751	0	14.751	0%	2%	
			01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	Kali	4	548.000	0	-	0	14751	0	14.751	0%	3%	Dinas Perdagangan
			03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen Informasi Perdagangan	Dokumen	1	160.000	0	-	0	0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan	
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	%	100	650.151	0	-	0	91.030	0	91.030	0%	14%	
		2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perindustrian	Dokumen	2	650.151	0	-	0	91.030	0	91.030	0%	14%	
			01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	tersusunnya dokumen rencana induk pembangunan industri dokumen induk perindustrian	Dokumen	2	250.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%					
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	IKM	29	60.000	0	-	50	19.445	50	19.445	172%	32%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kali	4	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM	80	240.151	0	-	50	71.585	50	71.585	63%	30%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	%	12,8	506.000	21.302	0	38.210	0	59.512	0%	12%		
		2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyebarluasan informasi produk IKM	Kali	5	506.000	21.302	1	38.210	1	59.512	20%	12%		
		02		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SIINas	Kali	5	506.000	21.302	1	38.210	1	59.512	20%	12%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Pendaftar Transmigrasi yang Terfasilitasi	%	3	32.694	0	-	0	12.800	0	12.800	0%	39%	
		2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan sosialisasi penataan persebaran	Orang	100	32.694	0	-	30	12.800	30	12.800	30%	39%	
		05		Penyuluhan Transmigrasi	jumlah sosialisasi ketransmigrasian	Kegiatan	1	32.694	0	-	1	12.800	1	12.800	100%	39%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%					
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
4	01			SEKRETARIAT DAERAH													
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	80,08	12.502.438	0	78.278	0	506.406	0	584.685	0%	5%	
		2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase laporan administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100	1.816.403	0	33.100	100	214.455	100	247.555	100%	14%	
			01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	Kali	10	1.476.403	0	21.850	8	94.549	8	116.399	80%	8%	Bagian Pemerintahan
			02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen rupa bumi	Dokumen	1	50.000	0	0	1	38.967	1	38.967	100%	78%	Bagian Pemerintahan
			03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen	5	290.000	0	11.250	4	80.940	4	92.190	80%	32%	Bagian Pemerintahan
		2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	8.989.315	0	20.178	0	-	0	20.178	0%	0%	
			01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	jumlah fasilitasi bina mental spiritual	Kegiatan	15	8.989.315	0	20.178	0	0	0	20.178	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
		2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	%	100	1.251.720	0	-	0	197.414	0	197.414	0%	16%	
			01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah fasilitasi penyusunan produk hukum	Perda / Raperda	33	419.360	0	-	0	78.093	0	78.093	0%	19%	Bagian Hukum
			02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	Kegiatan	3	633.286	0	-	1	-	1	-	33%	0%	Bagian Hukum
			03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	Jenis	3	199.074	0	-	2	119.321	2	119.321	67%	60%	Bagian Hukum
		2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah				445.000	0	25.000	0	94.537	0	119.537	#DIV/0!	27%	
			01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	Kali	5	445.000	0	25.000	7	94.537	7	119.537	140%	27%	Bagian Pemerintahan
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks	80,98	2.348.233	0	29.861	0	41.912	0	71.772	0%	3%	
		2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai Target	%	100	1.233.734	0	1.200	0	-	0	1.200	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II							
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%						
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10	
	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Kegiatan	3	1.080.000	0	1.200	0	-	0	1.200	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Kegiatan	2	153.734	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya > 79% dari target	%	100	430.533	0	5.500	31,73	41.912	31,73	47.412	32%	11%		
	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	Dokumen	2	289.630	0	-	25	-	25	-	1250%	0%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	Dokumen	12	140.903	0	5.500	38,45	41.912	38,45	47.412	320%	34%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang & Jasa > 79% dari target	%	100	574.966		23.161	0	-	0	23.161	0%	4%		
	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah personel PD yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai jadwal dan ketentuan perundang - undangan	Dokumen	130	221.022		5.054	19,56	44.009	19,56	49.063	15%	22%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai target	Paket	120	353.944		18.107	7,94	28.257	7,94	46.364	7%	13%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%					
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			109.000		-			0	-	#DIV/0!	0%				
	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	100	109.000		-	0		0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			
4	02	SEKRETARIAT DPRD															
4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Perundang-undangan	IKM	79	14.349.374	0	1.536.010	0	3.639.436	0	5.175.446	0%	36%	
		2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD	%	100	4.776.242	31,67	818.376	0	1.651.925	31,67	2.470.301	32%	52%	
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah raperda yang dibahas	Raperda	10	3.276.242	3	622.195	0	1.260.041	3	1.882.236	30%	57%	Sekretariat DPRD
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dikaji	Dokumen	3	1.500.000	1	196.181	1	391.885	2	588.065	67%	39%	Sekretariat DPRD
		2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase tercapainya fungsi Penganggaran DPRD	%	100	2.312.838	0	2.400	0	18.706	0	21.106	0%	1%	
			03	Pembahasan APBD	Pembahasan Program Pemerintah Daerah sesuai jadwal/tepat waktu	Dokumen	4	2.312.838	0	2.400	0	18.706	0	21.106	0%	1%	Sekretariat DPRD
		2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	1.081.096	35	148.128	0	260.324	35	408.452	35%	38%	
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen notulensi hasil rapat pembahasan tindak lanjut atas LHP-BPK	Dokumen	5	732.438	1	58.884	4	73.248	5	132.132	100%	18%	Sekretariat DPRD
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang tepat waktu	Dokumen	2	348.658	1	89.244	1	187.076	2	276.320	100%	79%	Sekretariat DPRD
		2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	persentase peningkatan SDM anggota DPRD	%	100	5.314.779	30,56	567.106	0	1.451.058	30,56	2.018.164	31%	38%	
				Bimbingan Teknis DPRD	Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	orang	150	3.266.086	34	338.032	56	936.027	90	1.274.058	60%	39%	Sekretariat DPRD
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Acara	50	1.853.820	22	164.516	12	515.032	34	679.547	68%	37%	Sekretariat DPRD
				Penyusunan Program Kerja DPRD	tersusunnya program kerja DPRD tepat waktu	Dokumen	4	194.873	1	64.559	1	-	2	64.559	50%	33%	Sekretariat DPRD
		2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	persentase jumlah pokir yang masuk RKPD	%	70	864.420	0	-	0	257.424	0	257.424	0%	30%	
			03	Pelaksanaan Reses	jumlah pelaksanaan kegiatan reses	Kali	3	864.420	0	0	1	257.424	1	257.424	33%	30%	Sekretariat DPRD

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%					
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
5	01			PERENCANAAN													
5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	%	100	1.906.694	0	342.466	0	272.091	0	614.557	0%	32%	
		2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan / pendanaan tingkat kota	%	100	923.665	0	315.070	0	205.879	0	520.949	0%	56%	
			03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik Perangkat Daerah	Kali	1	188.200	1	29.517	0	0	1	29.517	100%	16%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kali	1	150.465	1	51.784	1	73.472	1	125.256	100%	83%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kota	Kali	1	210.000	1	205.461	0	16.720	1	222.181	100%	106%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi tingkat Kota	%	100	375.000	0	28.308	0	115.687	0	143.995	0%	38%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	terpenuhinya dokumen analisis data dan informasi pemerintah daerah	%	100	87.000	0	17.100	0	17.844	0	34.944	0%	40%	
			02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	persentase terpenuhinya kebutuhan data dan informasi	%	100	87.000	0	17.100	0	17.844	0	34.944	0%	40%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaporkannya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara tepat waktu	%	100	896.029	0	10.296	0	48.367	0	58.664	0%	7%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II										
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%									
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)					
	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen	2	168.745	0	7.000	1	19.928	1	26.928	50%	16%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	4	727.284	1	3.296	2	28.439	3	31.736	75%	4%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	%	100	1.183.814	0	20.184	0	146.698	0	166.882	0%	14%	
		2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	543.474	0	9.727	0	61.161	0	70.888	0%	13%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	%	100	107.474	0	-	0	16.446	0	16.446	0%	15%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	14	25.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	269.850	0	3.793	0	42.381	0	46.173	0%	17%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	141.150	0	5.934	0	2.334	0	8.268	0%	6%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	%	100	149.600	0	3.287	0	20.723	0	24.010	0%	16%	
	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi / notulen koordinasi bidang pemerintahan	Dokumen	1	47.237	0	3.287	0	4.085	0	7.371	0%	16%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (Notulensi / BA Verifikasi) bidang perekonomian	Dokumen	1	102.363	0	-	0	16.639	0	16.639	0%	16%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	490.740	0	7.171	0	64.814	0	71.984	0%	15%	
	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil sinkronisasi bidang infrastruktur	Dokumen	1	113.865	0	-	0	43.543	0	43.543	0%	38%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	Dokumen	1	101.875	0	400	0	13.207	0	13.607	0%	13%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil sinkronisasi bidang kewilayahan	Dokumen	1	155.000	0	6.771	0	3.112	0	9.883	0%	6%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	Dokumen	1	120.000	0	-	0	4.951	0	4.951	0%	4%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 02	KEUANGAN													
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja yang Memenuhi Target	%	100	3.659.921	0	423.652	0	1.822.095	0	2.245.747	0%	61%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II						
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%					
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	%	100	1.142.592	0	21.200	0	104.592	0	125.792	0%	11%	
	01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang Disusun	Dokumen	2	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	2	75.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA yang terfasilitasi	Dokumen	34	35.840	0	-	0	14.684	0	14.684	0%	41%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA yang terfasilitasi	Dokumen	34	32.689	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	2	250.000	0	-	0	12.948	0	12.948	0%	5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (RenjaRKAPK)	Dokumen	2	204.414	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	2	444.649	0	21.200	0	76.959	0	98.159	0%	22%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan	%	100	250.000	0	-	0	52.462	0	52.462	0%	21%	
	01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah dokumen administrasi kasda	Dokumen	35	130.000	0	-	0	37.847	0	37.847	0%	29%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah dokumen pengeluaran kas	Dokumen	3	120.000	0	-	0	14.616	0	14.616	0%	12%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan laporan keuangan yang terfasilitasi	%	100	1.267.329	0	167.552	0	554.465	0	722.017	0%	57%	
	03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah produk hukum	Produk Hukum	2	280.000	0	34.102	0	199.015	0	233.117	0%	83%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%							
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah laporan semesteran dan prognosis	Buku	2	40.000	0	-	0	-	0	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen	Dokumen	3	100.000	0	12.950	0	12.950	0	25.900	0%	26%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	jumlah sosialisasi dan pendampingan OPD	pendampingan	30	847.329	0	120.500	0	342.500	0	463.000	0%	55%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Bantuan Tidak Terduga	%	100	1.000.000	0	234.900	0	1.110.575	0	1.345.475	0%	135%		
	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Presentase Jumlah bantuan tidak terduga	%	100	1.000.000	0	234.900	0	1.110.575	0	1.345.475	0%	135%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pengelolaan Aset terhadap PAD	%	100	5.244.980	0	1.186	0	93.283	0	94.469	0%	2%	
	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	%	100	5.244.980	0	1.186	0	93.283	0	94.469	0%	2%		
	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen barang milik daerah	Dokumen	5	250.000	0	-	0	53.128	0	53.128	0%	21%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	jumlah aset daerah yang diasuransikan	jenis aset	2	4.944.980	0	1.186	0	40.155	0	41.341	0%	1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jenis dan tipe barang yang sudah terstandart	buku	18	50.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	'04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	%	1,5	980.855	0	-	0	16.226	0	16.226	0%	2%	
	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	1,5	980.855	0	-	0	16.226	0	16.226	0%	2%		
	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	60.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah	Dokumen	1	550.000	0	-	0	1.638	0	1.638	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Dokumen	1	36.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%					
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dokumen	1	150.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah			
	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	1	46.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah			
	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Dokumen	1	10.750	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah			
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	WP	150	81.865	0	-	0	14.588	0	14.588	0%	18%	Badan Pendapatan Daerah			
	11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	11.040	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah			
	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1	34.200	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah			
5	03	KEPEGAWAIAN															
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	IKM Perangkat Daerah	Indeks	75	2.407.707	0	367.814	0	206.254	0	574.068	0%	24%		
		2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase updating data dan informasi kepegawaian sesuai SOP	%	100	1.516.529	12,64	4.910	0	114.201	12,64	119.111	13%	8%		
			04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	jumlah formasi	Formasi	400	1.104.802	0	-	0	1.188	0	1.188	0%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan	PNS	225	53.940	29	410	174	23.100	203	23.510	90%	44%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang di kelola	Dokumen	3036	357.787	0	4.500	1793	89.913	1793	94.413	59%	26%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	%	100	363.828	14,6	24.770	0	75.090	14,6	99.861	15%	27%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%							
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Penempatan PNS	PNS	209	309.888	1	3.770	935	54.090	936	57.861	448%	19%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen	Dokumen	2142	53.940	502	21.000	304	21.000	806	42.000	38%	78%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kapasitas ASN yang meningkat	%	100	457.850	0	2.884	0	16.095	0	18.979	0%	4%		
	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta	Peserta	60	119.600	0	2.884	230	16.095	230	18.979	383%	16%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Peserta	PNS	60	338.250	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terelesaikannya permasalahan kepegawaian	%	100	69.500	0,06	335.250	0	867	0,06	336.117	0%	484%		
	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen	Dokumen	591	69.500	77	335.250	3	867	80	336.117	14%	484%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi	%	100	5.244.390	35	140.870	0	1.190.986	35	1.331.856	35%	25%	
		2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Tercukupinya Usulan Diklat Teknis Aparatur	%	100	1.441.015	35	128.779	0	280.147	35	408.926	35%	28%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%				
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%	10						
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
		03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta	PNS	144	1.441.015	51	128.779	5	280.147	56	408.926	39%	28%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase tercukupinya Usulan Diklat Manajerial dan Fungsional Aparatur	%	90	3.803.375	0	12.091	0	910.839	0	922.930	0%	24%		
		07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta	PNS	380	3.803.375	0	12.091	282	910.839	282	922.930	74%	24%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100	668.481	0	14.114	0	224.064	0	238.178	0%	36%	
		2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	%	100	489.571	0	14.114	0	194.021	0	208.135	0%	43%	
			02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen	Dokumen	1	261.204	0	9.803	0	184.432	0	194.235	0%	74%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen	Dokumen	1	228.367	0	4.311	0	9.589	0	13.901	0%	6%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2,04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersusunnya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	%	100	178.910	0	-	0	30.043	0	30.043	0%	17%	
			01 Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen	Dokumen	1	178.910	0	-	0	30.043	0	30.043	0%	17%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%					
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
6	01			INSPEKTORAT DAERAH													
	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	%	25	1.161.539	0	50.438	0	233.065	0	283.503	0%	24%	
		2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Dokumen	1	829.441	0	50.438	0	157.692	0	208.130	0%	25%	
			01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Dokumen	3	50.080	0	-	1	1.800	1	1.800	33%	4%	Inspektorat
			02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Dokumen	15	578.147	0	-	29	77.271	29	77.271	193%	13%	Inspektorat
			03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen hasil reviu	Dokumen	4	15.794	0	4.158	3	5.457	3	9.615	75%	61%	Inspektorat
			04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil reviu	Dokumen	3	165.190	0	44.570	2	71.234	2	115.804	67%	70%	Inspektorat
			07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monev	Dokumen	4	20.230	0	1.710	1	1.930	1	3.640	25%	18%	Inspektorat
		2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Dokumen	1	332.098	0	-	0	75.373	0	75.373	0%	23%	
			02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Dokumen	1	332.098	0	-	12	75.373	12	75.373	1200%	23%	Inspektorat
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	%	100	1.359.127	0	155.763	0	447.500	0	603.263	0%	44%	
		2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Dokumen	6	6.600	0	423	0	423	0	846	0%	13%	
			01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Dokumen	2	6.600	0	423	2	423	2	846	100%	13%	Inspektorat
		2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Dokumen	6	1.352.527	0	155.340	0	447.077	0	602.417	0%	45%	
			02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen	Dokumen	4	422.463	0	-	2	133.987	2	133.987	50%	32%	Inspektorat
			03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen	Dokumen	2	777.664	0	155.340	1	313.090	1	468.430	50%	60%	Inspektorat
			04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah dokumen	Dokumen	2	152.400	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Inspektorat

7. UNSUR KEWILAYAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%					
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
7	01			KECAMATAN MANGUHARJO													
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	5.839.326	0	795.627	0	2.467.324	0	3.262.951	0%	56%	
		2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	5.777.121	0	794.097	0	2.453.074	0	3.247.170	0%	56%	
				03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manguharjo)	persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan manguharjo sesuai ketentuan	%	100	676.435	13,3	90.106	35	293.589	48,55	383.694	49%	57%	Kecamatan Manguharjo
				03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sogaten)	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Sogaten	%	100	606.059	14,7	89.285	31	239.030	45,39	328.315	45%	54%	Kecamatan Manguharjo
				03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Patihan)	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Patihan	%	100	564.647	14,3	80.442	31	236.272	45,56	316.714	46%	56%	Kecamatan Manguharjo
				03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngegong)	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Ngegong	%	100	537.925	12,9	68.157	30	225.675	43,39	293.832	43%	55%	Kecamatan Manguharjo
				03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Winongo)	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Winongo	%	100	679.919	12,6	85.794	34	300.076	46,84	385.870	47%	57%	Kecamatan Manguharjo
				03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Madiun Lor)	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan madiun lor sesuai ketentuan	%	100	647.663	13,2	85.716	31	259.934	44,41	345.650	44%	53%	Kecamatan Manguharjo
				03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pangongangan)	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Pangongangan	%	100	556.910	13,9	77.239	33	261.183	46,98	338.422	47%	61%	Kecamatan Manguharjo
				03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Nambangan Lor)	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Lor	%	100	792.635	12,8	106.705	32	319.467	44,81	426.173	45%	54%	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10			
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Nambangan Kidul)		Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul	%	100	714.926	15,5	110.653	34	317.847	49,74	428.500	50%	60%	Kecamatan Manguharjo	
	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	62.205	0	1.530	0	14.251	0	15.781	0%	25%		
	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Prosentase hasil koordinasi pemeliharaan Saprass pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	62.205	2,5	1.530	22,91	14.251	25,4	15.781	25%	25%	Kecamatan Manguharjo	
7	02	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Usulan	18	3.468.892	0	202.961	0	1.074.698	0	1.277.659	0%	37%	
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	3.468.892	0	202.961	0	1.074.698	0	1.277.659	0%	37%		
	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Prosentase Usulan Musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang Kota	%	10	318.892	63,7	202.961	0	-	63,65	202.961	637%	64%	Kecamatan Manguharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Manguharjo)		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Manguharjo	Paket	3	250.000	0	-	0	76.400	0	76.400	0%	31%	Kecamatan Manguharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sogaten)		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Sogaten	Paket	3	250.000	0	-	0	90.017	0	90.017	0%	36%	Kecamatan Manguharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patihan)		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Patihan	Paket	3	150.000	0	-	0	46.490	0	46.490	0%	31%	Kecamatan Manguharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngegong)		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Ngegong	Paket	3	150.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Winongo)		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Winongo	Paket	3	250.000	0	-	3	256.280	3	256.280	100%	103%	Kecamatan Manguharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Madiun Lor)		Jumlah sarana dan prasaran yang terpenuhi di kelurahan Madiun Lor	Paket	3	150.000	0	-	3	339.904	3	339.904	100%	227%	Kecamatan Manguharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pangongangan)		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Pangongangan	Paket	3	110.000	-	3	119.798	3	119.798	100%	109%	Kecamatan Manguharjo		
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Nambangan Lor)		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Nambangan Lor	Paket	3	250.000	0	-	0	90.010	0	90.010	0%	36%	Kecamatan Manguharjo	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II								
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%							
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Nambangan Kidul)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi di kelurahan Nambangan Kidul	Paket	3	250.000	0	-	0	55.800	0	55.800	0%	22%	Kecamatan Manguharjo	
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Manguharjo	%	40	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo	
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sogaten)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Sogaten	%	35	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo	
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patihan)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Patihan	%	30	200.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo	
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngegong)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Ngegong	%	30	200.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo	
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Winongo)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Winongo	%	40	100.000			0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo	
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Madiun Lor)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Madiun Lor	%	40	200.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo	
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pangongangan)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Pangongangan	%	35	240.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo	
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nambangan Lor)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Nambangan Lor	%	30	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo	
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nambangan Kidul)	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Nambangan Kidul	%	45	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	263.986	0	4.800	0	131.449	0	136.249	0%	52%	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	129.180	0	-	0	37.539	0	37.539	0%	29%	
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	129.180	0	-	29,06	37.539	29,06	37.539	29%	29%	Kecamatan Manguharjo
2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	134.805	0	4.800	0	93.910	0	98.710	0%	73%	
01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	134.805	3,56	4.800	20,64	93.910	24,2	98.710	24%	73%	Kecamatan Manguharjo
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	%	100	181.926	0	3.400	0	39.778	0	43.178	0%	24%	
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti	%	100	181.926	0	3.400	0	39.778	0	43.178	0%	24%	
01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	%	100	111.926	0	-	29,46	32.978	29,46	32.978	29%	29%	Kecamatan Manguharjo
05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase penanganan Konflik yang terselesaikan	%	100	55.000	6,18	3.400	12,36	6.800	18,54	10.200	19%	19%	Kecamatan Manguharjo
07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah buku profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan kelurahan	Dokumen	2	15.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7 01	KECAMATAN KARTOHARJO													

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II						
1				2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	5.552.902	0	649.119	0	1.309.933	0	1.959.051	0%	35%	
		2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Tereleaksikannya Rekomendasi di Kelurahan Sesuai Ketentuan	%	100	5.490.697	0	645.819	0	1.309.933	0	1.955.751	0%	36%	
			03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase tereleaksikannya permohonan rekomendasi	%	100	-	0	0	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	Kecamatan Kartoharjo
			03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Oro - Oro Ombo)	Prosentase tereleaksikannya permohonan rekomendasi	%	100	622.625	0	80.726	0	163.167	0	243.893	0%	39%	Kecamatan Kartoharjo
			03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukosari)	Prosentase tereleaksikannya permohonan rekomendasi	%	100	515.221	0	66.780	0	129.368	0	196.148	0%	38%	Kecamatan Kartoharjo
			03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Klegen)	Prosentase tereleaksikannya permohonan rekomendasi	%	100	688.895	0	69.868	0	187.607	0	257.474	0%	37%	Kecamatan Kartoharjo
			03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejomulyo)	Prosentase tereleaksikannya permohonan rekomendasi	%	100	675.825	0	77.579	0	129.882	0	207.462	0%	31%	Kecamatan Kartoharjo
			03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pilangbango)	Prosentase tereleaksikannya permohonan rekomendasi	%	100	572.565	0	84.320	0	96.049	0	180.369	0%	32%	Kecamatan Kartoharjo
			03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangrejo)	Prosentase tereleaksikannya permohonan rekomendasi	%	100	566.797	0	67.031	0	164.195	0	231.226	0%	41%	Kecamatan Kartoharjo
			03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanigoro)	Prosentase tereleaksikannya permohonan rekomendasi	%	100	692.849	0	75.023	32	174.230	32	249.253	32%	36%	Kecamatan Kartoharjo
			03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kartoharjo)	Prosentase tereleaksikannya permohonan rekomendasi	%	100	584.775	0	69.686	33	138.876	33	208.562	33%	36%	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10			
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kelun)		Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	571.147	0	54.806	31	126.559	31	181.365	31%	32%	Kecamatan Kartoharjo	
	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Hasil Koordinasi Pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	62.205	0	3.300	0	-	0	3.300	0%	5%		
	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		jumlah koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum	Pertemuan	3	62.205	0	3.300			0	3.300	0%	5%	Kecamatan Kartoharjo	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	18	3.432.558	0	254.807	0	1.359.712	0	1.614.519	0%	47%	
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	3.432.558	0	254.807	0	1.359.712	0	1.614.519	0%	47%		
	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	%	100	282.558	0	204.817	0	-	0	204.817	0%	72%	Kecamatan Kartoharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	-	0	0	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	Kecamatan Kartoharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Oro - Oro Ombo)		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	219.200	0	-	70	200.000	70	200.000	70%	91%	Kecamatan Kartoharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukosari)		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	219.200	0	-	85	181.083	85	181.083	85%	83%	Kecamatan Kartoharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Klegen)		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	219.200	0	-	45	111.807	45	111.807	45%	51%	Kecamatan Kartoharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	217.200	0	-	80	170.502	80	170.502	80%	79%	Kecamatan Kartoharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pilangbango)		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	219.120	0	49.990	50	82.775	50	132.764	50%	61%	Kecamatan Kartoharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tawangrejo)		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	147.200	0	-	77	149.913	77	149.913	77%	102%	Kecamatan Kartoharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kanigoro)		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	217.200	0	-	87	244.500	87	244.500	87%	113%	Kecamatan Kartoharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kartoharjo)		Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	100	219.200	0	-	54	139.933	54	139.933	54%	64%	Kecamatan Kartoharjo	
	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kelun)		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	%	100	219.200	0	-	33	79.200	33	79.200	33%	36%	Kecamatan Kartoharjo	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II									
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%								
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10			
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	100	-	0	0	-	0	-	0	0%	#DIV/0!	Kecamatan Kartoharjo			
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Oro - Oro Ombo)	%	100	130.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo			
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukosari)	%	100	130.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo			
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Klegen)	%	100	130.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo			
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	%	100	132.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo			
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pilangbango)	%	100	130.880	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo			
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangrejo)	%	100	202.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo			
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kanigoro)	%	100	132.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo			
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kartoharjo)	%	100	130.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo			
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kelun)	%	100	130.800	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo			
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase hasil pengkoordinasian di kecamatan	%	100	188.126	0	3.440	0	-	0	3.440	0%	2%	
		2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	79.405	0	3.440	0	-	0	3.440	0%	4%	
			02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi / pertemuan	Pertemuan	6	79.405	0	3.440	-	0	3.440	0%	4%	Kecamatan Kartoharjo	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%				
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	108.720	0	-		0		0			
	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pertemuan	Jumlah koordinasi / pertemuan		9	108.720	0	-	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo	
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	172.079	0	12.272		-	0	12.272	0%	7%	
	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti	%	100	172.079	0	12.272		-	0	12.272	0%	7%	
	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	Jumlah sosialisasi		1	60.767	0	-	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo	
	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	jumlah koordinasi		6	71.481	0	12.272		-	0	12.272	0%	17%	Kecamatan Kartoharjo
	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan		3	39.831	0	-		-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	01	KECAMATAN TAMAN														
7	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	5.139.643	0	641.136	0	1.427.885	0	2.069.021	0%	40%	
	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	%	100	5.081.865	0	636.273	36	1.417.164	36	2.053.438	36%	40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II						
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%					
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mojorejo)	%	100	624.653	0	85.443	0	151.514	0	236.957	0%	38%	Kecamatan Taman
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean)	%	100	599.676	0	81.152	0	160.962	0	242.114	0%	40%	Kecamatan Taman
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Banjarejo)	%	100	537.878	0	72.208	24	153.141	24	225.350	24%	42%	Kecamatan Taman
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kuncen)	%	100	407.575	0	31.782	29	117.113	29	148.896	29%	37%	Kecamatan Taman
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manisrejo)	%	100	666.742	0	113.786	14	172.455	14	286.241	14%	43%	Kecamatan Taman
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kejuron)	%	100	585.723	0	41.490	29	156.758	29	198.249	29%	34%	Kecamatan Taman
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Josenan)	%	100	519.291	0	56.674	10	147.798	10	204.472	10%	39%	Kecamatan Taman
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Demangan)	%	100	523.675	0	77.265	30	201.522	30	278.787	30%	53%	Kecamatan Taman
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Taman)	%	100	616.651	0	76.471	0	155.901	0	232.372	0%	38%	Kecamatan Taman
2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	57.778	0	4.863	17	10.720	17	15.583	17%	27%	
	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	%	100	57.778	0	4.863	11	10.720	11	15.583	11%	27%	Kecamatan Taman

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10		
1				2	3	4	K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K (%)		RP. (%)		
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Usulan	18	3.365.639	0	355.003	0	498.671	0	853.675	0%	25%			
			2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	3.365.639	0	355.003	20	498.671	20	853.675	20%	25%			
				01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan murenbang Taman yang diprioritaskan daam musenbang kota	%	10	215.639	0	167.986	0	19.895	0	187.881	0%	87%		Kecamatan Taman	
				02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mojorejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		Kecamatan Taman	
				02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pandean)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	100.000	0	-	0	27.048	0	27.048	0%	27%		Kecamatan Taman	
				02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banjarejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		Kecamatan Taman	
				02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kuncen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		Kecamatan Taman	
				02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Manisrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		Kecamatan Taman	
				02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kejuron)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	100.000	0	40.000	2	163.498	2	203.498	67%	203%		Kecamatan Taman	
				02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Josenan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	100.000	0	-	1	94.108	1	94.108	33%	94%		Kecamatan Taman	
				02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Demangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	100.000	0	-	1	150.623	1	150.623	33%	151%		Kecamatan Taman	
				02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Taman)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		Kecamatan Taman	
				03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mojorejo)	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	250.000	0	32.770	10	7.230	10	40.000	10%	16%		Kecamatan Taman	
				03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean)	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	250.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		Kecamatan Taman	
				03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banjarejo)	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	250.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		Kecamatan Taman	
				03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kuncen)	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	250.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		Kecamatan Taman	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II						
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%					
1	2	3	4	5		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	10
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Manisrejo)	%	100	250.000	0	42.505	27	35.669	27	78.174	27%	31%	Kecamatan Taman
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kejuron)	%	100	250.000	0	39.589	10	600	10	40.189	10%	16%	Kecamatan Taman
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Josenan)	%	100	250.000	0	32.152	0	-	0	32.152	0%	13%	Kecamatan Taman
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Demangan)	%	100	250.000	0	0	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Taman)	%	100	250.000	0	0	0	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	01	04				0	-	0	85.824	0	85.824	#DIV/0!	#DIV/0!	
		2.02				0	-	0	38.441	0	38.441	#DIV/0!	#DIV/0!	
		01				0	-	0	38.441	0	38.441	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Taman
		2.03				0	-	0	47.383	0	47.383	#DIV/0!	#DIV/0!	
		02				0	-	0	47.383	0	47.383	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Taman
7	01	05				0	5.552		14.556	0	20.108	0%	19%	
		2.01				0	5.552		14.556	0	20.108	0%	19%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II						
						6	7	8=6+7	9=8/5 x 100%					
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	Kali	1	40.313	0	-	0	6.892	0	6.892	0%	17%	Kecamatan Taman
05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik yang terselesaikan	%	100	40.313	0	4.535	0	-	0	4.535	0%	11%	Kecamatan Taman
07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah buku profil kelurahan dan Monografi Kecamatan dn Kelurahan	Dokumen	2	25.813	0	1.017	0	7.664	0	8.681	0%	34%	Kecamatan Taman

8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%					
						6	7	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
8	01			KESATUAN BANGSA DAN NEGARA													
8	01	02		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	%	100	389.299	0	-	0	24.385	0	24.385	0%	6%	
		2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	Orang	1100	389.299	0	-	0	24.385	100	24.385	9%	6%	
			04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	Orang	1100	389.299	0	-	0	24.385	100	24.385	9%	6%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	%	100	871.058	0	-	0	700.062	0	700.062	0%	80%	
		2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	%	80	871.058	0	-	0	700.062	0	700.062	0%	80%	
			03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta pengelolaan keuangan Parpol	Orang	22	725.062	0	-	22	700.062	22	700.062	100%	97%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						I		II		8=6+7		9=8/5 x 100%							
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)			
1	2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10					
	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta pembinaan	Orang	100	145.996	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
8	01	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Orkemas berbadan hukum	%	45	272.985	0	13.370	0	90.486	0	103.856	0%	38%	
			2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orkemas yg aktif	Ormas	100	272.985	0	13.370	0	90.486	0	103.856	0%	38%	
				03		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta fasilitasi	Orang	100	272.985	0	13.370	30	90.486	30	103.856	30%	38%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan	%	100	484.692	0	29.190	0	69.808	0	98.998	0%	20%	
			2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orkemas yg aktif	Ormas	100	484.692	0	29.190	0	69.808	0	98.998	0%	20%	
				03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	95.000	0	1.100	0	0	0	1.100	0%	1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Orang	200	389.692	0	28.090	38	69.808	38	97.898	19%	25%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II						
1					2	3	4	5		6		7		8=6+7		9=8/5 x 100%		10
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Konflik horisontal di dalam masyarakat	Konflik	0	1.453.198	0	54.113	0	148.357	0	202.469	100%	14%	
			2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah koordinasi	Kegiatan	3	1.453.198	0	54.113	0	148.357	0	202.469	0%	14%	
				04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah konflik	Konflik	0	1.453.198	0	54.113	0	148.357	0	202.469	100%	14%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3 Gambaran Umum Kondisi Daerah

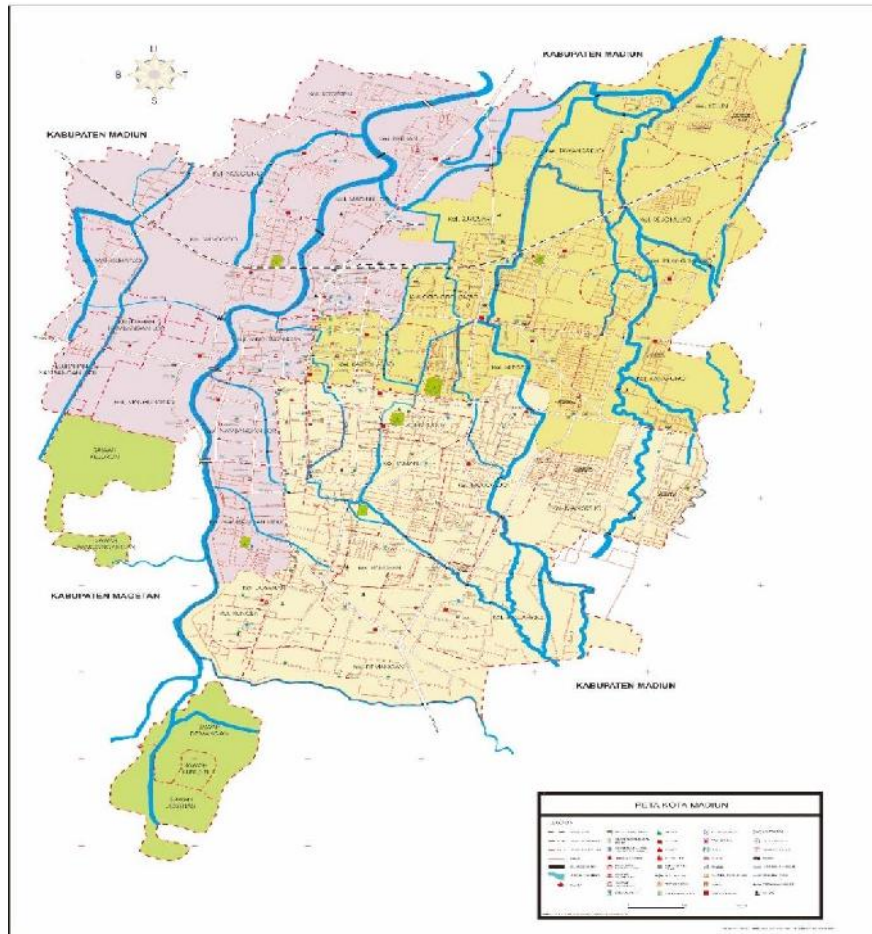
Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang utama meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum, lebih lanjut analisis dari masing-masing aspek dimaksud sebagaimana uraian berikut.

2.3.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kota Madiun terletak pada koordinat 111⁰- 112⁰ Bujur Timur dan 7⁰ – 8⁰ Lintang Selatan, berada pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 63 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut atau daratan kecamatan Manguharjo berada pada 63 meter di atas permukaan air laut, Kecamatan Taman 67 meter di atas permukaan air laut dan Kecamatan Kartoharjo 67 di atas permukaan air laut.

Rentang temperatur udara antara 20⁰C hingga 35⁰C. Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun. Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:

1. perbatasan sebelah utara: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun,
2. perbatasan sebelah selatan: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,
3. perbatasan sebelah timur: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun,
4. perbatasan sebelah barat: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Gambar 2.1

Peta Administratif Kota Madiun

Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km².

Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 Kelurahan.

Dari aspek demografi, Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2020 sebanyak 209.950 jiwa. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,03%. Namun, pada tahun 2015 dan 2017 pertumbuhan penduduk di Kota Madiun mengalami penurunan masing-masing sebesar -(1,30)%, dan -(0,11)%. Pada tahun 2018, pertumbuhan penduduk Kota Madiun menurun sebesar -(0,01)%. Pada Tahun 2019 pertumbuhan penduduk Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar 0,15%, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan -(0,08)%.

Dilihat dari kepadatan penduduknya, di Kota Madiun pada tahun 2020 kepadatan penduduknya sebesar 6.318 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Taman 7.175 jiwa/Km², disusul Kecamatan Manguharjo 6.263 jiwa/Km² dan Kecamatan Kartoharjo 5.374 jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km ²)
1.	Taman	12,46	89.398	42,58	7.175
2.	Kartoharjo	10,73	57.668	27,47	5.374
3.	Manguharjo	10,04	62.884	29,95	6.263
Kota Madiun		33,23	209.950	100,00	6.318

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

2.3.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun sampai dengan Tahun 2020, akibat dampak Pandemi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Pertumbuhan ekonomi regional dan nasional Tahun 2018-2020

Tahun	Nasional	Regional	Kota Madiun
2018	5,17	5,50	5,96
2019	5,02	5,52	5,69
2020	-2,07	-2,39	-3,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Tabel 2.5

Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	-1,78	1,78	-0,94	11,57	0,46
Pertambangan dan Penggalian	1,91	2,31	1,07	2,41	-5,65	2,47
Industri Pengolahan	7,21	8,00	7,01	4,64	-12,84	7,31
Pengadaan Listrik dan Gas	3,86	4,91	5,45	6,69	1,98	5,73
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,82	6,84	4,44	4,52	4,86	4,48
Konstruksi	4,44	5,57	2,03	4,90	-4,71	5,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,11	5,83	7,54	6,20	-11,18	5,83
Transportasi dan Pergudangan	7,13	8,18	8,48	9,11	-4,38	7,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	7,30	7,47	9,23	8,86	-7,98	7,46
Informasi dan Komunikasi	6,64	6,77	5,34	4,58	16,12	7,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,11	3,88	4,08	4,79	-0,66	7,53
Real Estate	5,64	4,22	3,57	5,96	0,33	5,98
Jasa Perusahaan	5,94	6,34	5,31	6,10	-3,18	7,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,05	2,46	4,48	3,85	-2,23	2,60
Jasa Pendidikan	5,14	4,50	4,21	7,65	1,97	5,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,85	5,93	7,38	7,52	9,98	6,91
Jasa Lainnya	4,17	4,14	5,74	6,92	-10,68	4,21
PDRB	5,90	5,93	5,96	5,69	-3,39	6,42

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Berdasarkan Tabel 2.5, PDRB Kota Madiun menurut harga berlaku, pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha selama periode 2015-2020, dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor yang ada menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pada semua sektor mengalami penurunan kecuali pada sektor pertanian, Informasi dan jasa kesehatan. Kondisi ini disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Dari keseluruhan sektor tersebut, tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,75% per tahun, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,53% per tahun, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 7,46% per tahun. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya tumbuh sebesar 0,46% per tahun. Data pertumbuhan sektoral tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun dalam pergerakan ekonominya lebih ditopang sektor tersier yang mana perkembangan sektor perekonomiannya mulai fokus pada sektor perdagangan dan jasa-jasa.

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa atau turunnya daya jual mata uang suatu negara secara terus menerus. Menurut Bank Indonesia (2016), penyebab timbulnya inflasi dikarenakan adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Terjadinya *demand pull inflation* disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, atau dengan kata lain permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian, sedangkan faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, yang mana ekspektasi inflasi dapat cenderung bersifat adaptif.

Kota Madiun pada Juni 2021 terjadi deflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,15. Dari delapan kabupaten/kota penghitung inflasi nasional di Jawa Timur, 7 (tujuh) kabupaten/kota mengalami deflasi dan 1 (satu) kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,58 persen dengan IHK 106,03, sedangkan deflasi terendah sebesar 0,10 persen terjadi di Kabupaten Jember dan Kota Kediri dengan IHK masing-masing sebesar 106,46 dan 106,13.

Deflasi di Kota Madiun terjadi karena adanya penurunan Indeks Harga Konsumen pada Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 1,33 persen, Kelompok Transportasi sebesar 1,17 persen, Kelompok Makanan dan Minuman dan Tembakau sebesar 0,75 persen. Terdapat beberapa kelompok yang menekan deflasi diantaranya: Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,76 persen, Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,55 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar lainnya sebesar 0,47 persen, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,43 persen dan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 0,04 persen. Sedangkan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki, Kelompok Kesehatan dan Kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan indeks. Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2021 dan inflasi tahun ke tahun (Juni 2021 terhadap Juni 2020) masing-masing sebesar 0,77 persen dan 1,68 persen.

a. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia

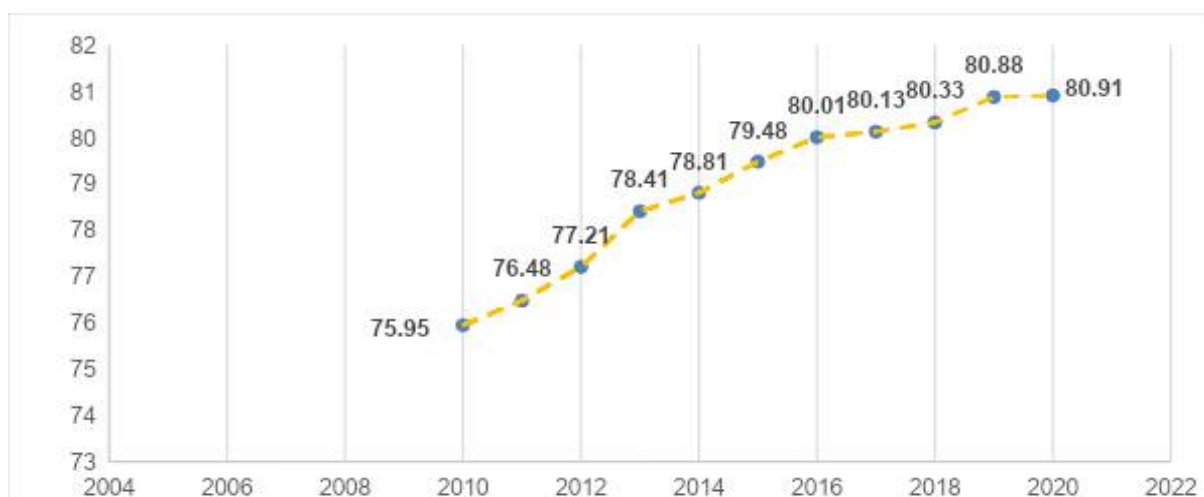
Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Berdasarkan perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusaiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan manusia di suatu daerah dapat dianalisis dan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM dapat dihitung dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi.

Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan di daerah. Selain itu, IPM juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun

kualitas hidup manusia. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi keefektifan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Menurut UNDP, IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (1) IPM ≥ 80 termasuk kategori sangat tinggi; (2) $70 < \text{IPM} < 80$ termasuk kategori tinggi; (3) $60 < \text{IPM} < 70$ termasuk kategori sedang; dan (4) $\text{IPM} < 60$ termasuk kategori rendah. Selama periode 2010-2020, perkembangan IPM Kota Madiun menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan selama periode tersebut cukup signifikan sehingga angka IPM Kota Madiun dari yang sebelumnya termasuk dalam kategori tinggi menjadi kategori sangat tinggi. IPM Kota Madiun pada tahun 2010 sebesar 75,95 hingga tahun 2020 meningkat menjadi 80,91, yang ditunjukkan pada gambar berikut :



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.2

Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2010-2020

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa komponen penyusun IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity*. Usia harapan hidup di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 72,81 tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,40 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 11,14 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 16,01 juta. IPM Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 80,91 dan lebih tinggi jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Timur yang nilainya sebesar 71,71. Angka IPM Provinsi Jawa Timur berasal dari komponen usia harapan hidup sebesar 71,3 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,10 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,39 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 11,38 juta (lihat Tabel 2.6).

Tabel 2.6

Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No.	Komponen IPM	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
1.	Umur harapan hidup (tahun)	72,81	71,3
2.	Harapan lama sekolah (tahun)	14,40	13,10
3.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,14	7,39
4.	Pengeluaran per kapita (Rp juta)	16,01	11,38
5.	IPM	80,91	71,71

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

2.3.4 Fokus Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dapat dianalisa dari beberapa hal, diantaranya :

1. Kemampuan Ekonomi Daerah
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
3. Iklim Berinvestasi
4. Sumber Daya Manusia

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dianalisis menggunakan beberapa indikator yakni pengeluaran konsumsi rumah perkapita, pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa indikator tersebut:

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk selain pendapatan. Biasanya tingkat pendapatan yang naik, juga meningkatkan pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi itu sendiri dapat dilihat dari tingkat konsumsi serta pola konsumsi. Tingkat konsumsi adalah pengeluaran konsumsi yang berubah-ubah setiap tahunnya, sedang pola konsumsi adalah perbedaan pola konsumsi antara komoditas makanan dan non makanan. Rumah tangga yang mengalami kenaikan pada tingkat konsumsi pada beberapa waktu, pola pengeluarannya biasanya juga akan berubah dari pola konsumsi makanan ke non makanan. Hal ini karena kepuasan mengonsumsi makanan sudah tercapai maksimum.

Tabel 2.7

Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kota Madiun, Tahun 2014-2020

Tahun	Rata-rata konsumsi rumah tangga (juta)	Pertumbuhan (%)
2014	32,00	6,05
2015	33,63	5,10
2016	35,70	6,16
2017	37,70	5,83
2018	37,70	0
2019	33,59	-10,90
2020	36,54	8,78

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Setiap penduduk Kota Madiun diperkirakan menggunakan dana sekitar 32 juta rupiah (2014) setahun untuk membiayai konsumsi baik berupa makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dsb). Penggunaan konsumsi rumah tangga ini terus meningkat menjadi; 33,63 juta rupiah (2015); 35,70 juta rupiah (2016); dan 37,70 juta rupiah (2017 dan 2018), 33,59 juta rupiah (2019), dan 36,54 juta (2020). Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas).

b. Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan

Tingkat konsumsi menunjukkan kenaikan konsumsi dari waktu ke waktu. Pola konsumsi antara komoditas makanan dan non makanan menunjukkan komposisi pola konsumsi non makanan mengalami tren kenaikan, komposisi konsumsi makanan menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun 2014 ke 2018. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama dari tahun ke tahun, yaitu 24,52 persen (2014); 24,36 persen (2015); 24,14 persen (2016); 23,95 persen (2017); 23,95 persen (2018); 41,90 persen (2019); 41,75 persen (2020). Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Pengeluaran konsumsi komoditas non makanan yang menunjukkan persentase tertinggi dari total pengeluaran adalah transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya lalu diikuti oleh hotel dan restoran. Tingginya perbedaan persentase antara konsumsi komoditas makanan dan non makanan menunjukkan bahwa secara umum masyarakat sudah memenuhi dan merasa puas dengan konsumsi komoditas makanan sehingga saat ini mereka cenderung meningkatkan konsumsi komoditas non makanan.

Tabel 2.8

Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan di Kota Madiun
Tahun 2014-2020

Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Makanan	24,52	24,36	24,14	23,95	23,95	41,90	41,75
Pakaian dan Alas Kaki	2,71	2,67	2,72	2,74	2,74	3,18	3,05
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	11,16	11,15	11,19	11,26	11,26	26,03	24,70
Kesehatan dan Pendidikan	6,73	6,92	6,98	7,12	7,12	15,99	15,67
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	28,55	28,41	28,36	28,32	28,32	6,13	6,35
Hotel dan Restoran	21,4	21,47	21,57	21,61	21,61	4,16	5,05
Lainnya	4,93	5,01	5,04	5,00	5,00	2,60	3,42
Total	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

1. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik akan memiliki kemudahan akses dan konektivitas. Kemudahan akses dan konektivitas akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan fasilitas infrastruktur seperti jalan merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah. Ketersediaan jalan mempermudah konektivitas antarwilayah sehingga dapat memberikan dampak pada kondisi ekonomi maupun sosial. Rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan digunakan untuk mengukur beban suatu infrastruktur jalan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin besar beban suatu jalan. Berdasarkan data UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, jumlah kendaraan bermotor di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 125.598 unit yang terdiri dari 123.053 unit kendaraan pribadi, 1.662 kendaraan dinas, dan 883 kendaraan umum.

Untuk mengantisipasi risiko terkecil dalam rangka menciptakan keselamatan pengguna jasa transportasi darat, peran ratio panjang jalan per jumlah kendaran menjadi salah satu ukuran yang sangat obyektif untuk digunakan sebagai indikator keamanan di jalan. Dengan asumsi bahwa semakin pendek ratio panjang jalan per jumlah kendaraan, akan semakin berisiko atau tingkat kenyamanan dan keselamatan di jalan akan semakin berkurang.

Bila dilihat dari rasio panjang jalan per 1.000 kendaraan, pada **tahun 2020 tercatat 3,58 km untuk setiap 1.000** kendaraan bermotor di Kota Madiun. Dengan pertambahan jumlah kendaran dan panjang jalan yang relatif tidak bertambah signifikan atau bahkan tetap, hal tersebut akan mengakibatkan makin padatnya arus lalu lintas di Kota Madiun.

b. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan indikator penting karena ketaatan RTRW berarti kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rancangan keseimbangan pembangunan dan pengembangan wilayah suatu daerah. Keseimbangan dan ketaatan ini penting agar pembangunan tidak mengalami tumpang tindih di masa depan. Selama kurun waktu 2013-2020 ketaatan RTRW menunjukkan angka 100%. Ini berarti pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan keterpaduan dan keserasian antara kondisi lapangan dengan kondisi yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pembangunan di masa depan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tabel 2.9

Ketaatan Terhadap RTRW, Tahun 2013-2020

1

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

c. Luas Wilayah Produktif (Ha)

Luas wilayah yang dimiliki Kota Madiun seluas 3.323 Ha. Luas wilayah produktif sendiri selama 2013-2020 menunjukkan nilai yang semakin menurun yaitu dari seluas 1.067 Ha pada tahun 2013 menjadi seluas 1.010 Ha pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Luas areal produktif yang meliputi luas baku sawah irigasi teknis tanaman pangan (padi palawija) dan perkebunan (tebu) mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dari 1.041 hektar menjadi 1.010 hektar atau turun sebanyak 30 hektar.

Tabel 2.10

Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kota Madiun, Tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Produktif (Ha)	1.067	1.067	1.041	1.038	1.031	1.015	1010	1010

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

d. Luas Wilayah Industri (Ha)

Luas wilayah industri di Kota Madiun sampai dengan 2020 seluas 83,22 Ha. Luasan ini mengalami perkembangan 17,89 Ha dibandingkan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan jumlah industri besar, sedang dan kecil di Kota Madiun.

Tabel 2.11

Luas Wilayah Industri (Ha) di Kota Madiun Tahun 2013-2020

2

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Industri (Ha)	65,33	65,33	65,33	65,33	75	83,22	83,22	83,22

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, 2021

3

e. Luas Wilayah Perkotaan (Ha)

Kota Madiun merupakan daerah dengan 100% wilayahnya berupa wilayah perkotaan. Luas wilayah yang tetap selama tahun 2014-2020 menunjukkan bahwa tidak terdapat penyempitan wilayah daerah administratif maupun perluasan wilayah daerah administratif.

Tabel 2.12

Luas Wilayah Perkotaan (Ha) di Kota Madiun Tahun 2014-2020

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

f. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Ketersediaan akomodasi berupa penginapan atau hotel penting untuk mendukung iklim bisnis, keberlangsungan usaha dan pariwisata. Adanya hotel dan beragamnya pilihan akan menjadi investor atau wisatawan yang datang nyaman untuk tinggal di Kota Madiun. Secara umum, jumlah hotel dan penginapan di Kota Madiun pada tahun 2013-2020 terus bertambah dari sebanyak 30 hotel/ penginapan pada tahun 2013 menjadi sebanyak 35 hotel/ penginapan pada tahun 2020. Pertambahan tersebut berasal dari pembangunan sejumlah hotel berbintang seperti Hotel Amaris (bintang 2), The Sun Hotel (bintang 3), Hotel Aston (bintang 4), dan Fave Hotel (bintang 3) pada kurun waktu sekitar 2014-2017 (Tabel 2.146). Kenaikan jumlah hotel tersebut menunjukkan bahwa permintaan untuk kebutuhan hotel, khususnya hotel berbintang di Kota Madiun meningkat. Pada saat ini, jenis akomodasi di Kota Madiun sangat bervariasi baik hotel berbintang maupun hotel non bintang/ kelas melati atau jenis akomodasi lainnya yang tersebar di tiga kecamatan. Badan Pusat Statistik Kota Madiun (2021) mencatat pada tahun 2020 terdapat 18 hotel/penginapan di Kecamatan Manguharjo, 9 hotel/penginapan di Kecamatan Taman, dan 8 hotel/penginapan di Kecamatan Kartoharjo.

Tabel 2.13

Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Madiun, Tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel Bintang 4	-	-	-	-	1	1	1	1
Hotel Bintang 3	1	2	2	2	3	3	3	3
Hotel Bintang 2	1	1	2	2	2	2	2	2
Hotel Bintang 1	-	-	1	1	1	1	1	1
Hotel Non Bintang	28	28	28	28	31	31	30	28
Jumlah	30	31	33	33	38	38	37	35

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

g. Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan utama untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, disebutkan bahwa definisi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dengan kata lain air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

Persentase rumah tangga di Kota Madiun dalam kurun waktu 2016-2019 terus menunjukkan peningkatan dari sebesar 98,37% pada tahun 2016 menjadi sebesar 100% pada tahun 2019 dan 2020.

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah sebanyak 41.836 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Madiun telah menggunakan air bersih dan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih.

Dengan tren semakin banyak RT yang berlanggan air bersih, taraf hidup masyarakat Kota Madiun mengalami perbaikan. Sementara itu, persentase penduduk berakses air bersih didasarkan pada jumlah masyarakat yang terlayani melalui jaringan PDAM. Pada tahun 2020 masyarakat yang terlayani sebesar 100%. Persentase tersebut terus meningkat selama periode 2016-2020.

Tabel 2.14

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun Tahun 2015-2020

Tahun	Persentase RT Pengguna Air Bersih (%)
2016	98,37
2017	99,71
2018	99,71
2019	100
2020	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2021

Tabel 2.15

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan di Kota Madiun Tahun 2015-2020

Tahun	Persentase RT Pengguna Air Bersih Perpipaan (%)
2015	90,21
2016	90,16
2017	92,04
2018	92,06
2019	93,3
2020	96,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

h. Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan yang vital bagi Kota Madiun. Peningkatan daya listrik terpasang dianggap sebagai pemenuhan atas kenaikan permintaan listrik masyarakat. Kenaikan permintaan listrik menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan listrik untuk aktivitas konsumsi dan produksi. Oleh sebab itu, ketersediaan listrik dianggap mampu mendorong kegiatan industri dan aktivitas produksi sehari-hari.

Pada periode 2012-2020 daya listrik terpasang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, terdapat 119.413.605 KW listrik terpasang. Pada tahun 2020, nilai tersebut telah meningkat sebesar 194.076.915 KW. Kenaikan daya listrik terpasang juga diikuti dengan kenaikan listrik terjual dari sebesar 197.331.727 kWh (2012) menjadi sebesar 291.095.826 kWh (2020). Kenaikan listrik terjual ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi masyarakat terhadap listrik.

Tabel 2.16

Ketersediaan Daya Listrik di Kota Madiun, Tahun 2012-2020

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Daya listrik terpasang (KW)	119.413.605	126.006.915	135.170.715	141.404.915	149.783.215	160.539.819	170.732.715	180.913.315	194.076.915
Listrik Terjual (kWh)	197.331.727	198.271.884	229.591.486	241.311.601	258.141.399	259.490.128	271.070.328	284.349.796	291.095.826

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2. Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif akan menarik investor untuk menanamkan modal. Modal investor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya modal yang masuk ekonomi tumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Kondisi iklim investasi suatu daerah dapat dilihat pada beberapa indikator seperti angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung dunia usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka Kriminalitas Tertangani

Iklim investasi di suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh keamanan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan suatu daerah salah satunya dengan angka kriminalitas. Angka ini menunjukkan jumlah tindak kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah pada satu tahun per 10.000

penduduk. Semakin rendah angka kriminalitas semakin aman dan terjamin suatu daerah sehingga investor lebih percaya dalam menanamkan modalnya. Sebaliknya, jika angka kriminalitas tinggi menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.17

Angka Kriminalitas di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas	14,93	10,10	4,06	0,016	0,018

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Madiun, 2021

Dalam kurun waktu 2016-2020, Angka kriminalitas di Kota Madiun terus menunjukkan penurunan dari sebesar 14,93 menjadi hanya sebesar 0,018 tahun 2020. Dengan tren semakin rendahnya angka kriminalitas setiap tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi kota semakin nyaman dan aman untuk berinvestasi.

b. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi yang terjadi pada suatu wilayah terkadang mengganggu aktivitas perekonomian sehingga demonstrasi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan oleh investor untuk mempertimbangkan keputusan berinvestasi. Selain itu, demonstrasi seperti pemogokan kerja tentu akan mengganggu aktivitas produksi suatu perusahaan. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2020, jumlah demonstrasi di Kota Madiun berkurang secara signifikan dari sebanyak 26 demonstrasi menjadi sebanyak 5 demonstrasi tahun 2018, dan tahun 2019 dan 2020 tidak ada demonstrasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat mendorong perbaikan iklim dan kondusivitas investasi.

Demonstrasi yang dilakukan umumnya karena kasus politik dan ekonomi. Demonstrasi pemogokan kerja tidak terjadi di Kota Madiun, hal ini menandakan bahwa resiko tersendatnya aktivitas produksi akibat demonstrasi pemogokan kerja sangat minim di Kota Madiun.

Tabel 2.18

Jumlah Demonstrasi di Kota Madiun, Tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	26	33	13	8	1	5	-	-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Madiun Kota Madiun, 2021

c. Lama Proses Perizinan

Lamanya proses perizinan merupakan salah satu pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Semakin lama mengurus proses perizinan, maka investor cenderung semakin enggan untuk berinvestasi. Selain waktu pengurusan izin, jumlah persyaratan (dokumen) dan biaya pengurusan juga menjadi indikator pertimbangan.

Perizinan yang sering digunakan oleh investor dan pelaku bisnis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tidak membebankan biaya pengurusan atau gratis. Pada SIUP lama mengurus hanya membutuhkan waktu tiga hari dengan persyaratan dokumen yang variatif dari 3-6 dokumen saja. Pada TDG lama mengurus proses perizinan hanya membutuhkan waktu 5 hari dengan kebutuhan dokumen sebanyak 6 dokumen. Pada TDP, perizinan hanya membutuhkan proses selama tiga hari dengan kebutuhan dokumen sebanyak 4-6 dokumen. Kebijakan serupa juga diterapkan pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang tidak membebankan biaya pengurusan dan hanya membutuhkan waktu pengurusan selama tiga hari saja dengan jumlah persyaratan dokumen sebanyak 6 dokumen.

Pada izin sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Madiun, izin lama mengurus membutuhkan waktu tiga hari dengan jumlah persyaratan dokumen sebanyak 4, namun tidak terdapat transparansi biaya pengurusan. Kasus yang sama terjadi pada izin reklame karena tidak adanya transparansi biaya pengurusan. Untuk lama mengurus membutuhkan 3-7 hari dengan persyaratan dokumen sebanyak 3-5 dokumen. Pada izin sarana dan tenaga kesehatan, waktu yang diperlukan untuk mengurus proses perizinan sebanyak 5 hari dengan jumlah persyaratan dokumen sebanyak 17 dokumen. Sedangkan untuk Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang membutuhkan proses perizinan paling lama yaitu tiga puluh hari atau sebulan.

Tabel 2.19

Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2020

Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
SEKSI PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN			
Izin Mendirikan Bangunan	30 (Tiga Puluh)	8 (Delapan)	
- Fungsi Hunian			7.000/ mr2
- Fungsi Usaha			50.000/mr2
- Fungsi Sosbud			15.000/mr2

Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
- Fungsi Keagamaan			0
- Fungsi Campuran			70.000/m2
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
Pemakaian Bahu Badan Jalan	3 (Tiga)	3 (Tiga)	1.000/mr2/hr
Pemakaian Kekayaan Daerah	3 (Tiga)	3 (Tiga)	1.000/mr2/hr
Pemakaian Sumber Umis			
- Untuk Kegiatan Insidentil	3 (Tiga)	3 (Tiga)	1.200.000/hr
- Untuk Parkir Kendaraan	3 (Tiga)	3 (Tiga)	600.000/hr
SEKSI PELAYANAN PEREKONOMIAN			
Izin Usaha Industri (IUI)			
- Melalui Persetujuan Prinsip	5 (Lima)	8 (Delapan)	Tidak Ada
- Tanpa Persetujuan Prinsip	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Izin Perluasan	5 (Lima)	2 (Dua)	Tidak Ada
- Tanda Daftar Industri (TDI)	5 (Lima)	2 (Dua)	Tidak Ada
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Permohonan Baru (PT, Koperasi, CV, Firma dan Perorangan)	3 (Tiga)	3 (Tiga)	Tidak Ada
- Permohonan Pendaftaran Ulang	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
- Permohonan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan	3 (Tiga)	5 (Lima)	Tidak Ada
- Permohonan Perubahan	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
- Permohonan Penggantian	3 (Tiga)	3 (Tiga)	Tidak Ada
a. Hilang			
b. Rusak			
Tanda Daftar Gudang (TDG)			
- Gudang Tertutup Golongan A	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Gudang Tertutup Golongan B	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Gudang Tertutup Golongan C	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Gudang Tertutup Golongan D	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Gudang Terbuka	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			
- PT	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Koperasi	3 (Tiga)	5 (Lima)	Tidak Ada
- CV	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
- Firma	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
- Perorangan	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
- Perusahaan Lain	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada

Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
- Kantor Cabang, Pembantu, dan Perwakilan	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
Izin Usaha Rumah Kost/Pemondokan	7 (Tujuh)	4 (Empat)	Tidak Ada
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)			
- Usaha Daya Tarik Wisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Kawasan Pariwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Transportasi Wisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Perjalanan Wisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Makan dan Minum	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Penyediaan Akomodasi	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insetif, Konferensi dan Pameran	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Informasi Pariwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Pramuwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Wisata Tirta			
- Usaha Solus Per Aqua (SPA)			
Surat Izin Usaha Perdagangan, Minuman Beralkohol (SIUP MB)			
- Golongan B dan C	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Bar, Pub dan Klub Malam Rp125.000.000,- Hotel Berbintang 3,4, dan 5 Rp100.000.000,- Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka Rp75.000.000,-
SEKSI PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Izin Usaha / HO			
- Baru	10	11 (Sebelas)	RIG = TK x IL x IG x LRTU
- Perpanjangan	(Sepuluh)		RIG = TK x IL x IG x LRTU x 60%
			Keterangan RIG = Retribusi Gangguan TK = Tarif Lingkungan IL = Indeks Lingkungan

Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
			IG = Indeks Gangguan LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha
Izin Sewa Tanah dan Bangunan milik PEMKOT	3 (Tiga)	4 (Empat)	Ada
Izin Reklame - Permanen - Insidentil Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Baliho	7 (Tujuh) 3 (Tiga)	5 (Lima) 3 (Tiga)	Perangkat Daerah Terkait
Izin Sarana Kesehatan (13 Jenis)	5 (Lima)	17 (Tujuh Belas)	Tidak Ada
Izin Tenaga Kesehatan (17 Jenis)	5 (Lima)	17 (Tujuh Belas)	Tidak Ada
Surat Izin Pembuangan Air Limbag	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Madiun, 2021

d. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah. Semakin sedikit macam pajak dan retribusi pajak suatu daerah yang dibebankan kepada investor atau pelaku bisnis, maka semakin menarik minat investor untuk berinvestasi. Jenis pajak daerah yang dikenakan di Kota Madiun terdiri dari 9 jenis pajak yaitu: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat terdiri dari Retribusi Jasa Umum (retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengujian kendaraan bermotor), Retribusi Jasa Usaha (retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat kusus parkir, rumah potong hewan, dan tempat rekreasi dan olah raga), dan Retribusi tempat Perizinan Tertentu (retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, dan izin trayek).

Tabel 2.20

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Madiun Tahun 2015-2020

Uraian	015	016	017	018	019	020
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	5	5	5	5	5	5

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2021

e. Persentase Perda yang mendukung Dunia Usaha

Peraturan daerah berperan penting sebagai peraturan yang menjamin adanya kepastian bagi semua pemangku kepentingan termasuk investor di dalamnya. Adanya perda menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif. Dalam rangka direvisi dengan Perda Nomor 32 Tahun 2018. Secara umum, Perda di menggairahkan iklim investasi di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun telah menyusun aturan main investasi melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal yang telah Kota Madiun seluruhnya mendukung dunia usaha karena pada dasarnya Perda yang ada merupakan aturan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam proses pembuatan Perda di Kota Madiun telah melibatkan masyarakat karena seluruh Perda yang ada telah dilakukan konsultasi publik.

Tabel 2.21

Persentase Perda yang Mendukung Dunia Usaha di Kota Madiun, Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perda (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

3. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Lebih detailnya, SDM yang berkualitas memiliki andil besar dalam kemajuan dan pembangunan tersebut. SDM yang berkualitas pada suatu daerah dapat dilihat dari produktivitas tenaga kerja yang usianya antara 15-64 tahun yang dimiliki daerah tersebut dan dapat pula dilihat dari tingkat pendidikannya. Diharapkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin berkualitas pula orang tersebut.

a. Tenaga Kerja

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat dianalisa dari penduduknya yang termasuk dalam angkatan kerja. Penduduk Kota Madiun yang termasuk dalam angkatan kerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22

Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di Kota Madiun, 2020

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Persentase yg bekerja
1	s/d SD	12.616	1.043	13.659	92,36
2	SMP	10.906	1.039	11.945	91,30
3	SMA	44.809	3.944	48.753	91,91
4	Perguruan Tinggi	22.003	2.169	24.172	91,03
Total		90.334	8.195	98.529	91,68

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di atas, penduduk yang bekerja di Kota Madiun sebagian besar didominasi oleh lulusan pendidikan menengah. Penduduk yang bekerja dengan kualifikasi jenjang pendidikan SMA adalah sebanyak 44.809 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan kualifikasi pendidikan perguruan tinggi sebanyak 22.003 orang. Walaupun rasio penduduk bekerja dengan jenjang pendidikan universitas cukup tinggi, masih banyak penduduk bekerja di Kota Madiun dengan kualifikasi pendidikan SD.

b. Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.23

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Madiun, 2014-2020

No.	Golongan Usia (Tahun)	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	0 ≤ 5	12.677	9.702	9.658	12.271	12.215	12.211	12.218
2.	5 ≤ 10	14.808	14.122	14.040	12.583	14.106	14.163	14.164
3.	10 ≤ 15	17.183	16.222	15.948	12.018	15.520	15.494	15.469
4.	15 ≤ 20	17.173	18.280	18.408	13.874	17.246	16.924	16.863
5.	20 ≤ 25	13.831	14.551	14.888	12.519	15.147	15.434	15.455
6.	25 ≤ 30	14.578	13.340	13.841	12.245	14.020	14.042	14.096
7.	30 ≤ 35	18.029	16.338	15.399	13.025	14.605	14.147	14.075
8.	35 ≤ 40	18.173	17.462	17.657	12.506	17.340	17.086	17.089
9.	40 ≤ 45	16.700	16.764	16.673	12.998	16.660	16.998	17.034
10.	45 ≤ 50	15.458	15.642	16.140	13.460	15.744	15.618	15.602
11.	50 ≤ 55	13.348	13.726	13.832	13.138	13.945	14.417	14.400
12.	55 ≤ 60	11.705	12.306	12.433	11.872	12.357	12.195	12.211
13.	60 ≤ 65	9.020	9.776	10.185	8.435	30.886	31.386	31.406
14.	65 ≤ 70	5.988	6.683	7.280	5.906			
15.	70 ≤ 75	4.940	5.059	4.689	4.190			
16.	≥ 75	7.418	8.275	8.966	5.059			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

Bila dicermati, rasio ketergantungan pada tahun 2020 adalah sebesar angka 42,57%. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang usia belum dan tidak produktif. Melihat pada kurun waktu 2013-2020, angka rasio ketergantungan besarnya fluktuatif setiap tahunnya. Namun antara tahun 2013-2020 angka ketergantungan terus mengalami peningkatan, meski akhirnya di tahun 2020 terjadi sedikit penurunan. Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka ketergantungan akan memberi dampak positif bagi usia

produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap naiknya angka Indeks Pembangunan Manusia, jika mereka dapat memperoleh akses untuk pengembangan dirinya. Seperti akses ke pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, dan akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika mereka tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justru akan menjadi malapetaka.

Sebuah bencana bagi suatu daerah karena, banyak penduduk usia produktif yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya dapat meningkatkan angka kriminalitas.

Tabel 2.24

Usia Produktif, Usia Tidak Produktif di Kota Madiun, 2013-2020

No.	Keterangan	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usia Produktif (jiwa)	145.806	148.015	148.185	149.456	124.072	147.225	147.256	147.297
2.	Usia Tidak Produktif (jiwa)	61.575	62.984	60.058	60.581	52.027	62.572	62.859	62.707
3.	Beban Ketergantungan (%)	42,23	42,55	40,52	40,53	41,93	42,50	42,69	42,57

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana dituangkan dalam bab sebelumnya bahwa sebagai upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan yang terjadi maka dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD kedalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD untuk menjaga konsistensi maka RKPD juga perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan agar tercapai integrasi program dan kegiatan mulai RKPD, KUA dan PPAS serta APBD, berdasarkan perubahan asumsi-asumsi seperti pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam RKPD.

Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah menuntut daerah untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan lebih efektif dan efisien. Perubahan RKPD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukan perubahan-perubahan asumsi-asumsi RKPD Kota Madiun Tahun 2021 didasarkan pada beberapa perkembangan kondisi nasional, regional maupun kondisi daerah.

Dinamika paling mempengaruhi perubahan RKPD adalah adanya perkembangan pandemi Covid-19 yang saat ini membentuk puncak baru dikarenakan perkembangan varian delta virus Covid-19. Hal ini menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, yang berdampak pada pembatasan aktifitas masyarakat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya asumsi perlambatan pertumbuhan ekonomi, maka dalam RKPD ini juga akan dilakukan rasionalisasi target indikator makro yang terdampak secara langsung.

Selain itu Perubahan RKPD tahun 2021 didasarkan pada upaya sinkronisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD 2021 yang telah ditetapkan, dengan Perubahan RPJMD 2019-2024 yang sudah sampai tahap Rancangan Akhir. Dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD ini, terdapat beberapa perubahan yang menyempurnakan RPJMD 2019-2024 akibat adanya perubahan regulasi yang bersifat nasional dan kondisi pandemi Covid-19. Kota Madiun tetap berpedoman pada tema dan prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya :

- 1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan;**
- 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing;**
- 3. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata;**
- 4. Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah;**
- 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;**
- 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;**

Upaya pencapaian program prioritas ini dengan tidak melupakan tuntutan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga, serta pencapaian visi dan misi kepala daerah.

3.1 Perubahan Asumsi Dasar Perubahan RKPD Tahun 2021

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan Realisasi indikator perekonomian **Semester I tahun 2021** adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi :3,1-3,3%
2. Inflasi : 1,33%
3. Tingkat suku bunga : 6,59 % (SBN 10 tahun)
4. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di angka 14.299 (lebih rendah dari nilai tukar asumsi 14.600 per dolar AS)
5. Harga minyak berada di 62 dolar AS per barel (lebih tinggi dari harga minyak asumsi 45 dolar AS per barel)

6. target produksi siap jual atau lifting minyak berada : 663.000 barel per hari, (lebih rendah dari asumsi 705.000 barel per hari)
7. lifting gas berada di angka 1.007.000 barel setara minyak per hari (sama dengan asumsi pada APBN)
8. pendapatan negara mencapai Rp886,9 triliun atau terjadi pertumbuhan 9,1 persen. Angka Rp886,9 triliun ini merupakan 50,9 persen dari target APBN 2021 yaitu Rp1.743,6 triliun rupiah.
9. Penerimaan pajak :Rp557,8 triliun atau 45,4 persen dari target tahun ini Rp1.229,6 triliun
10. Bea dan cukai :Rp122,2 triliun atau 56,9 persen dari target Rp215 triliun
11. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) : Rp206,9 triliun (tumbuh 11,4 persen)
12. belanja negara, pada semester I sudah direalisasikan sebesar Rp1.170,1 triliun (42,5 % dari target belanja 2021)

Menteri keuangan menilai bahwa dengan adanya peningkatan angka kasus Covid-19 yang kemudian berimbas pada diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, maka APBN perlu meningkatkan dukungannya bagi program-program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Untuk pagu di bidang kesehatan, pada tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi yaitu mencapai Rp193,93 triliun.

Pemerintah belum mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 kepada DPR. Sehingga asumsi perubahan APBN-P tidak digunakan sebagai asumsi dasar perubahan RKPD. Adapun asumsi yang digunakan lebih kepada perkembangan pandemi Covid-19, perkembangan stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan perkembangan model pelayanan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga pada RKPD Perubahan ini terdapat penyesuaian target-target indikator makro yang dipengaruhi langsung oleh perkembangan pandemi Covid-19.

Tabel 3.1
 Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2021

Indikator	Realisasi					Proyeksi
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,93	5,96	5,69	-3,39	-1,8 - 3
TPT (%)	5,12	4,68	3,96	4,01	8,32	8,26 – 8,24
Inflasi	2,25	4,78	2,71	2,20	1,86	1,98 – 1,86
Kemiskinan	5,16	4,94	4,49	4,35	4,98	4,91 – 4,97

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun, Tahun 2021

*) Target/Proyeksi

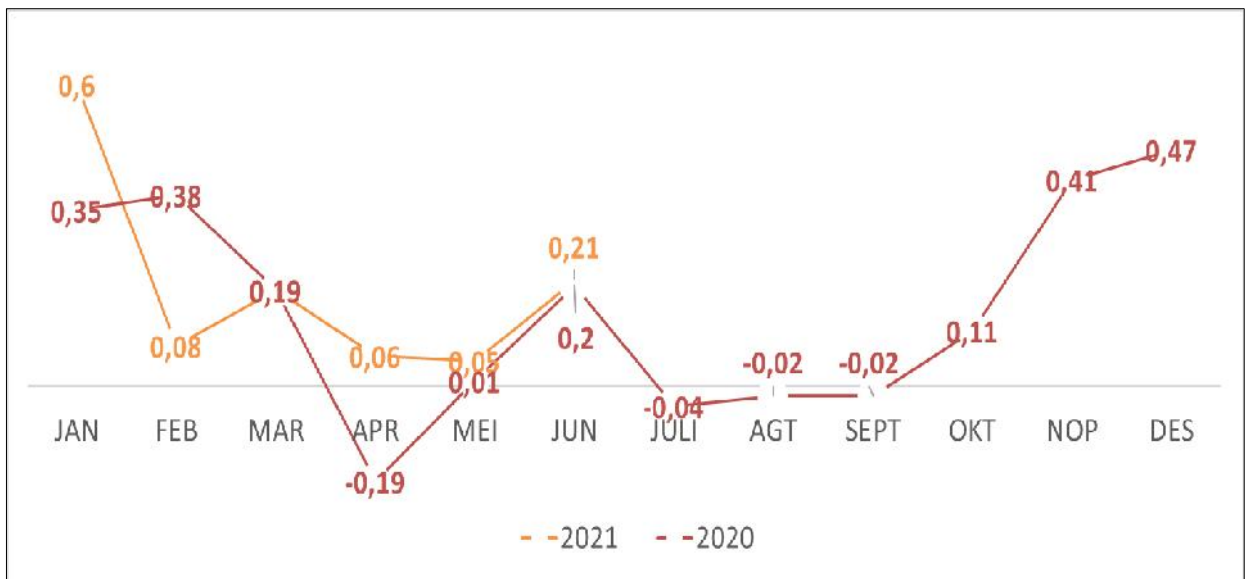
Pertumbuhan proyeksi ekonomi menggunakan dasar pertumbuhan ekonomi tribulanan Kota Madiun yang dirilis oleh BPS Kota Madiun yaitu sebesar 0,12 (Q to Q) dan -1,8 (Y to Y). Angka proyeksi 2021 menggunakan *range* (-1,8) - 3 dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi **negatif** apabila perkembangan Covid-19 saat ini masih belum mencapai puncaknya, yang berarti akan ada peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang berimplikasi pada perpanjangan masa PPKM oleh pemerintah.
2. Pertumbuhan ekonomi **positif** apabila perkembangan Covid-19 terkendali dan melandai. Selain itu, diperkuat pula dengan munculnya *Herd Immunity* sebagai dampak dari cakupan vaksinasi Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun di asumsikan mengalami sedikit peningkatan menjadi 8,26 – 8,24 dengan asumsi stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberdayakan UMKM dapat memberikan dampak positif. Akan tetapi penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan masih belum dapat maksimal karena masih diberlakukannya PPKM yang berdampak pada aktifitas dunia kerja.

Perkembangan inflasi masih menggunakan asumsi realisasi 2020. Hal ini melihat trend perkembangan inflasi tahun 2020 yang polanya hampir sama. Sehingga perkembangan inflasi diasumsikan tidak akan banyak terkoreksi dari tahun 2020. Dan berdasarkan Analisa Bank Indonesia bahwa Inflasi Nasional tahun 2021 diprakirakan berada dalam rentang sasarannya 3,0+1%. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya.

Koordinasi kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk menjaga kecukupan pasokan bahan pangan strategis dan mengantisipasi risiko inflasi pangan, dari kemungkinan adanya gangguan produksi dan distribusi, di tengah meningkatnya curah hujan karena fenomena La Nina dan tidak optimalnya aktivitas pertanian sebagai dampak rendahnya harga jual selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap konsisten dalam mengelola ekspektasi inflasi sesuai sasaran. Di samping itu, sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus difokuskan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat selama berlangsungnya pandemi COVID-19 sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)



Sumber : BPS, 2021

Gambar 3.1

Perbandingan Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Madiun Tahun 2020 – 2021

Jika inflasi meningkat maka kemiskinan akan ikut mengalami meningkat. Sebaliknya, jika inflasi menurun, maka angka kemiskinan akan berkurang. Hal ini dikarenakan dalam penentuan garis kemiskinan yang menjadi indikator penghitung kemiskinan sangat dipengaruhi dengan nilai inflasi. Dengan inflasi yang diasumsikan mengalami peningkatan dari tahun 2020, maka prosentase penduduk miskin akan mengalami peningkatan karena garis kemiskinan juga meningkat.

3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Selama terjadi pandemi covid-19 yang membawa dampak buruk sebagaimana dijelaskan pada sub bab 3.1, bahwa keuangan negara (APBN) maupun keuangan daerah (APBD) mengalami keterpurukan. Dengan meningkatnya penderita covid-19 baik secara nasional maupun daerah, diproyeksikan pendapatan secara umum akan menurun, tetapi tetap mempertahankan/meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang masih mungkin diupayakan. Proyeksi pendapatan Kota Madiun pada tahun 2021 dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2021

Uraian	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	bertambah/berkurang	persentase kolom 4
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	226.891.939.093	243.264.192.996	16.372.253.903	7%
Pajak Daerah	76.978.000.000	82.260.000.000	5.282.000.000	7%
Retribusi Daerah	16.731.224.667	15.362.633.570	-1.368.591.097	-8%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.092.455.426	15.092.455.426	0	0%
Lain-lain PAD yang Sah	118.090.259.000	130.549.104.000	12.458.845.000	11%
PENDAPATAN TRANSFER	757.530.604.000	739.521.455.051	-18.248.023.949	-2%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	692.146.911.000	677.911.879.000	-14.235.032.000	-2%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.383.693.000	61.609.576.051	-3.774.116.949	-6%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.399.600.000	23.326.476.298	3.926.876.298	20%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.399.600.000	23.326.476.298	3.926.876.298	20%
JUMLAH PENDAPATAN	1.003.822.143.093	1.006.112.124.345	2.289.981.252	0,2%

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Dari tabel diatas diproyeksikan bahwa secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD yang meningkat adalah pajak daerah, hal ini dikarenakan meskipun terdampak covid-19 persentase realisasi atas target pendapatan pajak daerah menunjukkan pencapaian yang positif. Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 90.286.840.987,07, angka tersebut melebihi target pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 84.700.000.000,00. Berbeda dengan pajak daerah, PAD retribusi daerah diproyeksikan menurun yang disebabkan oleh adanya 33 program unggulan Walikota Madiun (Janji Politik), diantaranya adalah program Penghapusan retribusi parkir untuk pasar tradisional dan Penghapusan retribusi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun.

Pada pendapatan transfer, diproyeksikan bahwa baik Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah akan mengalami penurunan.

Meskipun proyeksi pendapatan APBN meningkat, kondisi jumlah penderita covid-19 semakin meningkat, Pemerintah Kota Madiun pesimis bahwa pendapatan transfer akan mengalami penurunan.

3.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sebagai konsekuensi penerapan prinsip keadilan anggaran, maka rencana perubahan dilakukan dengan melakukan penambahan, pengurangan dan penggeseran kredit anggaran belanja daerah dengan tetap mengedepankan sistem belanja yang berbasis anggaran kinerja yakni suatu sistem anggaran belanja yang mengedepankan capaian hasil dari dana yang tersedia. Selanjutnya harus mampu mencerminkan pengeluaran-pengeluaran yang adil dan proporsional serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penetapan rencana perubahan belanja daerah, pada umumnya diarahkan untuk menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2021. Karena adanya faktor keterbatasan data, waktu serta alokasi dana yang ada, Rencana Kerja dimaksud belum dapat terakomodir dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi penyediaan dananya.

Tabel 3.3
Belanja dan Perubahan Belanja Tahun 2021

Uraian	APBD 2021	RKPD 2021 PERUBAHAN	bertambah/berkurang	Persentase kolom 4
1	2	3	4	5
BELANJA				
BELANJA OPERASI	939.902.569.530	997.651.152.021	57.748.582.491	6%
Belanja Pegawai	478.425.879.983	473.828.865.211	-4.597.014.772	-1%
Belanja Barang dan Jasa	425.059.231.547	484.785.386.930	59.726.155.383	14%
Belanja Hibah	13.765.706.000	16.976.462.380	3.210.756.380	23%
Belanja Bantuan Sosial	22.651.752.000	22.060.437.500	-591.314.500	-3%
BELANJA MODAL	197.738.448.365	216.245.749.320	18.507.300.955	9%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.500.943.323	65.255.778.398	14.754.835.075	29%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.229.035.949	5.872.9817.509	2.500.781.560	4%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.974.356.300	90.016.324.000	1.041.967.700	1%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.034.112.793	2.243.829.413	209.716.620	10%
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.181.125.198	61.148.405.305	57.967.280.107	1.822%
Belanja Tidak Terduga	3.181.125.198	61.148.405.305	57.967.280.107	1.822%
JUMLAH BELANJA	1.140.822.143.093	1.275.045.306.646	134.223.163.553	12%

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penambahan sebesar Rp. 134.223.163.553,- atau mengalami kenaikan sebesar 12% dari anggaran yang semula sebesar Rp. 1.140.822.143.093 menjadi Rp. 1.275.045.306.646.

Secara umum penambahan belanja terjadi pada seluruh komponen belanja, baik dari belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga. Penambahan belanja operasi sebagian besar terjadi pada belanja barang dan jasa, yang digunakan oleh bidang Kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19 terutama untuk membiayai diagnostik testing, tracing, isolasi, untuk biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan juga pembelian berbagai obat dan APD. Penambahan belanja modal terjadi karena adanya peningkatan pengadaan sarana prasarana yang mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sarana prasarana yang meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sedangkan Belanja Tidak Terduga meningkat terjadi karena masih dalam kondisi pandemi, maka sebagai antisipasi keadaan darurat apabila kasus covid meningkat serta sebagai upaya antisipasi adanya sesuatu hal yang tidak kita harapkan, dalam hal ini adanya bencana atau keadaan darurat lainnya sehingga perlu dialokasikan dana cadangan ketika keadaan mendesak.

3.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan, merupakan bagian anggaran yang dipergunakan untuk mengadministrasikan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu untuk menampung “Transaksi Keuangan” guna menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, apabila terjadi defisit anggaran, maka ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari obyek Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Penerimaan Pembiayaan dengan nomenklatur: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Apabila terjadi Surplus Anggaran, maka pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagaimana Obyek Pengeluaran Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan dengan nomenklatur: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel 3.4
Perubahan Anggaran Tahun 2021

Uraian	APBD 2021	APBD 2021 Perubahan I	APBD 2021 Perubahan II	RKPD 2021 PERUBAHAN
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	226.891.939.093	226.891.939.093	226.891.939.093	243.264.192.996
Pajak Daerah	76.978.000.000	76.978.000.000	76.978.000.000	82.260.000.000
Retribusi Daerah	16.731.224.667	16.731.224.667	16.703.224.667	15.362.633.570
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.092.455.426	15.092.455.426	15.092.455.426	15.092.455.426
Lain-lain PAD yang Sah	118.090.259.000	118.090.259.000	118.118.259.000	130.549.104.000
PENDAPATAN TRANSFER	757.530.604.000	739.301.330.051	739.282.580.051	739.521.455.051
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	692.146.911.000	677.911.879.000	677.911.879.000	677.911.879.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.383.693.000	61.389.451.051	61.370.701.051	61.609.576.051
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.399.600.000	19.399.600.000	19.399.600.000	23.326.476.298
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.399.600.000	19.399.600.000	19.399.600.000	23.326.476.298
JUMLAH PENDAPATAN	1.003.822.143.093	985.592.869.144	985.574.119.144	1.006.112.124.345
BELANJA				
BELANJA OPERASI	939.902.569.530	991.763.255.969	996.795.371.029	997.651.152.021
Belanja Pegawai	478.425.879.983	491.427.071.021	477.592.308.497	473.828.865.211
Belanja Barang dan Jasa	425.059.231.547	460.157.860.568	479.027.238.152	484.785.386.930
Belanja Hibah	13.765.706.000	17.526.572.380	17.526.572.380	16.976.462.380
Belanja Bantuan Sosial	22.651.752.000	22.651.752.000	22.649.252.000	22.060.437.500
BELANJA MODAL	197.738.448.365	200.769.646.132	202.464.337.498	216.245.749.320
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.500.943.323	53.132.706.508	54.078.859.038	65.255.778.398
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.229.035.949	56.628.455.949	57.376.450.494	58.729.817.509
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.974.356.300	88.974.356.300	88.974.356.300	90.016.324.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.034.112.793	2.034.127.375	2.034.671.666	2.243.829.413
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.181.125.198	61.993.149.344	55.247.592.918	61.148.405.305
Belanja Tidak Terduga	3.181.125.198	61.993.149.344	55.247.592.918	61.148.405.305
JUMLAH BELANJA	1.140.822.143.093	1.254.526.051.445	1.254.507.301.445	1.275.045.306.646
Total Surplus/(Defisit)	-137.000.000.000	-268.933.182.301	-268.933.182.301	-268.933.182.301
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.000.000.000	268.933.182.301	268.933.182.301	268.933.182.301
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.000.000.000	268.933.182.301	268.933.182.301	268.933.182.301
Pembiayaan Netto	137.000.000.000	268.933.182.301	268.933.182.301	268.933.182.301

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Perubahan APBD 1 sebagaimana tercantum pada tabel Perubahan Anggaran Tahun 2021, terjadi karena adanya kebutuhan dalam rangka pemberian insentif nakes dan PPKM Mikro, sedangkan Perubahan APBD II terjadi karena Amanat perubahan juknis insentif nakes, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Dalam rangka menjaga stabilitas dan keseimbangan Keuangan Daerah yang tertuang pada tabel Perubahan Anggaran Tahun 2021, maka dari sisi Kebijakan Pembiayaan akan diarahkan untuk menutup defisit anggaran. Kebijakan yang dilakukan diupayakan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan keuangan daerah dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dan tidak mencari dana dari luar, seperti pinjaman atau yang lainnya. Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2021 yang diperoleh dari SiLPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 268.933.182.301,- yang akan digunakan untuk menutup defisit sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD 2019-2024 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi, menyebabkan adanya perubahan asumsi-asumsi dasar dalam pencapaian visi dan misi Walikota Madiun yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran. Perubahan asumsi-asumsi tersebut disusun dalam Perubahan RKPD Tahun 2021. Penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk tahun 2021 disusun dengan fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam Perubahan RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam perubahan anggaran dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021, penanganan dan penanggulangan wabah Covid-19, serta adanya regulasi Peraturan Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri : 050/3708/2020 serta kebijakan lain yang mengatur penanganan nomenklatur DAK Fisik dan Non Fisik dan dana DBHCHT.

Tabel 4.1

Perbandingan Tujuan dan Sasaran
Per Prioritas Pembangunan
RKPD Tahun 2021 dengan Perubahan RKPD Tahun 2021

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan ;

RKPD		P-RKPD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah		Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
	stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualiatas SDM yang Berdaya Saing ;

RKPD		P-RKPD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender

3. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata

RPJMD		P-RPJMD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Pengurangan Kemiskinan
	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat

4. Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah

RKPD		P-RKPD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

RKPD		P-RKPD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

RPJMD		P-RPJMD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pada tabel 4.1 menjelaskan adanya perubahan nomenklatur tujuan sasaran yang merupakan penyempurnaan/penyesuaian dalam penyesuaian berbagai kebijakan oleh pemerintah Kota Madiun dalam merespon perkembangan kondisi aktual. Penyempurnaan/penyesuaian tersebut diimplementasikan melalui pengurangan atau penyesuaian tujuan dan sasaran, beserta indikator dan targetnya.

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 pada Perubahan RKPD Tahun 2021

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan ;

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat		Indek Gini		0,35		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,46	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100%	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	18.7 %	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90%	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	100%	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan Segar Aman yang teruji (%)	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	5%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	15.6 Kg/Kapital/Tahun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian	50%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat		Indek Gini				0,35	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	50%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Jumlah Menular	10%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian	70%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	15%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Gender				94,40	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		
Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,19	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	10%	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	5%	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak	0 Dokumen	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	100%	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Gender				94,40	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak	100%	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif				6,38	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,26	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	23%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	79%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Penurunan Kasus - Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	10%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pendaftar Transmigrasi yang terfasilitasi	3%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	2,16	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Perusahaan yang Memperbarui Perijinan	100%	Dinas Perdagangan	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Pasar yang Dikelola Sarana Distribusinya	100%	Dinas Perdagangan	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting	100%	Dinas Perdagangan	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	100%	Dinas Perdagangan	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Perdagangan yang Dipromosikan	15 Produk	Dinas Perdagangan	

TUJUAN		INDIKATOR				TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif				6,38	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	100%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	12,8%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	0,58	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi Bersertifikat NIK	98.69 %	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase Koperasi Aktif Dengan Omzet Meningkat	30%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha Mikro Terfasilitasi yang Beromzet Naik	7%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	13%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	80%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	80 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Jenis Izin yang Diproses Secara Elektronik	90%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualits SDM yang Berdaya Saing ;

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,91	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,4	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,40	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	60%	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Rata-rata Lama Sekolah	11,14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	wajib belajar 9 tahun	100%	Dinas Pendidikan
Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,81	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,39 Indek	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	90%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	85%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	61,5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 4.8 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmeet Need	< 8 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	70%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata ;

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	76,95	

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat		Indeks Ketentraman			76,95	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 74,30 (Har Monis)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Prestasi Pemuda	12 orang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	35 medali	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	5%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina	100 Orang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Benda / Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan	21%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	2 destinasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di dalam Negeri	4 Event	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan Sektor Kepariwisataa	18.68 %	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80,08 Nilai	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

TUJUAN	INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman			76,95		
			BUDAYA POLITIK			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah ;

TUJUAN	INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)			BB			
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	96,20	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Banjir	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	90,5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	94.5 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi	95%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan		Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)			BB	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	98,5%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	84%	Dinas Perhubungan

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana ;

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan		Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)			BB	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,69	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RT/RW	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Penatagunaan Tanah	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	69,23%	Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan		Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)			BB	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	48%	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	96,83%	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	71%	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	52,9%	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	90%	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	90%	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74%	Dinas Lingkungan Hidup

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities		Indeks Reformasi Birokrasi			B		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (73)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	Rutin Perangkat Daerah	
						Bagian Organisasi Perangkat Daerah	
						Bagian Umum Sekretariat Daerah	
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase capaian target program pembangunan daerah	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Tinggi		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
							Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pengelolaan Aset terhadap PAD	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	1,5	Badan Pendapatan Daerah
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	IKM Perangkat Daerah	88 Score	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	10%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	30%	Inspektorat			

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities		Indeks Reformasi Birokrasi			B	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100%	Inspektorat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	Kecamatan Manguharjo
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100%	Kecamatan manguharjo
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	Kecamatan Kartoharjo
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100%	Kecamatan Kartoharjo
	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	4,1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities		Indeks Reformasi Birokrasi			B	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	82,85 (Baik)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi Database Kependudukan	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - Undang No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	40%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	79 Skor	Sekretariat DPRD
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88 skor	Kecamatan Manguharjo
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88 skor	Kecamatan Kartoharjo

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities		Indeks Reformasi Birokrasi			B	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88 skor	Kecamatan Taman
	Indeks Inovasi Daerah	1987	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat		Indeks Ketentraman			76,95	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks rasa aman	76,15	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	Kecamatan Manguharjo
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	Kecamatan Kartoharjo

Tabel 4.2 menunjukkan tujuan dan sasaran per prioritas pembangunan yang disertai indikator kinerja dan target. Pada tabel tersebut terdapat beberapa perubahan target tujuan dan sasaran pada Perubahan RKPD Tahun 2021 dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

1. Indikator tujuan indeks ketentraman yang semula sebesar 78 menjadi 76,95. Hal ini dikarenakan pengaruh pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 akan berdampak negatif terhadap komponen-komponen penyusun indikator ini;

2. Indeks rasa aman yang semula 79 menjadi 76,15. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh pandemi covid-19 yang berakibat meningkatnya aktivitas masyarakat dalam hal kriminalitas, pelanggaran perda dan lain-lain, sehingga nantinya akan berdampak negatif terhadap komponen-komponen penyusun indikator ini;
3. Indikator sasaran indeks kerukunan yang semula 2,89 / tinggi menjadi 74,3 (B). Hal ini dikarenakan adanya perubahan formulasi perhitungan;
4. Indikator sasaran IDG pada yang semula 83,7 menjadi 77,27. Hal ini diasumsikan berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar 77,18;
5. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semula 65,44 menjadi 60,16. Hal ini dikarenakan adanya perubahan formulasi perhitungan indikator.

Tabel 4.3

Tema Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota Madiun

Kondisi	Tema Pemerintah Pusat	Tema Pemerintah Provinsi	Tema Pemerintah Kota Madiun
Sebelum Pandemi Covid 19	<i>Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah di Dukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas</i>	<i>Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Jawa Timur yang di dukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas</i>	<i>Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Pariwisata yang di Dukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan</i>
Setelah Pandemi Covid 19	<i>Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional</i>	<i>Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan dan Infrastruktur di Jawa Timur</i>	<i>Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Infrastruktur di Kota Madiun</i>

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan di dunia pada umumnya dan Kota Madiun pada khususnya. Dampak yang paling tampak adalah peningkatan kasus kesakitan dan kematian akibat COVID-19 yang menimbulkan kebijakan pembatasan-pembatasan aktifitas dan mobilitas masyarakat untuk memperkecil kemungkinan penularan. Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak pula pada penurunan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan pada pertumbuhan ekonomi secara makro, peningkatan jumlah pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan reformasi sosial untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian percepatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Perpres Nomor 122 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 serta seiring dengan ketidakpastian akhir pandemi COVID-19, maka diperlukan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Madiun antara lain :

1. Penanganan Kesehatan dilakukan dengan :
 - a. Meningkatkan kegiatan 3T (tracing, tracking dan treatment) dan sosialisasi 6M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga pola makan dan istirahat cukup, Mengurangi mobilitasi, menjaga jarak dan Menjauhi Kerumunan) kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam 3T melalui Kampung Tangguh
 - c. Menurunkan BOR (Bed Occupancy Rate) isolasi dengan menggunakan Asrama Haji sebagai tempat isolasi terpadu dan Rumah Sakit Lapangan.
 - d. Menggunakan Rusunawa sebagai Rumah Sehat yaitu tempat Isolasi untuk Orang Tanpa Gejala (OTG).
 - e. Penyediaan 1 RT 1 Dapur umum untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumah.
 - f. Percepatan vaksinasi bagi penduduk Kota Madiun
2. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di Kota Madiun dilakukan beberapa strategi yaitu :
 - a. Bantuan modal penyediaan lokasi untuk melakukan kegiatan ekonomi terpusat di masing-masing kelurahan berupa Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana Lapak UMKM di setiap Kelurahan.
 - b. Memberdayakan UMKM yang berdomisili di kelurahan untuk penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat yang isolasi mandiri di rumah.
 - c. Himbauan kepada ASN dan seluruh masyarakat untuk belanja dari UMKM di sekitar rumahnya
 - d. Pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya
3. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dalam upaya meringankan beban dan membantu perekonomian masyarakat, melalui kebijakan program sosial bagi seluruh penduduk dalam upaya meringankan beban dan membantu perekonomian masyarakat dalam bentuk :

- a. Sinkronisasi data penerima bantuan sosial yang berasal dari berbagai sumber dana untuk menghindari *double account* penerima bantuan sosial melalui aplikasi satudata.kotamadiun.go.id
- b. Penerimaan dan penyaluran bantuan sosial dari masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha secara terpadu oleh Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun
- c. Pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat miskin dan sinkronisasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui musyawarah di masing-masing kelurahan
- d. Peningkatan sarana dan prasarana shelter Srintit dalam rangka perlindungan sosial terhadap PMKS terlantar

Tabel 4.4
Prioritas Nasional/Prioritas Provinsi/Prioritas Kota/Program Prioritas

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	3	4
1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	<i>Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan</i>
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)	<i>Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing</i>
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal	<i>Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata</i>
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	<i>Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah</i>
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	<i>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana</i>
7	Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat</i>

BAB V

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Perubahan rencana kerja terjadi dalam rangka pencapaian keenam prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 dan sekaligus dalam rangka pencapaian target yang ada di RPJMD pada tahun kedua. Keberhasilan atas pencapaian Prioritas dan RPJMD dapat diukur melalui Indikator-indikator Kinerja Utama Walikota Madiun yang telah dicantumkan pada Bab IV.

Pencapaian Prioritas maupun Visi Misi Walikota yang tercermin dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki indikator keberhasilan (indikator kinerja), target serta pagu anggaran. Program dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, perlu merespon perubahan kondisi yang terjadi pada semester I Tahun 2021, agar pencapaian target-target pembangunan yang diemban oleh Walikota Madiun dapat tercapai. Penyesuaian target-target kinerja program dan kegiatan serta penyesuaian anggaran perlu diselaraskan. Kondisi aktual yang berubah pada semester I Tahun 2021 perlu segera direspon melalui Perubahan RKPD Tahun 2021.

Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2021 pencapaian Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 serta pencapaian Visi Misi Walikota dijabarkan pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah							
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target					
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah											
1	6	4	02:01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang terlayani	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.7 %	18.7 %	100%	100%	40 orang	25 orang	91 persen	91 persen	77.850.000	41.689.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19%	92,940,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	4	02:02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																					
1	6	4	02:02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan layanan kedaruratan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.7 %	18.7 %	100%	100%	15 orang	15 orang	91 persen	91 persen	138.302.260	120.492.585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19%	147,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	4	02:02	4	Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS lainnya yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.7 %	18.7 %	100%	100%	105 orang	100 orang	91 persen	91 persen	42.400.000	41.326.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19%	13,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	4	02:02	5	Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.7 %	18.7 %	100%	100%	6 orang	5 orang	91 persen	91 persen	7.000.000	4.260.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19%	15,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	4	02:02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.7 %	18.7 %	100%	100%	10 orang	10 orang	91 persen	91 persen	36.400.000	18.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19%	297,880,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	4	02:02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.7 %	18.7 %	100%	100%	10 orang	10 orang	91 persen	91 persen	18.200.000	18.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19%	21,840,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																					
1	6	5	02:01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar																					
1	6	5	02:01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang didata	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	90%	90%	90%	24 orang	24 orang	91 persen	91 persen	3.600.000	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90%	3,960,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	5	02:01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	90%	90%	90%	24 orang	24 orang	91 persen	91 persen	4.080.000	4.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90%	4,488,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	5	02:01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	90%	90%	90%	24 orang	24 orang	91 persen	91 persen	200	200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90%	220	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	5	02:02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																					
1	6	5	02:02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin yang didata	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	90%	100%	100%	10000 orang	10000 orang	91 persen	91 persen	864.925.000	887.763.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90%	958,941,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	5	02:02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	90%	100%	100%	27 kelurahan	27 kelurahan	91 persen	91 persen	455.641.650	662.765.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90%	818,531,352	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	5	02:02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	90%	100%	100%	4638 KK	3252KK	91 persen	91 persen	7.622.687.200	7.780.735.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90%	9,974,393,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	5	02:02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah kelompok yang mendapat pengembangan ekonomi	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	90%	100%	100%	10 KUBE	10 KUBE	91 persen	91 persen	21.581.550	21.581.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90%	37,476,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Setelah	Tolok Ukur		Target					
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah											
2	8	3	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup kabupaten/kota	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	110 orang	9 orang	100 persen	100 persen	58.630.320	16.602.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	64.493.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	3	02:01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	150 orang	30 orang	100 persen	100 persen	35.484.500	10.714.445	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	41.232.950	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	3	02:02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																					
2	8	3	02:02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta sosialisasi dan sinkronisasi	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	60 orang	40 orang	100 persen	100 persen	156.472.020	156.472.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	176.409.222	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	3	02:03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
2	8	3	02:03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifiknya dalam situasi darurat	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	29 klien	29 klien	100 persen	100 persen	26.276.520	26.444.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	28.904.172	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	3	02:03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifiknya dalam situasi darurat	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	30 orang	30 orang	100 persen	100 persen	16.659.000	15.058.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	20.799.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																					
2	8	4	02:01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
2	8	4	02:01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Peserta yang Memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah peserta review/pelatihan/lo mba	Indeks Pemberdayaan Gender	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	5%	70%	70%	250 orang	81 orang	83.25 Skor	83.25 Skor	27.100.000	10.129.930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10%	110.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4	02:01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Peserta yang Memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah peserta pertemuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	5%	70%	70%	100 orang	280 orang	83.25 Skor	83.25 Skor	58.146.560	20.556.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10%	22.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4	02:01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Peserta yang Memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah peserta pelatihan	Indeks Pemberdayaan Gender	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	5%	70%	70%	100 orang	220 orang	83.25 Skor	83.25 Skor	64.300.000	22.187.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10%	110.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4	02:02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
2	8	4	02:02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Kebijakan yang Dapat Mendukung Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Jumlah peserta rakor	Indeks Pemberdayaan Gender	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	5%	100%	100%	300 orang	135 orang	83.25 Skor	83.25 Skor	20.950.000	20.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10%	120.725.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4	02:02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Kebijakan yang Dapat Mendukung Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Jumlah peserta studi tiru/jambore nasional	Indeks Pemberdayaan Gender	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	5%	100%	100%	200 orang	0 orang	83.25 Skor	83.25 Skor	44.916.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10%	61.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Target		
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah											
2	9	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	23 Skor	23 Skor	1.033.006.000	968.061.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	949.126,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												283.500.000	325.000.000				283.500.000			
2	9	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Perorangan / jabatan yang layak digunakan (%)	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan (%)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	23 Skor	23 Skor	55.500.000	55.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	55.500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan (%)	Persentase gedung yang layak digunakan (%)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	23 Skor	23 Skor	178.000.000	219.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	178,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan (%)	Persentase Sarana Prasarana gedung yang layak digunakan (%)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	23 Skor	23 Skor	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												1.322.146.000	1.287.926.000				962,000,000			
2	9	3	02:01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan												877.115.000	309.866.000				357,000,000			
2	9	3	02:01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Ketersediaan Pangan Utama (ton)	Jumlah Dokumen (Prognosa Panel Harga dan Neraca Bahan Pangan)	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	16200	16200	2 Dokumen	2 Dokumen	95.5 skor	95.5 skor	55.050.000	55.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100%	65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	02:01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Ketersediaan Pangan Utama (ton)	Jumlah produksi pangan hasil pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	16200	16200	2000 kg	2000 kg	95.5 skor	95.5 skor	740.065.000	172.816.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100%	210,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
																			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	9	3	02:01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Ketersediaan Pangan Utama (ton)	Jumlah Dokumen stok Pasokan dan harga Pangan (tingkat grosir, tingkat eceran, tingkat produsen, rckapitalisasi)	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	16200	16200	4 Dokumen	4 Dokumen	95.5 skor	95.5 skor	82.000.000	82.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100%	82,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	02:04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi													445.031.000	978.060.000				605,000,000		
2	9	3	02:04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kcal/kapita)	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) & Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2100	2100	2 Dokumen	2 Dokumen	95.5 skor	95.5 skor	55.050.000	55.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100%	65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	02:04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kcal/kapita)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi dan Seimbang	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2100	2100	3 kali	3 kali	95.5 skor	95.5 skor	308.741.000	854.584.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100%	420,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	02:04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kcal/kapita)	Jumlah koordinasi pencapaian target konsumsi pangan per kapita / tahun	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2100	2100	1 kali	1 kali	95.5 skor	95.5 skor	81.240.000	68.426.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100%	120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													252.617.000	211.622.000				325,000,000		
2	9	5	02:01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota													252.617.000	211.622.000				325,000,000		
2	9	5	02:01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Aman yang teruji (%)	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar (lokasi)	Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	80%	80%	450 orang	450 orang	95.5 skor	95.5 skor	169.028.000	128.033.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Sample Pangan Aman yang Teruji	80%	225,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	02:01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Aman yang teruji (%)	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar (lokasi)	Jumlah Sampel yang terperiksa (sampel)	Skor Pola Pangan Harapan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	80%	80%	45 sampel	45 sampel	95.5 skor	95.5 skor	83.589.000	83.589.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Sample Pangan Aman yang Teruji	80%	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													1.528.360.000	1.728.360.000			1.158.338.800			
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN													750.310.000	750.310.000			624.176.900			
2 17 5 02:01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota													750.310.000	750.310.000			624.176.900			
2 17 5 02:01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Presentase Koperasi Bersertifikat NIK	jumlah koperasi bersertifikat NIK	jumlah koperasi yang dibina	Persentase Koperasi Aktif	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.69 %	98.69 %	150 koperasi	125 koperasi	108 Koperasi	108 Koperasi	98.69 %	98.69 %	750.310.000	750.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Koperasi Bersertifikat NIK	86.5 %	624.176.900	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
																	DAK Non Fisik - PKZUKM				
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													148.050.000	148.050.000			224.161.900			
2 17 6 02:01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota													148.050.000	148.050.000			224.161.900			
2 17 6 02:01 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Presentase Koperasi Aktif Dengan Omzet Meningkat	jumlah koperasi yang meningkat omsetnya	jumlah koperasi yang dibina	Persentase Koperasi Aktif	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	30%	50 koperasi	50 koperasi	152 Koperasi	152 Koperasi	98.69 %	98.69 %	148.050.000	148.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Koperasi Aktif Dengan Omzet Meningkat	30%	224.161.900	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
																	Dana Insentif Daerah				
2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													630.000.000	830.000.000			310.000.000			
2 17 8 02:01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil													630.000.000	830.000.000			310.000.000			
2 17 8 02:01 1	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Presentase Usaha Mikro Terfasilitasi yang Beromzet Naik	jumlah pelaku usaha mikro terfasilitasi beromzet naik	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Persentase Usaha Mikro yang beromzet naik	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7%	7%	10 orang	10 orang	160 orang	160 orang	0.047 %	0.047 %	630.000.000	830.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Usaha Mikro Terfasilitasi yang Beromzet Naik	7%	310.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
																	Dana Insentif Daerah				
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													7.145.806.320	7.145.806.320			6.959.000.120			
2 18 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													5.561.209.120	5.287.139.120			5.561.209.120			
2 18 1 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													44.000.000	44.000.000			44.000.000			
2 18 1 02:01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen perangkat daerah	Indeks RB	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	32 Skor	32 Skor	44.000.000	44.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	44.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													4.202.386.800	3.597.136.800			4.202.386.800			
2 18 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	32 Skor	32 Skor	4.202.386.800	3.597.136.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	4.202.386.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 1 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													1.134.822.320	1.153.146.320			1.134.822.320			
2 18 1 02:06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	32 Skor	32 Skor	934.822.320	1.023.146.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	934.822.320	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 1 02:06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target)	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	32 Skor	32 Skor	200.000.000	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 1 02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													-	199.856.000			0			
2 18 1 02:07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	32 Skor	32 Skor	-	199.856.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												639.590.000	755.345.000			1.015.000.000				
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												205.440.000	296.130.000			415.000.000				
3 25 4 02:02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil												205.440.000	243.130.000			265.000.000				
3 25 4 02:02 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap (ton/tahun)	Jumlah Peserta Pelatihan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	5%	378	378	180 Orang	180 Orang	1.2 rasio	1.2 rasio	205.440.000	243.130.000	0	265.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
3 25 4 02:04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan												-	53.000.000			150.000.000				
3 25 4 02:04 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kem- itiran usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	Jumlah Prasarana yang diperbaiki	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5%		245		2 unit/tahun	1.2 rasio	-	53.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	0	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3 25 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												434.150.000	459.215.000			600.000.000				
3 25 6 02:02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil												434.150.000	459.215.000			600.000.000				
3 25 6 02:02 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina (orang)	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan (orang)	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.6 Kg/Kapital/Tah un	15.6 Kg/Kapital/Tah un	50	50	488 Orang	488 Orang	1.2 rasio	1.2 rasio	434.150.000	459.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	15.7 Kg/Kapital/Tah un	600.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												2.149.381.000	2.419.004.000			3.297.483.380				
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												1.456.409.000	1.608.737.600			2.391.256.480				
3 27 2 02:01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian												1.193.259.000	1.350.937.600			1.952.256.480				
3 27 2 02:01 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Efektifitas Sarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	50%	50	50	39 lokasi	39 lokasi	7.21 ton/ha	7.21 ton/ha	263.841.000	326.588.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efektifitas Sarana Pertanian	55%	620.538.880	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 2 02:01 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Efektifitas Sarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	50%	50	50	1 paket	1 paket	7.21 ton/ha	7.21 ton/ha	929.418.000	1.024.349.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efektifitas Sarana Pertanian	55%	1.331.717.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 2 02:03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota												263.150.000	257.800.000			439.000.000				
3 27 2 02:03 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Efektifitas Sarana Pertanian	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik (%)	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana- man Yang Dievansi	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	50%	75	75	12 lokasi	12 lokasi	7.21 ton/ha	7.21 ton/ha	263.150.000	257.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efektifitas Sarana Pertanian	55%	439.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												35.729.000	29.653.000			40.348.800				
3 27 3 02:01	Pengembangan Prasarana Pertanian												35.729.000	29.653.000			40.348.800				
3 27 3 02:01 2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	Prosentase pengembangan Prasarana yang pertanian (%)	Penyusunan laporan/peta/peratu- ran daerah tentang LP2B, KP2B dan LCP2B kota Madiun	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	50%	50%	50%	1 laporan	1 laporan	7.21 ton/ha	7.21 ton/ha	35.729.000	29.653.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	60%	40.348.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												372.200.000	478.050.000			520.000.000				
3 27 4 02:01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota												210.500.000	210.500.000			220.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercapainya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	329.000.000	329.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	329,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercapainya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	140.800.000	170.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	140,800,000	Dinas Pendidikan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													75.637.913.514	75.287.736.514				107,871,340,660		
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													52.460.483.930	52.248.946.930				77,882,242,775		
1	1	2	02:01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	wajib belajar 9 tahun	Persentase lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga yang direhab	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	20 Lembaga	20 Lembaga	100%	100%	13.688.000.000	13.476.463.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	28,200,000,000	Dinas Pendidikan
																					DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Regular - SD				
1	1	2	02:01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Laptop	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	5450 Unit	5450 Unit	100%	100%	36.621.250.000	36.621.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	47,121,250,000	Dinas Pendidikan
																					Dana Insentif Daerah				
1	1	2	02:01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	73 Lembaga	73 Lembaga	100%	100%	626.927.582	626.927.582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	746,342,360	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	wajib belajar 9 tahun	Persentase lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah prestasi siswa yang diraih	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	14 Bidang Kreatifitas	14 Bidang Kreatifitas	100%	100%	854.015.845	854.015.845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	1,016,685,530	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	73 Lembaga	73 Lembaga	100%	100%	670.290.503	670.290.503	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	797,964,885	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													11.430.982.096	11.292.342.096				17,725,574,685		
1	1	2	02:02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga yang direhab	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	100%	5.912.000.000	5.773.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	11,800,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	5.960 Kain Seragam	5.960 Kain Seragam	100%	100%	3.384.371.000	3.384.371.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	3,384,371,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	23 Lembaga	23 Lembaga	100%	100%	568.940.400	568.940.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	677,310,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	wajib belajar 9 tahun	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah prestasi siswa yang diraih	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	14 Bidang Kreatifitas	14 Bidang Kreatifitas	100%	100%	1.013.884.469	1.013.884.469	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	1,207,005,320	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	23 Lembaga	23 Lembaga	100%	100%	551.786.227	551.786.227	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	656,888,365	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													9.227.104.128	9.227.104.128				9,483,619,200		
1	1	2	02:03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	wajib belajar 9 tahun	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Jumlah Lembaga yang terpenuhi anggaran pengeloalaannya	Lembaga PAUD yang terakreditasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	316.089.480	316.089.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	376,297,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	wajib belajar 9 tahun	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang memahami kurikulum PAUD dan pendidikan kesetaraan SD	Lembaga PAUD yang terakreditasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	995 Orang	995 Orang	100%	100%	3.195.000.000	3.195.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	3,195,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	wajib belajar 9 tahun	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Prosentase lembaga paud yang berizin	Lembaga PAUD yang terakreditasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	100%	5.716.014.648	5.716.014.648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	5,912,322,200	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													2.519.343.360	2.519.343.360				2,779,904,000		
1	1	2	02:04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	wajib belajar 9 tahun	Prosentase lembaga yang terakreditasi	Jumlah Peserta Lulus Ujian	Prosentase lembaga non formal yang terakreditasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	65%	100%	175 siswa	175 siswa	100%	100%	918.689.600	918.689.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	964,840,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	wajib belajar 9 tahun	Prosentase lembaga yang terakreditasi	Jumlah tenaga kependidikan yang memahami pengelolaan perpustakaan sekolah	Prosentase lembaga non formal yang terakreditasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	65%	100%	92 Tenaga Kependidikan	92 Tenaga Kependidikan	100%	100%	525.000.000	525.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	625,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	wajib belajar 9 tahun	Prosentase lembaga yang terakreditasi	Jumlah lembaga yang bersertifikat	Prosentase lembaga non formal yang terakreditasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	65%	100%	60%	60%	100%	100%	1.075.653.760	1.075.653.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	wajib belajar 9 tahun	100%	1,190,064,000	Dinas Pendidikan
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM													572.110.560	572.110.560				681,084,000		
1	1	3	02:01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													572.110.560	572.110.560				681,084,000		
1	1	3	02:01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	Prosentase sekolah yang melaksanakan kurikulum SNP	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	572.110.560	572.110.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	681,084,000	Dinas Pendidikan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													2.774.939.040	2.725.139.040				6,616,572,320		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target			
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	1	4	02:01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													2.774.939.040	2.725.139.040			6,616,572,320			
1	1	4	02:01	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	persentase tenaga pendidik bersertifikasi yang berprestasi	Prosentase guru berprestasi	Prosentase guru, kasek dan pengawas berkompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	60%	60%	100%	50%	50%	100%	100%	1.740.875.720	1.691.075.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	60%	5,382,509,000	Dinas Pendidikan
1	1	4	02:01	2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	persentase tenaga pendidik bersertifikasi yang berprestasi	Prosentase guru yang memiliki guru berprestasi min 10%	Prosentase guru, kasek dan pengawas berkompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	60%	60%	100%	10%	10%	100%	100%	1.034.063.320	1.034.063.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	60%	1,234,063,320	Dinas Pendidikan
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													641.096.670	680.687.965			687,721,930			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													641.096.670	680.687.965			687,721,930			
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													641.096.670	680.687.965			687,721,930			
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	335.096.670	335.096.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	398,921,930	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	306.000.000	345.591.295	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	288,800,000	Dinas Pendidikan
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													186.850.000	192.881.000			227,025,700			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													186.850.000	192.881.000			227,025,700			
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													186.850.000	192.881.000			227,025,700			
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	146.350.000	146.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	174,225,700	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Target	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	40.500.000	46.531.000	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	52,800,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													186.420.000	193.997.199			225,114,129			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													186.420.000	193.997.199			225,114,129			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													186.420.000	193.997.199			225,114,129			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama		jumlah lembaga		Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	133.320.000	133.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	158,714,129	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama		jumlah lembaga		Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	53.100.000	60.677.199	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	66,400,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													680.931.000	715.342.864			735,917,280			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													680.931.000	715.342.864			735,917,280			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													680.931.000	715.342.864			735,917,280			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kleggen	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	369.531.000	369.531.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	439,917,280	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kleggen	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	311.400.000	345.811.864	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	296,000,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													311.529.000	325.005.708			357,467,830			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	78.300.000	88.110.245	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	85,600,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													566.312.000	592.162.738			632,180,920			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													566.312.000	592.162.738			632,180,920			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													566.312.000	592.162.738			632,180,920			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	339.512.000	339.512.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	404,180,920	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	226.800.000	252.650.738	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	228,000,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													214.906.000	236.153.900			237,783,600			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													214.906.000	236.153.900			237,783,600			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													214.906.000	236.153.900			237,783,600			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	128.506.000	128.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	152,983,600	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	86.400.000	107.647.900	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	84,800,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													195.505.000	202.761.734			169,777,800			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah							
			Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
								Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target			
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
1	1	2												195.505.000	202.761.734			169,777,800							
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										195.505.000	202.761.734			169,777,800							
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	149.605.000	149.605.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	118,577,800	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	45.900.000	53.156.734	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	51,200,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														240.252.000	254.297.817				296,314,220	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														240.252.000	254.297.817				296,314,220	
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															240.252.000	254.297.817				296,314,220	
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	170.952.000	170.952.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	203,514,220	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	69.300.000	83.345.817	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	92,800,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														344.437.000	364.723.856				372,472,500	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														344.437.000	364.723.856				372,472,500	
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															344.437.000	364.723.856				372,472,500	
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	198.637.000	198.637.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	236,472,500	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	145.800.000	166.086.856	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	136,000,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													420.539.000	450.129.000			469,198,860			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													420.539.000	450.129.000			469,198,860			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													420.539.000	450.129.000			469,198,860			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	273.839.000	273.839.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	325,998,860	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	146.700.000	176.290.000	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	143,200,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													181.448.000	184.868.960			166,633,780			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													181.448.000	184.868.960			166,633,780			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													181.448.000	184.868.960			166,633,780			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	151.748.000	151.748.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	133,033,780	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	29.700.000	33.120.960	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	33,600,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													546.005.000	573.024.745			618,648,280			

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
				Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													546.005.000	573.024.745				618,648,280		
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													546.005.000	573.024.745				618,648,280		
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	365.105.000	365.105.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	434,648,280	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	180.900.000	207.919.745	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	184,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													352.748.000	366.608.000				378,895,129		
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													352.748.000	366.608.000				378,895,129		
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													352.748.000	366.608.000				378,895,129		
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	206.048.000	206.048.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	245,295,129	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	146.700.000	160.560.000	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	133,600,000	Dinas Pendidikan
1	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													242.751.000	252.593.000				287,532,690		
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													242.751.000	252.593.000				287,532,690		
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													242.751.000	252.593.000				287,532,690		
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	168.951.000	168.951.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	201,132,690	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Target	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	73.800.000	83.642.000	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	86,400,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													338.124.000	355.494.000			360,914,286			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													338.124.000	355.494.000			360,914,286			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													338.124.000	355.494.000			360,914,286			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	184.224.000	184.224.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	219,314,286	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	153.900.000	171.270.000	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	141,600,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													629.790.000	657.766.416			714,249,500			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													629.790.000	657.766.416			714,249,500			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													629.790.000	657.766.416			714,249,500			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	371.490.000	371.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	442,249,500	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	258.300.000	286.276.416	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	272,000,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													575.319.000	614.434.431			609,331,850			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													575.319.000	614.434.431				609,331,850			
1	1 2 02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													575.319.000	614.434.431				609,331,850			
1	1 2 02:01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	303.519.000	303.519.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	361,331,850	Dinas Pendidikan	
1	1 2 02:01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	271.800.000	310.915.431	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	248,000,000	Dinas Pendidikan	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													255.196.000	270.033.516				283,204,293			
1	1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													255.196.000	270.033.516				283,204,293			
1	1 2 02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													255.196.000	270.033.516				283,204,293			
1	1 2 02:01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	jumlah lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	141.796.000	141.796.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	168,804,293	Dinas Pendidikan	
1	1 2 02:01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	jumlah lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	113.400.000	128.237.516	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	114,400,000	Dinas Pendidikan	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													271.702.000	284.253.623				305,840,036			
1	1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													271.702.000	284.253.623				305,840,036			
1	1 2 02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													271.702.000	284.253.623				305,840,036			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
			Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
								Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Target	Target
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	168.202.000	168.202.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	200,240,036	Dinas Pendidikan	
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	103.500.000	116.051.623	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	105,600,000	Dinas Pendidikan	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													261.849.000	274.269.632				309,839,615			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													261.849.000	274.269.632				309,839,615			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													261.849.000	274.269.632				309,839,615			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	157.449.000	157.449.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	187,439,615	Dinas Pendidikan	
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	104.400.000	116.820.632	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	122,400,000	Dinas Pendidikan	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													1.045.977.000	1.097.248.875				1,132,982,190			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													1.045.977.000	1.097.248.875				1,132,982,190			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													1.045.977.000	1.097.248.875				1,132,982,190			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	599.577.000	599.577.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	713,782,190	Dinas Pendidikan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	446.400.000	497.671.875	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	419.200.000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													610.948.000	644.193.734			661.990.550			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													610.948.000	644.193.734			661.990.550			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													610.948.000	644.193.734			661.990.550			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	309.448.000	309.448.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	368.390.550	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	301.500.000	334.745.734	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	293.600.000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													742.790.000	830.852.919			766.674.356			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													742.790.000	830.852.919			766.674.356			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													742.790.000	830.852.919			766.674.356			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	339.590.000	358.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	404.274.356	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	403.200.000	472.062.919	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	362.400.000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													291.442.000	305.122.000			339.969.075			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													291.442.000	305.122.000				339,969,075				
1 1 2 02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													291.442.000	305.122.000				339,969,075				
1 1 2 02:01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	180.742.000	180.742.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	215,169,075	Dinas Pendidikan		
1 1 2 02:01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	110.700.000	124.380.000	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	124,800,000	Dinas Pendidikan		
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													226.172.000	235.022.000				335,952,900				
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													226.172.000	235.022.000				335,952,900				
1 1 2 02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													226.172.000	235.022.000				335,952,900				
1 1 2 02:01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	144.272.000	144.272.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	171,752,900	Dinas Pendidikan		
1 1 2 02:01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	81.900.000	90.750.000	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	164,200,000	Dinas Pendidikan		
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													600.882.000	637.855.667				614,321,700				
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													600.882.000	637.855.667				614,321,700				
1 1 2 02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													600.882.000	637.855.667				614,321,700				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah	Target	Target
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah											
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	308.382.000	308.382.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	367,121,700	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	292.500.000	329.473.667	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	247,200,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													251.041.000	264.714.195				286,258,693		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													251.041.000	264.714.195				286,258,693		
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													251.041.000	264.714.195				286,258,693		
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	137.641.000	137.641.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	163,858,693	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	113.400.000	127.073.195	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	122,400,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													553.352.000	585.032.034				589,209,705		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													553.352.000	585.032.034				589,209,705		
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													553.352.000	585.032.034				589,209,705		
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	261.752.000	261.752.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	311,609,705	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	291.600.000	323.280.034	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	277,600,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													200.015.000	207.515.414			236,798,586			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													200.015.000	207.515.414			236,798,586			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													200.015.000	207.515.414			236,798,586			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	153.215.000	153.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	182,398,586	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	46.800.000	54.300.414	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	54,400,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													281.224.000	305.120.911			363,304,570			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													281.224.000	305.120.911			363,304,570			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													281.224.000	305.120.911			363,304,570			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	139.024.000	139.024.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	165,504,570	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	142.200.000	166.096.911	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	197,800,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													603.656.000	648.346.001			681,724,400			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													603.656.000	648.346.001			681,724,400			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		Target			Target			
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah										
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													603.656.000	648.346.001			681,724,400			
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	330.056.000	330.056.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	392,924,400	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	273.600.000	318.290.001	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	288,800,000	Dinas Pendidikan
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													207.859.000	216.479.411			248,980,000			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													207.859.000	216.479.411			248,980,000			
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													207.859.000	216.479.411			248,980,000			
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	143.959.000	143.959.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	171,380,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	63.900.000	72.520.411	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	77,600,000	Dinas Pendidikan
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													514.177.000	557.788.200			546,415,700			
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													514.177.000	557.788.200			546,415,700			
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													514.177.000	557.788.200			546,415,700			
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	243.277.000	243.277.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	289,615,700	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	270.900.000	314.511.200	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	256,800,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													353.213.000	370.971.854			382,877,590			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													353.213.000	370.971.854			382,877,590			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													353.213.000	370.971.854			382,877,590			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	199.313.000	199.313.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	237,277,590	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	153.900.000	171.658.854	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	145,600,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													766.659.000	809.844.446			813,561,170			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													766.659.000	809.844.446			813,561,170			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													766.659.000	809.844.446			813,561,170			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	376.959.000	376.959.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	448,761,170	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	389.700.000	432.885.446	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	364,800,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													184.658.000	197.224.904			203,473,290			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													184.658.000	197.224.904			203,473,290			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Target	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												184.658.000	197.224.904			203,473,290				
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	117.158.000	117.158.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	139,473,290	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	67.500.000	80.066.904	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	64,000,000	Dinas Pendidikan
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												276.379.000	293.313.595			298,922,786				
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												276.379.000	293.313.595			298,922,786				
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												276.379.000	293.313.595			298,922,786				
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	181.879.000	181.879.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	216,522,786	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	94.500.000	111.434.595	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	82,400,000	Dinas Pendidikan
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												604.914.000	664.818.373			647,064,695				
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												604.914.000	664.818.373			647,064,695				
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												604.914.000	664.818.373			647,064,695				
1	1	2	02:01	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	301.614.000	301.614.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	359,064,695	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja											Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	303.300.000	363.204.373	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	288.000.000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													629.823.000	695.336.252			672.003.750			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													629.823.000	695.336.252			672.003.750			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													629.823.000	695.336.252			672.003.750			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	342.723.000	342.723.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	408.003.750	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	287.100.000	352.613.252	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	264.000.000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													782.519.000	823.656.234			858.112.742			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													782.519.000	823.656.234			858.112.742			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													782.519.000	823.656.234			858.112.742			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	406.319.000	406.319.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	483.712.742	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	376.200.000	417.337.234	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	374.400.000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													309.288.000	325.047.814			369.585.858			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													309.288.000	325.047.814			369.585.858			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah							
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Target	Target	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													309.288.000	325.047.814				369,585,858				
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	218.388.000	218.388.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	259,985,858	Dinas Pendidikan	
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	90.900.000	106.659.814	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	109,600,000	Dinas Pendidikan	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														939.739.000	993.885.533				1,008,308,056		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															939.739.000	993.885.533				1,008,308,056	
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															939.739.000	993.885.533				1,008,308,056	
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	480.739.000	480.739.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	572,308,056	Dinas Pendidikan	
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	459.000.000	513.146.533	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	436,000,000	Dinas Pendidikan	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															665.563.000	702.024.683				715,537,400	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															665.563.000	702.024.683				715,537,400	
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															665.563.000	702.024.683				715,537,400	
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	363.163.000	363.163.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	432,337,400	Dinas Pendidikan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	302.400.000	338.861.683	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	283,200,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													544.682.000	584.273.165			581,417,250			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													544.682.000	584.273.165			581,417,250			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													544.682.000	584.273.165			581,417,250			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	277.382.000	277.382.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	330,217,250	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	267.300.000	306.891.165	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	251,200,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													378.913.000	399.008.887			420,972,900			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													378.913.000	399.008.887			420,972,900			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													378.913.000	399.008.887			420,972,900			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	231.313.000	231.313.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	275,372,900	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	147.600.000	167.695.887	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	145,600,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													494.244.000	513.504.139			577,071,300			

Kode	Kategori	Sub Kategori	Kode Sub Kategori	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah										
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
										Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah												
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																										
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																			577,071,300							
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	321.444.000	321.444.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	382,671,300	Dinas Pendidikan					
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	172.800.000	192.060.139	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	194,400,000	Dinas Pendidikan					
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			278.038.000	293.160.241				321,040,340		
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																				278.038.000	293.160.241				321,040,340	
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																				278.038.000	293.160.241				321,040,340	
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Demangan	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	160.138.000	160.138.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	190,640,340	Dinas Pendidikan					
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Demangan	100%	100%	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	117.900.000	133.022.241	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	130,400,000	Dinas Pendidikan					
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				311.592.000	328.087.865				336,842,583	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																				311.592.000	328.087.865				336,842,583	
1	1	2	02:01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																				311.592.000	328.087.865				336,842,583	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Demangan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	166.692.000	166.692.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	198,442,583	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Demangan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	144.900.000	161.395.865	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	138,400,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													340.038.000	359.082.598				364,764,400		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													340.038.000	359.082.598				364,764,400		
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													340.038.000	359.082.598				364,764,400		
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Josenan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	180.738.000	180.738.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	215,164,400	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Josenan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	159.300.000	178.344.598	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	149,600,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													318.655.000	339.050.597				339,593,800		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													318.655.000	339.050.597				339,593,800		
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													318.655.000	339.050.597				339,593,800		
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Josenan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	162.955.000	162.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	193,993,800	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Target	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Josenan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	155.700.000	176.095.597	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	145,600,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													229.728.000	239.672.199			266,671,850			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													229.728.000	239.672.199			266,671,850			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													229.728.000	239.672.199			266,671,850			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Josenan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	151.428.000	151.428.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	180,271,850	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Josenan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	78.300.000	88.244.199	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	86,400,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													198.629.000	206.859.137			232,220,100			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													198.629.000	206.859.137			232,220,100			
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													198.629.000	206.859.137			232,220,100			
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Kejuron	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	152.729.000	152.729.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	181,820,100	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Kejuron	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	45.900.000	54.130.137	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	50,400,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													203.982.000	212.722.859			231,278,800			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah											
			Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
								Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target							
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah													
1	1	2													203.982.000	212.722.859				231,278,800									
1	1	2	02:01												203.982.000	212.722.859				231,278,800									
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	162,478,800	Dinas Pendidikan						
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	67.500.000	76.240.859	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	68,800,000	Dinas Pendidikan				
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		1.762.439.941	1.989.411.630			2,405,906,750		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																			1.762.439.941	1.989.411.630			2,405,906,750	
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			1.762.439.941	1.989.411.630			2,405,906,750	
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	1,102,906,750	Dinas Pendidikan						
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	836.000.000	1.062.971.689	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	1,303,000,000	Dinas Pendidikan				
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			1.649.351.000	2.127.826.132			1,704,417,339	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																			1.649.351.000	2.127.826.132			1,704,417,339	
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			1.649.351.000	2.127.826.132			1,704,417,339	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Target	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Pandean	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	806.751.000	806.751.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	960,417,339	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Pandean	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	842.600.000	1.321.075.132	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	744,000,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													1.220.414.000	1.305.725.881				1,296,468,801		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													1.220.414.000	1.305.725.881				1,296,468,801		
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													1.220.414.000	1.305.725.881				1,296,468,801		
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	607.714.000	607.714.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	723,468,801	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	612.700.000	698.011.881	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	573,000,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													1.646.583.000	1.848.587.362				1,782,884,010		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													1.646.583.000	1.848.587.362				1,782,884,010		
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													1.646.583.000	1.848.587.362				1,782,884,010		
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Kejuron	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	753.383.000	753.383.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	896,884,010	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Kejuron	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	893.200.000	1.095.204.362	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	886,000,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													1.061.608.000	1.226.421.042			909,271,000			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													1.061.608.000	1.226.421.042			909,271,000			
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													1.061.608.000	1.226.421.042			909,271,000			
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	580.908.000	580.908.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	447,271,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	480.700.000	645.513.042	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	462,000,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													1.407.569.000	1.561.769.000			1,498,058,200			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													1.407.569.000	1.561.769.000			1,498,058,200			
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													1.407.569.000	1.561.769.000			1,498,058,200			
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Pandean	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	712.369.000	712.369.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	848,058,200	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Pandean	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	695.200.000	849.400.000	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	650,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Target	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	814.886.000	814.886.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	970,102,100	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	455.400.000	605.788.805	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	439,000,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													1.386.742.000	1.517.254.623				1,508,883,300		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													1.386.742.000	1.517.254.623				1,508,883,300		
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													1.386.742.000	1.517.254.623				1,508,883,300		
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	832.342.000	832.342.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	990,883,300	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	554.400.000	684.912.623	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	518,000,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													1.435.100.000	1.520.692.499				1,223,024,860		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													1.435.100.000	1.520.692.499				1,223,024,860		
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													1.435.100.000	1.520.692.499				1,223,024,860		
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	733.300.000	733.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	572,024,860	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah	Target	Target
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah											
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Taman, Maniarejo	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	701.800.000	787.392.499	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	651.000.000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													1.356.116.000	1.519.718.827			1.511.113.997			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													1.356.116.000	1.519.718.827			1.511.113.997			
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													1.356.116.000	1.519.718.827			1.511.113.997			
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	662.016.000	662.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	788.113.997	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	694.100.000	857.702.827	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	723.000.000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													1.379.671.000	1.790.022.814			1.446.870.600			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													1.379.671.000	1.790.022.814			1.446.870.600			
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													1.379.671.000	1.790.022.814			1.446.870.600			
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	606.371.000	606.371.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	721.870.600	Dinas Pendidikan
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persentase lembaga yang melaksanakan standar penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Jumlah Lembaga	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	100%	100%	100%	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%	100%	773.300.000	1.183.651.814	DAK Non Fisik BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	725.000.000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													845.763.000	912.392.922			925.836.936			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah								
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target				
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
1	2			Persentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu					41%	41%								133,666,871,180							
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										22.236.015.956	28.829.705.140			23,504,338,128							
1	2	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20.962.015.956	27.555.705.140			20,962,015,956							
1	2	1	02:02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	20.962.015.956	27.555.705.140	Pendapatan dari BLUD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	20,962,015,956	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	1	02:08	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN Perangkat Daerah	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	1.274.000.000	1.274.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,296,540,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										85.053.294.550	110.080.031.785			110,162,533,052							
1	2	2	02:01	8 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keluarga Sehat	perentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,39 Indek	0,39 Indek	100%	100%	2 unit	2 unit	50%	50%	2.763.520.000	2.393.367.785	DBH CHT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	02:01	12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	perentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana kesehatan yang diadakan	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,39 Indek	0,39 Indek	100%	100%	2 unit	2 unit	50%	50%	3.114.374.000	3.097.330.550	DBH CHT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	2,744,343,673	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	02:01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	perentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Persentase indikator SPM mencapai target			0,39 Indek		100%		20 jenis		50%	-	697.841.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	02:01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	perentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,39 Indek	0,39 Indek	100%	100%	32 jenis	32 jenis	50%	50%	3.020.650.000	7.079.020.185	Pendapatan dari BLUD	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	12,366,158,581	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
																			DBH CHT						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1 2 2 02:02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase TTU Sehat	Persentase indikator SPM mencapai target				0,39 Indeks	100%		85%		50%	-	74.217.270	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	74,217,270	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1 2 2 02:02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Persentase indikator SPM mencapai target				0,39 Indeks	100%		6 kegiatan		50%	-	95.854.050	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	95,854,050	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1 2 2 02:02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase respon KLB < 24 jam	Persentase indikator SPM mencapai target				0,39 Indeks	100%		100%		50%	-	15.205.830	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	15,205,830	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1 2 2 02:02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	Persentase indikator SPM mencapai target				0,39 Indeks	100%		100%		50%	-	21.546.250	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	21,546,250	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				Prosentase penyakit tidak menular yang angka kesakitan dan kematian						100%		62.5 %											
1 2 2 02:02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	PKP Puskesmas	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	0,39 Indeks	0,39 Indeks	100%	100%	88%	88%	50%	50%	2.016.602.840	2.485.579.700	Pendapatan dari BLUD	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	2,516,602,840	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
																	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																	DAK Non Fisik BOKKB - BOK						
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														722.140.000	15.027.350					687,167,350		
1 2 5 02:01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															15.027.350						15,027,350	
1 2 5 02:01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	terlaksananya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas	Jumlah kegiatan promosi, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun		61,50%		1 kegiatan			1 kegiatan		81.99 indeks		15.027.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62%		15,027,350	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1 2 5 02:02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														509.810.000							459,810,000	
1 2 5 02:02 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Persentase SPM puskesmas mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	61,50%	61,50%	100%	100%	0%	0%	81.99 indeks	81.99 indeks	509.810.000		DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62%		459,810,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1 2 5 02:03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														212.330.000							212,330,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target						
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur			
1.2.2.02:02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	PKP Puskesmas	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	0,39	Indek	0,39	Indek	100%	100%	92,66 %	92,66 %	50%	50%	2.514.274.240	2.981.649.500	Pendapatan dari BLUD	Indeks Keluarga Sehat	0,41	Indek	3.014,274,240	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																826.940.000	23.078.750				304,978,750		
1.2.5.02:01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																-	23.078.750				23,078,750		
1.2.5.02:01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Jumlah kegiatan promosi, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun			61,50%	1 kegiatan			1 kegiatan		81,99 indeks			-	23.078.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62%		23,078,750	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.5.02:02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																545.040.000	-				0		
1.2.5.02:02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Prosentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,50%	61,50%	100%	100%	0%	0%	81,99 indeks	81,99 indeks			545.040.000	-	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62%		0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.5.02:03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																281.900.000	-				281,900,000		
1.2.5.02:03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Prosentase puskesmas membina UKBM sesuai standart	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	61,50%	61,50%	42,86%	42,86%	33,33 %	33,33 %	81,99 indeks	81,99 indeks			281.900.000	-		Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62%		281,900,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																3.466.582.000	4.215.989.250				4,675,388,250		
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																2.687.530.000	3.931.228.000				3,927,625,000		
1.2.2.02:02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																2.687.530.000	3.931.228.000				3,927,625,000		
1.2.2.02:02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	Persentase indikator SPM mencapai target			0,39	Indek	100%			100%	50%			-	2.682.000	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41	Indek	2.682,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.2.02:02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase indikator SPM mencapai target			0,39	Indek	100%			100%	50%			-	7.623.000	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41	Indek	7.623,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah							
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target			
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
1	2	2	02:02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase indikator SPM mencapai target									10.426.500	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	10,426,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	02:02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	Persentase indikator SPM mencapai target									185.943.970	DAK Non Fisik BOKKB - BOKB	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	185,943,970	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	02:02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo								262.191.000	DBH CHT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	266,050,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
										Kota Madiun, Manguharjo, Winongan														
										Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor														
										Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul														
1	2	2	02:02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase TTU Sehat	Persentase indikator SPM mencapai target									62.438.700	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	62,438,700	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	02:02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Persentase indikator SPM mencapai target									159.078.900	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	159,078,900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	02:02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	Persentase indikator SPM mencapai target									7.751.280	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	7,751,280	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	02:02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	Persentase indikator SPM mencapai target									38.100.650	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	38,100,650	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
								Prosentase penyakit tidak menular yang angka kesakitan dan kematian	Persentase indikator SPM mencapai target															
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan								2.687.530.000	Pendapatan dari BLUD	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	3,187,530,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
																			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	2	5												779.052.000	284.761.250				747,763,250				
1	2	5	02:01												18.711.250				18,711,250				
1	2	5	02:01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Jumlah kegiatan promosi, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun						61,50%	1 kegiatan	1 kegiatan	81.99 indeks	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62%	18,711,250	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	02:02											513.002.000					463,002,000				
1	2	5	02:02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Persentase SPM yang mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,50%	61,50%	100%	100%	0%	0%	81.99 indeks	81.99 indeks	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62%	463,002,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	02:03											266.050.000	266.050.000				266,050,000				
1	2	5	02:03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Jumlah jenis fasilitasi kegiatan promotif preventif	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	61,50%	61,50%	42,86%	42,86%	33,33 %	33,33 %	81.99 indeks	81.99 indeks	DBH CHT	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62%	266,050,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2													3.236.161.720	3.638.761.530				4,504,377,270				
1	2	2												2.422.391.720	3.626.551.280				3,678,397,020				
1	2	2	02:02											2.422.391.720	3.626.551.280				3,678,397,020				
1	2	2	02:02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	Persentase indikator SPM mencapai target						0,39 Indek	100%	100%	50%	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	7,764,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	02:02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase indikator SPM mencapai target						0,39 Indek	100%	100%	50%	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	12,062,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	02:02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase indikator SPM mencapai target						0,39 Indek	100%	100%	50%	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	700	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	5	02:02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												580.632.000	-				580,632,000		
1	2	5	02:02	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan		61,50%	61,50%	100%	100%	0 persen	0 persen	81,99 indeks	81,99 indeks	DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62%	580,632,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	02:03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												346.215.000	-				346,215,000		
1	2	5	02:03	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	Jumlah jenis fasilitasi kegiatan promotif preventif	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan		61,50%	61,50%	42,86%	42,86%	33,33 persen	33,33 persen	81,99 indeks	81,99 indeks	DBH CHT	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62%	346,215,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3.534.853.600	3.866.693.520				4,877,186,500		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												2.673.853.600	3.832.521.520				3,982,014,500		
1	2	2	02:02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												2.673.853.600	3.832.521.520				3,982,014,500		
1	2	2	02:02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	Persentase indikator SPM mencapai target				0,39 Indek		100%		100%	50%		DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	12,612,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	02:02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase indikator SPM mencapai target				0,39 Indek		100%		100%	50%		DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	3,353,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	02:02	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase indikator SPM mencapai target				0,39 Indek		100%		100%	50%		DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	3,850,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	02:02	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase indikator SPM mencapai target				0,39 Indek		100%		100%	50%		DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	47,894,800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	02:02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	Persentase indikator SPM mencapai target				0,39 Indek		100%		100%	50%		DAK Non Fisik BOKKB - BOK	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	189,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	02:02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase indikator SPM mencapai target	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan			0,39 Indek		100%	12%		50%		DBH CHT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indek	326,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 14 3 02:03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													1.226.306.500	2.105.574.000				1,754,077,500		
2 14 3 02:03 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Menurunnya Unmeet Need	menurunnya angka drop out	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokon dan sarana penunjang pelayanan KB	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (kurang dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										51.766.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	51,766,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 3 02:03 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Menurunnya Unmeet Need	menurunnya angka drop out	Jumlah aseptor yang mendapatkan pelayanan KB baru MKJP	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (kurang dari)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 8 %	< 8 %	15%	15%	651 Aseptor	651 Aseptor	2.1 skor	2.1 skor	128.299.500	960.427.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	961,961,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 3 02:03 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Menurunnya Unmeet Need	menurunnya angka drop out	Jumlah paket pengadaan	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (kurang dari)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 8 %	< 8 %	15%	15%	2 paket	2 paket	2.1 skor	2.1 skor	1.098.007.000	1.093.381.000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB	Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	740,350,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 3 02:04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															152.112.000				152,112,000	
2 14 3 02:04 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Menurunnya Unmeet Need	persentase poktan, IMP dan pokja kampung KB yang menerima pembinaan kesertaan ber kb	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (kurang dari)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										152.112.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	152,112,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													210.526.080	257.495.200					542,979,000	
2 14 4 02:01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													210.526.080	257.495.200					542,979,000	
2 14 4 02:01 4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total (kurang dari)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									13.412.600	13.412.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	71%	88,020,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	Dana Insentif Daerah				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 23 1 02:09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase Gedung yang Layak Digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	2 unit	100 %	25.25 skor	25.25 skor	49.650.000	79.757.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 1 02:09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Layak Digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	78 unit	100 %	25.25 skor	25.25 skor	44.650.000	44.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														1.225.410.000	1.225.410.000				9,119,000,000			
2 23 2 02:01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														802.410.000	802.410.000				1,644,000,000			
2 23 2 02:01 1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Persentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah Perpustakaan Elektronik yang Dipelihara	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.59 %	5.59 %	4%	4%	100000 orang	72 Perpustakaan	8.9 indeks	8.9 indeks	324.000.000	324.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	775,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 2 02:01 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Persentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah paket	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.59 %	5.59 %	4%	4%	2 paket	2 paket	8.9 indeks	8.9 indeks	226.720.000	226.720.000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 2 02:01 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Persentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak atau digitalisasi yang diadakan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.59 %	5.59 %	4%	4%	3500 eksemplar	105 eksemplar	8.9 indeks	8.9 indeks	251.690.000	51.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	355,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 2 02:01 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Persentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.59 %		4%		2600 eksemplar		8.9 indeks	-	200.190.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	364,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 2 02:02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														423.000.000	423.000.000				7,475,000,000			
2 23 2 02:02 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	Jumlah Lembaga	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.59 %	5.59 %	20 kali	20 kali	10 lembaga	10 lembaga	8.9 indeks	8.9 indeks	338.000.000	338.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	475,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 2 02:02 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	Jumlah paket	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.59 %	5.59 %	20 kali	20 kali	1 paket	1 paket	8.9 indeks	8.9 indeks	85.000.000	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	7,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
TOTAL															525.634.860.163	601.088.275.057				6,991,694,600			

Prioritas III : Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	19															4.709.317.280	4.211.951.630			6.650.000.000			
2	19	2														700.000.000	700.000.000			1.100.000.000			
2	19	2	02:01													700.000.000	700.000.000			1.100.000.000			
2	19	2	02:01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Prestasi Pemuda	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah prestasi pemuda	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 orang	12 orang	2 event	2 event	8 orang	8 orang	12 orang	2 orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Prestasi Pemuda	12 orang	1.100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3														4.009.317.280	3.511.951.630			5.550.000.000			
2	19	3	02:01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											1.683.197.280	1.839.199.780			2.500.000.000			
2	19	3	02:01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Medali yang diraih di Bidang Olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	Jumlah sarpras olahraga yang terfasilitasi	Jumlah medali olahraga yang diraih	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 medali	35 medali	3 sarana prasarana olahraga	3 sarana prasarana olahraga	3 sarpras olahraga	3 sarpras olahraga	33 medali	20 medali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Medali yang diraih di Bidang Olahraga	35 medali	2.500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	02:02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											1.026.120.000	450.508.750			1.300.000.000			
2	19	3	02:02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Medali yang diraih di Bidang Olahraga	Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah medali olahraga yang diraih	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 medali	35 medali	2 event	2 event	2 event	2 event	33 medali	20 medali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Medali yang diraih di Bidang Olahraga	35 medali	1.300.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	02:04	2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																1.000.000.000		
2	19	3	02:04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diraih di Bidang Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah medali olahraga yang diraih	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 medali	35 medali	10 cabang olahraga	10 cabang olahraga	10 cabang olahraga	10 cabang olahraga	33 medali	20 medali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Medali yang diraih di Bidang Olahraga	35 medali	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	02:05	1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																300.000.000	222.243.100	
2	19	3	02:05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Medali yang diraih di Bidang Olahraga	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Jumlah medali olahraga yang diraih	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 medali	35 medali	2 festival olahraga	2 festival olahraga	2 festival olahraga	1 festival olahraga	33 medali	20 medali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Medali yang diraih di Bidang Olahraga	35 medali	750.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											9.578.463.000	7.897.645.102			11.952.000.000			
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5.928.463.000	5.748.993.860			6.182.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2 22 1 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													40.000.000	29.350.000			44.000.000				
2 22 1 02:01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat	Jumlah dokumen perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	25 satuan skor	25 satuan skor	40.000.000	29.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	44.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2 22 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3.184.463.000	3.004.080.500			3.200.000.000				
2 22 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25 satuan skor	25 satuan skor	3.184.463.000	3.004.080.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	3.200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2 22 1 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													299.700.000	149.492.000			300.000.000				
2 22 1 02:06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25 satuan skor	25 satuan skor	299.700.000	149.492.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	300.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2 22 1 02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													-	201.550.000			100.000.000				
2 22 1 02:07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		100%		100%	25 satuan skor		-	201.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2 22 1 02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2.124.650.000	2.048.571.360			2.200.000.000				
2 22 1 02:08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25 satuan skor	25 satuan skor	2.124.650.000	2.048.571.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2.200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2 22 1 02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													279.650.000	315.950.000			338.000.000				
2 22 1 02:09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak diparkir	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak diparkir	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25 satuan skor	25 satuan skor	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	78.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2 22 1 02:09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak diparkir	Persentase gedung yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25 satuan skor	25 satuan skor	175.000.000	235.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2 22 1 02:09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak diparkir	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25 satuan skor	25 satuan skor	54.650.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	60.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2 22 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													3.250.000.000	1.824.765.097			4.800.000.000				
2 22 2 02:02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota													3.250.000.000	1.824.765.097			4.800.000.000				
2 22 2 02:02 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Jumlah keragaman budaya yang difasilitasi	Jumlah Obyek Pemajuan Budaya yang dimanfaatkan	Prosentase budaya daerah yang dilestarikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5%	5%	8 budaya	8 budaya	11 obyek	4 obyek	5%	5%	2.250.000.000	1.295.979.461	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	6%	3.200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
3	26	5	02:01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan Sektor Kepariwisataa	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.68 %	18.68 %	2 event	2 event	10 orang	10 orang	350000 orang	250000 orang	600.000.000	328.410.595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan Sektor Kepariwisataa	19%	700,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
4	1				SEKRETARIAT DAERAH														7.968.050.600	6.631.938.710				11,016,129,000	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														7.968.050.600	6.631.938.710				8,107,129,000	
4	1	2	02:02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat														7.968.050.600	6.631.938.710				8,107,129,000	
4	1	2	02:02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	jumlah fasilitas bina mental spiritual	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,08 Nilai	80,08 Nilai	100%	100%	15 kegiatan	15 kegiatan	93.75 %	93.75 %	7.968.050.600	6.631.938.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	8,107,129,000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														6.959.584.517	6.959.584.517				7,259,584,517	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														3.538.352.867	3.596.355.223				3,888,352,867	
8	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														30.700.000	30.700.000				112,116,200	
8	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat	Jumlah dokumen perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	65 skor	65 skor	30.700.000	30.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	112,116,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														2.887.145.114	2.887.145.114				2,887,145,114	
8	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Prosentase kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	2.887.145.114	2.887.145.114	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2,887,145,114	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														563.115.753	621.118.109				581,699,553	
8	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	524.115.753	582.118.109	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	542,699,553	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum	Prosentase pemenuhan perjalanan dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	39.000.000	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	39,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														57.392.000	57.392.000				57,392,000	
8	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	24.892.000	24.892.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	24,892,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	7.500.000	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	7,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Prosentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah													
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target														
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum				Sesudah												
8	1	2													289.298.500	275.008.050				689,298,500												
8	1	2	02:01												289.298.500	275.008.050				689,298,500												
8	1	2	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	Meningkatnya Kerukunan masyarakat dan Kenyamanan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								100	100	1100 orang	1100 orang	1100 orang	1100 orang	100%	100%	289.298.500	275.008.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	0	689,298,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3													871.058.100	871.058.100				921,058,100												
8	1	3	02:01												871.058.100	871.058.100				921,058,100												
8	1	3	02:01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	Prosentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	Jumlah peserta pengelolaan keuangan Parpol	Meningkatnya partisipasi Orkemas dalam Pembangunan Daerah	Kota Madiun, Taman, Banjarejo								100	100	80%	80%	22 orang	22 orang	100%	100%	725.062.000	725.062.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	0	725,062,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	Prosentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	Jumlah peserta pembinaan	Meningkatnya partisipasi Orkemas dalam Pembangunan Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								100	100	80%	80%	100 orang	100 orang	100%	100%	145.996.100	145.996.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	0	195,996,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4													272.985.000	272.985.000				222,985,000												
8	1	4	02:01												272.985.000	272.985.000				222,985,000												
8	1	4	02:01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Orkemas berbadan hukum	Jumlah Orkemas yang aktif	Jumlah peserta fasilitasi	Meningkatnya partisipasi Orkemas dalam Pembangunan Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								45	45	100 orkemas	100 orkemas	100 orang	100 orang	100%	100%	272.985.000	272.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Orkemas berbadan hukum	0	222,985,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
8	1	5													484.692.000	478.075.400			484.692.000						
8	1	5	02:01												484.692.000	478.075.400			484.692.000						
8	1	5	02:01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi	Jumlah peserta sosialisasi	Meningkatnya Kerukunan masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	3 kali	3 kali	100 orang	100 orang	100%	100%	95.000.000	88.383.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	95,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Meningkatnya Kerukunan masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	3 kali	3 kali	200 orang	200 orang	100%	100%	389.692.000	389.692.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	389,692,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6																		1.503.198.050	1.466.102.744			1,053,198,050	
8	1	6	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial															1.503.198.050	1.466.102.744			1,053,198,050	
8	1	6	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Konflik horisontal di dalam masyarakat	Jumlah konflik	Jumlah konflik	Meningkatnya Kerukunan masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Konflik	0 Konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	100%	100%	1.503.198.050	1.466.102.744	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 Konflik	1,053,198,050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL														30.940.415.397	26.753.679.554				20,822,000,000						

Prioritas IV : Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah							
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Target								
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur					
1	3													135.786.681.372	138.083.927.735			198,350,000,000							
1	3	1												10.318.181.500	10.782.231.013			10,650,000,000							
1	3	1	02:01											39.666.240	39.666.240			50,000,000							
1	3	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan	Jumlah Dok.Perencanaan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	8 dokumen	8 dokumen	65 skor	65 skor	39.666.240	39.666.240	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02:02											6.134.492.500	6.398.340.528			6,500,000,000							
1	3	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks RB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	6.134.492.500	6.398.340.528	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02:06											222.044.000	222.044.000			250,000,000							
1	3	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks RB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	60 kali	60 kali	65 skor	65 skor	222.044.000	222.044.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02:07											82.423.855	236.408.040			300,000,000							
1	3	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Indeks RB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	2 paket	2 paket	65 skor	65 skor	82.423.855	236.408.040	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02:08											3.166.896.705	3.166.896.705			3,000,000,000							
1	3	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor pemerintah daerah	Indeks RB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	10 jenis	10 jenis	65 skor	65 skor	3.166.896.705	3.166.896.705	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02:09											672.658.200	718.875.500			550,000,000							
1	3	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang yang layak digunakan	Jumlah kendaraan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	59 buah	59 buah	65 skor	65 skor	315.408.200	361.675.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang yang layak	Jumlah gedung	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	1 gedung	1 gedung	65 skor	65 skor	357.250.000	357.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2												12.926.919.000	12.071.694.650			27,700,000,000							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	4	2	02:01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Prosentase Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	99,57 %	99,60%	76.500.000	76.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengembangan Perumahan	100 persen	566,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	02:03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													716.150.000	1.216.150.000				1,110,950,000		
1	4	2	02:03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan Perumahan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program Kota	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	99,57 %	99,60%	716.150.000	1.216.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengembangan Perumahan	100 persen	1,110,950,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													7.283.665.460	7.283.612.424				4,264,200,000		
1	4	3	02:02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha													509.286.000	540.097.450				504,000,000		
1	4	3	02:02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,5 persen	98,5 persen	0,50%	0,50%	1 dokumen	1 dokumen	99,57 %	99,60%	209.286.000	209.286.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	98,5 persen	204,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	02:02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang	Indeks Perumahan Permukiman	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,5 persen	98,5 persen	0,50%	0,50%	1 dokumen	1 dokumen	99,57 %	99,60%	300.000.000	330.811.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	98,5 persen	300,000,000	
1	4	3	02:03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha													6.774.379.460	6.743.514.974				3,760,200,000		
1	4	3	02:03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah dokumen kajian/perencanaan	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,5 persen	98,5 persen	0,50%	0,50%	3 dokumen	5 dokumen	99,57 %	99,60%	203.850.000	416.374.334	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	98,5 persen	203,850,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	02:03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,5 persen	98,5 persen	0,50%	0,50%	100%	100%	99,57 %	99,60%	2.797.850.000	2.745.395.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	98,5 persen	2,800,350,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	02:03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,5 persen	98,5 persen	0,50%	0,50%	3 lokasi	3 lokasi	99,57 %	99,60%	3.772.679.460	3.581.745.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	98,5 persen	756,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													17.953.869.840	18.733.618.740				8,954,200,000		
1	4	5	02:01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													17.953.869.840	18.733.618.740				8,954,200,000		
1	4	5	02:01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	Jumlah lokasi Prasarana, sarana dan utilitas umum yang disediakan	Indeks Pengelolaan PSU, RTLH, PJU dan Pemukiman	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	100%	100%	3 kecamatan	3 kecamatan	99,57 %	76,34%	17.953.869.840	18.733.618.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 persen	8,854,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													18.264.182.751	19.223.263.026				41,062,157,735		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 15 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													11.127.415.071	11.195.093.061			11,125,967,095			
2 15 1	02:01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													132.017.376	132.017.376			102,089,400			
2 15 1	02:01 6 Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase penuhuan dokumen perencanaan pengendalian dan pemeriksaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	65 Skor	65 Skor	132.017.376	132.017.376	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	102,089,400	Dinas Perhubungan
2 15 1	02:02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													6.686.758.079	5.825.860.879			6,686,758,079			
2 15 1	02:02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase penuhuan dokumen administrasi	Persentase penuhuan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	6.686.758.079	5.825.860.879	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6,686,758,079	Dinas Perhubungan
2 15 1	02:05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													320.400.000	320.400.000			320,400,000			
2 15 1	02:05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase penuhuan pakaian dinas beserta aksesorisnya	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	220.000.000	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	220,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 1	02:05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang paham	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	100.400.000	100.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	100,400,000	Dinas Perhubungan
2 15 1	02:06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													200.000.000	200.000.000			200,000,000			
2 15 1	02:06 9 Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase penuhuan dokumen administrasi	Persentase penuhuan kebutuhan peralatan dinas	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 1	02:07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													466.550.000	421.602.795			30,000,000			
2 15 1	02:07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase penuhuan dokumen administrasi	Jumlah peralatan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	10 unit	10 unit	65 Skor	65 Skor	466.550.000	421.602.795	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	30,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 1	02:08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1.871.689.616	2.767.889.011			2,336,719,616			
2 15 1	02:08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase penuhuan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Persentase penuhuan peralatan/perlen- gkapan kantor yang peralatan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	1.871.689.616	2.767.889.011	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2,336,719,616	Dinas Perhubungan
2 15 1	02:09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1.450.000.000	1.527.323.000			1,450,000,000			
2 15 1	02:09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase penuhuan kebutuhan kendaraan dinas/operasion- al (perhitungan =	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	650.000.000	673.485.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	650,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 1	02:09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak dimanfaatkan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	650.000.000	655.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	650,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 1	02:09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase peralatan gedung kantor yang layak	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	150.000.000	198.038.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	150,000,000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 15 2 02:06 3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Jumlah MRL	Jumlah uji coba dan sosialisasi	Kepadatan lalu lintas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	84%	160 MRL	160 MRL	5 Kegiatan	5 Kegiatan	46 Kend/Km	46 Kend/Km	123.000.000	68.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88%	170,140,000	Dinas Perhubungan
2 15 2 02:06 4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Jumlah MRL	Jumlah kegiatan	Kepadatan lalu lintas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	84%	160 MRL	160 MRL	2 Kegiatan	2 Kegiatan	46 Kend/Km	46 Kend/Km	1.359.050.880	1.385.643.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88%	1,064,725,000	Dinas Perhubungan
2 15 2 02:06 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Jumlah MRL	Jumlah forum	Kepadatan lalu lintas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	84%	160 MRL	160 MRL	12 Forum	12 Forum	46 Kend/Km	46 Kend/Km	92.000.000	92.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88%	92,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 2 02:08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan													247.884.000	247.884.000				115,884,000		
2 15 2 02:08 2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Jumlah kegiatan keselamatan	Nilai akreditasi	Kepadatan lalu lintas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	84%	100%	100%	1 lulus	1 lulus	46 Kend/Km	46 Kend/Km	205.502.000	205.502.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88%	73,502,000	Dinas Perhubungan
2 15 2 02:08 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Jumlah kegiatan keselamatan	Jumlah kegiatan	Kepadatan lalu lintas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	84%	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	46 Kend/Km	46 Kend/Km	42.382.000	42.382.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88%	42,382,000	Dinas Perhubungan
2 15 2 02:09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													1.864.170.560	1.316.764.635				1,864,170,560		
2 15 2 02:09 1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Kinerja angkutan	Jumlah kendaraan	Kepadatan lalu lintas	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	84%	40%	40%	41 kendaraan	41 kendaraan	46 Kend/Km	46 Kend/Km	1.864.170.560	1.316.764.635	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88%	1,864,170,560	Dinas Perhubungan
TOTAL														189.467.896.043	193.929.890.235				41,062,157,735		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	5	1	02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														456.092.000	498.790.000			495.000,000				
1	5	1	02:08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Score	65 Score	456.092.000	498.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	495,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														197.500.000	220.092.000			220,000,000				
1	5	1	02:09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Score	65 Score	157.500.000	170.092.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	160,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	1	02:09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Score	65 Score	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	35,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	1	02:09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Indeks RB	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Score	65 Score	15.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														1.388.869.000	1.377.859.000			1,500,000,000				
1	5	3	02:01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														103.880.000	72.211.000			200,000,000				
1	5	3	02:01	2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103.880.000	72.211.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100%	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	3	02:02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														1.198.689.000	1.208.120.000			1,300,000,000				
1	5	3	02:02	2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.253.000	92.253.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100%	260,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	3	02:02	6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78.686.000	75.717.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100%	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	3	02:02	7 Penanganan Pasca-bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase dokumen yang disusun	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86.350.000	111.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100%	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	3	02:02	8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	941.400.000	928.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100%	860,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	3	02:03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														86.300.000	97.528.000			0				
1	5	3	02:03	4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86.300.000	97.528.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021												Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											1.066.231.000	1.285.321.000				1.799,306,000				
1	5	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN											1.066.231.000	1.285.321.000				1.799,306,000				
1	5	4	02:01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											1.022.948.000	1.231.221.000				1,022,948,000				
1	5	4	02:01	1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	100%	100%	100%	80%	80%	100%	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	776,358,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4	02:01	2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kasus Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		246.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	246,590,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4	02:02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran												43.283.000	54.100.000				776,358,000			
1	5	4	02:02	1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	Prosentase Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang didata	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	100%	90%	90%	90%	90%	100%	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	776,358,000	Satuan Polisi Pamong Praja
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												120.000.000	205.000.000				135,000,000			
2	10	2		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI												-	85.000.000					15,000,000		
2	10	2	02:01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												-	85.000.000					15,000,000		
2	10	2	02:01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	Prosentase pemberian izin lokasi	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	Indeks Perumahan Permukiman			100%	100%			100%		99,60%			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100%	15,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH												120.000.000	120.000.000					120,000,000		
2	10	10	02:01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota												120.000.000	120.000.000					120,000,000		
2	10	10	02:01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Indeks Perumahan Permukiman	Semua Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,60%	99,60%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penatagunaan Tanah	100%	120,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												25.772.432.500	25.762.500.100					47,121,041,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2	11	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	65 skor	15.89 angka	70.000.000	185.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP													475.000.000	428.000.000				475,000,000		
2	11	2	02:01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota													319.200.000	278.000.000				375,000,000		
2	11	2	02:01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	jumlah dokumen yang disusun	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,23%	69,23%	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	77.39 & 85.94	51.29 & 83.27	319.200.000	278.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	71.79 %	375,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	02:02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota													155.800.000	150.000.000				100,000,000		
2	11	2	02:02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	jumlah dokumen yang disusun	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,23%	69,23%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	77.39 & 85.94	51.29 & 83.27	155.800.000	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	71.79 %	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													1.369.000.000	1.253.075.365				2,085,000,000		
2	11	3	02:01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota													1.050.000.000	934.075.365				1,650,000,000		
2	11	3	02:01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahannya	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48%	48%	68 kegiatan/ usaha	68 kegiatan/ usaha	20 kali	20 kali	77.39 & 85.94	51.29 & 83.27	670.000.000	555.992.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	49%	1,100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	02:01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahannya	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48%	48%	68 kegiatan/ usaha	68 kegiatan/ usaha	1 dokumen	3 kegiatan	77.39 & 85.94	51.29 & 83.27	380.000.000	378.083.365	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	49%	550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	02:02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota													319.000.000	319.000.000				435,000,000		
2	11	3	02:02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah	jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48%	48%	15 usaha/kegiatan	15 usaha/kegiatan	20 kali	20 kali	77.39 & 85.94	51.29 & 83.27	319.000.000	319.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	49%	435,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													100.000.000	125.500.000				19,515,841,000		
2	11	4	02:01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													100.000.000	125.500.000				19,515,841,000		
2	11	4	02:01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Prosentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah	jumlah dokumen yang di susun	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,83	96,83	332 spesies	332 spesies	1 dokumen	1 dokumen	41.10 skor	51.29 & 83.27	100.000.000	125.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	135,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													100.000.000	434.050.000				100,000,000		
2	11	5	02:01		Penyimpanan Sementara Limbah B3													100.000.000	434.050.000				100,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Frakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah							
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target				
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
2	11	5	02:01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi syarat	jumlah kegiatan/usaha yang mengurus izin	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71	71	15 lokasi	15 lokasi	5 perusahaan	5 Kegiatan /Usaha	77.39 85.94	98 persen	100.000.000	434.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	0	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													438.762.500	393.762.500			450,000,000			
2	11	6	02:01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													438.762.500	393.762.500			450,000,000			
2	11	6	02:01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,90%	52,90%	15 perusahaan	15 perusahaan	4 perusahaan	4 wajib usaha	77.39 85.94	51.29 & 83.27	295.000.000	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64.7 %	290,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	02:01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,90%	52,90%	15 perusahaan	15 perusahaan	15 wajib usaha	15 wajib usaha	77.39 85.94	51.29 & 83.27	143.762.500	143.762.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64.7 %	160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													774.000.000	654.550.000			1,175,000,000			
2	11	8	02:01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													774.000.000	654.550.000			1,175,000,000			
2	11	8	02:01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90	90	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	77.39 85.94	51.29 & 83.27	774.000.000	654.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	1,175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP													85.000.000	85.000.000			85,000,000			
2	11	10	02:01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota													85.000.000	85.000.000			85,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Target	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2	11	10	02:01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kotantuk	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90	90	5 kasus	5 kasus	10 kasus	5 kasus	77.39 & 85.94	51.29 & 83.27	35.000.000	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	0	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90	90	5 kasus	5 kasus	50 orang	50 orang	77.39 & 85.94	51.29 & 83.27	50.000.000	46.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	0	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													8.175.470.000	8.523.697.000			8,080,000,000			
2	11	11	02:01		Pengelolaan Sampah													8.075.470.000	8.453.697.000			7,980,000,000			
2	11	11	02:01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah sampah yang di kelola	jumlah tempat / lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74	74	43.777 ton	43.777 ton	2 lokasi	2 lokasi	98 persen	98 persen	360.000.000	247.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	0	360,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	02:01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah sampah yang di kelola	jumlah volume sampah harian yang di tangani	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74	74	43.777 ton	43.777 ton	1 ton	1 ton	98 persen	98 persen	5.394.300.000	5.454.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	0	5,700,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	02:01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah sampah yang di kelola	jumlah masyarakat yang berperan aktif terhadap pengelolaan persampahan	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74	43.777 ton		100 orang		98 persen		40.047.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	0	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	02:01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah sampah yang di kelola	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74	74	43.777 ton	43.777 ton	11 jenis	3 jenis	98 persen	98 persen	2.321.170.000	2.712.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	0	1,870,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	02:03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta													100.000.000	70.000.000			100,000,000			
2	11	11	02:03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	jumlah kecamatan kinerja pengelolaan sampah (Adipura)	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74	74	35 kelompok	35 kelompok	3 kecamatan	3 kecamatan	98 persen	98 persen	100.000.000	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	0	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
TOTAL																		31.786.604.500	31.952.319.800			47,121,041,000			

Prioritas VI : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				Perangkat Daerah			
				Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
									Program		Keluaran Kegiatan					Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	5															12.766.536.000	14.956.797.000			14,254,253,000			
1	5	1														10.053.687.000	10.312.356.000			10,338,687,000			
1	5	1	02:01													84.850.000	84.850.000			84,850,000			
1	5	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	30 Skor	30 Skor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	84,850,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02:02													6.031.369.000	6.023.729.000			6,031,369,000			
1	5	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	30 Skor	30 Skor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6,031,369,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02:05													388.000.000	388.000.000			477,000,000			
1	5	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yang Terpenuhi	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	30 Skor	30 Skor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	477,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02:06													250.000.000	150.000.000			250,000,000			
1	5	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	30 Skor	30 Skor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02:07													-	217.377.000					196,000,000	
1	5	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	30 Skor	30 Skor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	196,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02:08													2.639.468.000	2.778.400.000			2,639,468,000			
1	5	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	30 Skor	30 Skor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2,639,468,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02:09													660.000.000	670.000.000			660,000,000			
1	5	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Persentase Kendaraan Dinas Yang Layak Digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	30 Skor	30 Skor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Persentase Gedung Yang Layak Digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	30 Skor	30 Skor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	130,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Target
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah									
1 5 1 02:09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercakupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Persentase Sarana Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	30 Skor	30 Skor	30.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														2.712.849.000	4.644.441.000			2,116,260,000				
1 5 2 02:01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														2.372.849.000	3.579.631.000			1,776,260,000				
1 5 2 02:01 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketertaman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Prersentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Semua Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97%	97%	96%	96%	100%	100%	97%	97%	803.081.000	1.025.561.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97%	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 5 2 02:01 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Prersentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada yang tertangani	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Semua Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97%	97%	96%	96%	97%	97%	97%	97%	986.030.000	2.040.573.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97%	986,030,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 5 2 02:01 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Prersentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peserta koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97%	97%	96%	96%	90%	90%	97%	97%	58.500.000	83.555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97%	58,500,000			
1 5 2 02:01 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Prersentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97%	97%	96%	96%	92%	92%	97%	97%	181.730.000	217.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97%	181,730,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 5 2 02:01 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Prersentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase SDM Satpol Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Damkar yang berkompeten	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97%	97%	96%	96%	80%	80%	97%	97%	343.508.000	212.212.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97%	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 5 2 02:02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota														340.000.000	1.064.810.000			340,000,000				
1 5 2 02:02 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Prosentase peserta sosialisasi yang paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97%	97%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	210.000.000	180.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97%	210,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 5 2 02:02 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Prosentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Yang Diselesaikan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97%	97%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	130.000.000	884.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97%	130,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														7.608.826.000	7.608.826.000			7,953,158,620				
2 12 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														5.742.871.010	6.472.406.250			6,097,619,815				
2 12 1 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														61.767.360	380.383.360			380,616,240				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum		Setelah	Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah								
2	12	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor		100%	100%	30.75 B	-	84.819.000	DAK Non Fisik - Dana Yanmindak	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	84,819,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	30.75 B	30.75 B	61.767.360	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	62,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor		100%	100%	30.75 B	-	233.797.000	DAK Non Fisik - Dana Yanmindak	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	233,797,240	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3.622.933.410	3.035.000.000			3,200,000,000		
2	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	30.75 B	30.75 B	3.622.933.410	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	3,200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													140.760.000				156,260,000	
2	12	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor		100%	100%	30.75 B	-	140.760.000	DAK Non Fisik - Dana Yanmindak	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	140,760,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													1.136.349.680	1.237.364.775			1,285,618,278	
2	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	30.75 B	30.75 B	1.050.700.480	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,117,648,278	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	30.75 B	30.75 B	85.649.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	167,970,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													531.651.285	1.151.097.890			92,784,238	
2	12	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase terpenuhnya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	30.75 B	30.75 B	531.651.285	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	92,784,238	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													226.809.000				226,809,000	
2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintahan	Persentase jasa pelayanan umum kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor		100%	100%	30.75 B	-	226.809.000	DAK Non Fisik - Dana Yanmindak	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	226,809,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													390.169.275	300.991.225			755,532,059	
2	12	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase terpenuhnya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	30.75 B	30.75 B	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	27,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase terpenuhnya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	30.75 B	30.75 B	177.699.515	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	592,124,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 12 1 02:09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	30.75 B	30.75 B	187.469.760	198.819.245	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	135,907,559	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														479.680.160	228.148.160				510,312,250			
2 12 2 02:01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk														228.148.160	228.148.160				233,627,050			
2 12 2 02:01 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah perekaman KTP EL	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	84%	84 %	84 %	2500 data	2500 data	81.75 A	81.75 A	127.639.760	127.639.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84%	133,074,125	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 2 02:01 5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	84%	84 %	84 %	1000 dokumen	1000 dokumen	81.75 A	81.75 A	100.508.400	100.508.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84%	100,552,925	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 2 02:03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														251.532.000	-				276,685,200			
2 12 2 02:03 2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah penerbitan KTP EL	Jumlah penerbitan KTP EL penduduk usia diatas 18 tahun	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84%	84%	10000 dokumen	10000 dokumen	300 orang	300 orang	81.75 A	81.75 A	251.532.000	-	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84%	276,685,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL														608.525.760	560.522.520				552,719,632			
2 12 3 02:01	Pelayanan Pencatatan Sipil														455.057.760	560.522.520				402,719,632			
2 12 3 02:01 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	94%	1700 dokumen	1700 dokumen	1500 dokumen	1500 dokumen	81.75 A	81.75 A	100.487.520	100.487.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94.25 %	110,536,272	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 3 02:01 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Jumlah penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian non muslim	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	94%	1700 dokumen	1700 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	81.75 A	81.75 A	354.570.240	460.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94.25 %	292,183,360	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 3 02:02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														153.468.000	-				150,000,000			
2 12 3 02:02 4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Jumlah penerbitan akte kelahiran	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94%	94%	1200 dokumen	1200 dokumen	1500 dokumen	1500 dokumen	81.75 A	81.75 A	153.468.000	-	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94.25 %	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														777.749.070	347.749.070				792,506,923			
2 12 4 02:01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan														347.749.070	347.749.070				362,506,923			
2 12 4 02:01 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Akurasi Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	Jumlah penyusunan laporan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99%	99%	77%	77%	13 laporan	13 laporan	81.75 A	81.75 A	296.445.990	296.445.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Akurasi Database Kependudukan	99.1 %	308,105,990	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 4 02:01 2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Akurasi Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Inovasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	99%	99%	77%	77%	5 dokumen	5 dokumen	81.75 A	81.75 A	51.303.080	51.303.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Akurasi Database Kependudukan	99.1 %	54,400,933	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 4 02:03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														430.000.000	-				430,000,000			
2 12 4 02:03 3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi Database Kependudukan	Jumlah penduduk	Jumlah Fasilitas	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99%	99%	210210 orang	210210 orang	8 kali	8 kali	81.75 A	81.75 A	130.000.000	-	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Akurasi Database Kependudukan	99.1 %	130,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 4 02:03 7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Akurasi Database Kependudukan	Jumlah penduduk	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99%	99%	210210 orang	210210 orang	16 kali	16 kali	81.75 A	81.75 A	300.000.000	-	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Akurasi Database Kependudukan	99.1 %	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														21.238.596.000	21.763.596.000				27,013,711,000			
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														6.664.064.000	7.861.890.000				7,881,861,000			
2 16 1 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														115.000.000	115.000.000				115,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 16 1 02:01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	32 skor	32 skor	115.000.000	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	115,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														3.733.400.000	3.759.400.000				3,733,400,000	
2 16 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	32 skor	32 skor	3.733.400.000	3.759.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	3,733,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 1 02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														-	1.076.826.000				1,076,826,000	
2 16 1 02:05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah media Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		100%		2 Media	32 skor		-	1.076.826.000	DBH CHT	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,076,826,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 1 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														135.172.000	135.172.000				135,172,000	
2 16 1 02:06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	32 skor	32 skor	135.172.000	135.172.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	135,172,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 1 02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														2.315.492.000	2.315.492.000				2,315,492,000	
2 16 1 02:08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	32 skor	32 skor	2.315.492.000	2.315.492.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2,315,492,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 1 02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														365.000.000	460.000.000				365,000,000	
2 16 1 02:09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	32 skor	32 skor	100.000.000	165.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 1 02:09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	32 skor	32 skor	132.500.000	132.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	132,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 1 02:09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase peralatan gedung dan kantor yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	32 skor	32 skor	132.500.000	162.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	132,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														5.361.179.000	4.588.353.000				9,182,000,000	
2 16 2 02:01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														5.361.179.000	4.588.353.000				9,182,000,000	
2 16 2 02:01 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	75%	100%	100%	1200 Informasi	1200 Informasi	88 skor	87.5 skor	2.289.955.000	2.589.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77%	4,438,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 2 02:01 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah konten informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	75%	100%	100%	5 Media	5 Media	88 skor	87.5 skor	1.380.353.000	1.385.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77%	2,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2 16 2 02:01 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan	Jumlah sosialisasi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	75%	100%	100%	10 sosialisasi	10 sosialisasi	88 skor	87.5 skor	1.076.826.000		DBH CHT	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77%	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 2 02:01 6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	75%	100%	100%	100%	100%	88 skor	87.5 skor	141.290.000	151.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77%	594,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 2 02:01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	75%	100%	100%	27 Kelompok	27 Kelompok	88 skor	87.5 skor	212.677.000	201.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77%	750,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 2 02:01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75%	75%	100%	100%	6 Tema informasi	6 Tema informasi	88 skor	87.5 skor	260.078.000	260.078.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77%	900,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA														9.213.353.000	9.313.353.000				9,949,850,000	
2 16 3 02:01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														5.271.450.000	5.271.450.000				5,394,650,000	
2 16 3 02:01 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD pengguna domain.id	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	238 domain	238 domain	3.3 skor	3.3 skor	26.800.000	26.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 3 02:01 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD pengguna domain.id	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1750 titik	1750 titik	3.3 skor	3.3 skor	5.244.650.000	5.244.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	5,044,650,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 3 02:02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														3.941.903.000	4.041.903.000				4,555,200,000	
2 16 3 02:02 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			1 Paket	1 Paket	3.3 skor	3.3 skor	2.300.200.000	2.300.200.000		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	2,480,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan					Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2 16 3 02:02 4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	180 Titik	180 Titik	3.3 skor	3.3 skor	355.000.000	455.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 3 02:02 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	7 Aplikasi	7 Aplikasi	3.3 skor	3.3 skor	460.000.000	460.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 3 02:02 8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 Paket	1 Paket	3.3 skor	3.3 skor	302.553.000	306.822.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 3 02:02 9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.3 skor	3.3 skor	404.605.000	404.605.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	425.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 3 02:02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Information Center	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 Unit	1 Unit	3.3 skor	3.3 skor	119.545.000	115.275.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														313.278.000	313.278.000				570.000.000	
2 20 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														313.278.000	313.278.000				570.000.000	
2 20 2 02:01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														313.278.000	313.278.000				570.000.000	
2 20 2 02:01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Dokumen Statistik	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.3 skor	3.3 skor	313.278.000	313.278.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan	100%	570.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														195.502.695	195.502.695				400.000.000	
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														195.502.695	195.502.695				400.000.000	
2 21 2 02:01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														195.502.695	195.502.695				400.000.000	
2 21 2 02:01 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah OPD yang mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Jumlah berita sandi yang diamankan	Nilai Domain Layanan SPBE	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	5 OPD	5 OPD	900 berita	900 berita	3.3 skor	3.3 skor	195.502.695	195.502.695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan	100%	400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan					Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah
4 1 1 02:07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		A Skor		100%	100%		33,65 indeks		113.889.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,163,250	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		
4 1 1 02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													244.250.000	244.250.000			270.600,000			
4 1 1 02:08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	244.250.000	244.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	270.600,000	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 1 1 02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													37.500.000	37.500.000			47,000,000			
4 1 1 02:09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	20,000,000	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 1 1 02:09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	7.500.000	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	15,000,000	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 1 1 02:09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak	Prosentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	12,000,000	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													1.865.261.500	1.524.570.550			2,485,000,000			
4 1 2 02:01	Administrasi Tata Pemerintahan													1.505.289.500	1.260.717.650			2,040,000,000			
4 1 2 02:01 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	Persentase penyampaian LKPJ tepat waktu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,08 Nilai	100%	100%	100%	10 kali	10 kali	100%	100%	1.201.239.500	978.457.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	1,700,000,000	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 1 2 02:01 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen rupa bumi	Persentase penyampaian LKPJ tepat waktu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,08 Nilai	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	49.050.000	49.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	50,000,000	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 1 2 02:01 3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan administrasi pemerintahan yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	Persentase penyampaian LKPJ tepat waktu	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,08 Nilai	100%	100%	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%	100%	255.000.000	233.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	290,000,000	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 1 2 02:04	Fasilitasi Kerjasama Daerah													359.972.000	263.852.900			445,000,000			
4 1 2 02:04 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama yang difasilitasi	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	Persentase MoU yang ditetapkan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,08 Nilai	100%	100%	100%	5 kali	5 kali	100%	100%	359.972.000	263.852.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	445,000,000	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 1	SEKRETARIAT DAERAH													2.295.964.608	2.295.964.608			2,825,051,500			
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2.295.964.608	2.295.964.608			2,825,051,500			
4 1 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													431.567.500	396.509.500			485,567,500			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target							
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	431.567.500	396.509.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	485,567,500	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													167.326.280	162.862.355				320,855,000			
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	167.326.280	162.862.355	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	320,855,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													-	36.626.925				50,000,000			
4	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan	Persentase pemenuhan perlatana dan mesin lainnya yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor		100%		100%		33,65 indeks		36.626.925		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													212.847.108	212.847.108				215,714,000			
4	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	212.847.108	212.847.108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	215,714,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													33.873.000	36.768.000				44,357,000			
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Layak Digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	18.963.000	20.427.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	24,832,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	1.680.000	1.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2,200,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase Sarana/Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	13.230.000	14.661.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	17,325,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4	1	1	02:13		Penataan Organisasi													1.450.350.720	1.450.350.720				1,708,558,000			
4	1	1	02:13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Besar dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	28.1 Nilai	28.1 Nilai	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	348.096.000	348.096.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	414,400,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4	1	1	02:13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Organisasi	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	28.1 Nilai	28.1 Nilai	2.7 Indeks	2.7 Indeks	33,65 indeks	33,65 indeks	671.208.720	671.208.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	745,158,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4	1	1	02:13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya minimal BB	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	28.1 Nilai	28.1 Nilai	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	431.046.000	431.046.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	549,000,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH													2.584.598.000	2.184.146.760				2,969,542,200			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1.713.745.320	1.525.656.760				1,570,752,200			
4	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													38.923.200	38.923.200				38,923,200			
4	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	21 dokumen	21 dokumen	33,65 indeks	33,65 indeks	38.923.200	38.923.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	38,923,200	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
4	1 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1.197.330.000	807.300.000			1.114.730.000				
4	1 1 02:02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	33,65 indeks	33,65 indeks	1.197.330.000	807.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1.114.730.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	1 1 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												130.000.000	72.192.000			135.000.000				
4	1 1 02:06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi	persentase kebutuhan perjalanan dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	33,65 indeks	33,65 indeks	130.000.000	72.192.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	135.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	1 1 02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												-	259.749.440			6.500.000				
4	1 1 02:07	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		A Skor		100%		100 persen		33,65 indeks	-	102.331.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	1 1 02:07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		A Skor		100%		100 persen		33,65 indeks	-	147.772.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6.500.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	1 1 02:07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		A Skor		100%		100 persen		33,65 indeks	-	9.646.340		Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	1 1 02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												305.551.400	305.551.400			233.551.400				
4	1 1 02:08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	33,65 indeks	33,65 indeks	305.551.400	305.551.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	233.551.400	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	1 1 02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												41.940.720	41.940.720			42.047.600				
4	1 1 02:09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	33,65 indeks	33,65 indeks	20.547.600	20.547.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	20.547.600	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	1 1 02:09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	33,65 indeks	33,65 indeks	2.500.000	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2.500.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	1 1 02:09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	A Skor	A Skor	100%	100%	100 persen	100 persen	33,65 indeks	33,65 indeks	18.893.120	18.893.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	19.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												870.852.680	658.490.000			1.398.790.000				
4	1 2 02:03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum												870.852.680	658.490.000			1.398.790.000				
4	1 2 02:03	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Jumlah Penyusunan Perda/Raperda	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,08 Nilai	100%	100%	100%	1 Jenis	33 Perda/Raperda	100%	100%	388.850.080	253.004.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	461.296.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	1 2 02:03	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,08 Nilai	100%	100%	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%	282.928.800	207.994.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	696.614.800	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4	1	2	02:03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,08 Nilai	100%	100%	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	100%	199.073.800	197.492.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	240,879,200	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH																	2.509.953.036	2.509.953.036			3.482.785,216				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	1.656.080.534	1.728.166.744			2.376,735,700				
4	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													33.252.000	23.706.000					36,577,200	
4	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian Perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100%	100%	21 dokumen	21 dokumen	33,65 indeks	33,65 indeks	33.252.000	23.706.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	36,577,200	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1.209.235.000	935.367.500					1,350,158,500	
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	1.209.235.000	935.367.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,350,158,500	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													95.798.950	95.798.950					250,000,000	
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	95.798.950	95.798.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	250,000,000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														356.249.710					200,000,000	
4	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo		A Skor		100%		100%	33,65 indeks	33,65 indeks	-	356.249.710	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													288.497.626	287.747.626					400,000,000	
4	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	288.497.626	287.747.626	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	400,000,000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													29.296.958	29.296.958					140,000,000	
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak	Persentase Kendaraan Dinas perorangan/Jabatan yang layak	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	14.946.958	14.946.958	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	30,000,000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	85,000,000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	12.350.000	12.350.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	25,000,000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	853.872.502	781.786.292			1,106,049,516				
4	1	3	02:02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan													400.930.143	389.403.983					473,586,300	
4	1	3	02:02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah Yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya > 79% dari Target	Jumlah pedoman pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-	Prosentase Perangkat daerah yang melaporkan Progres Fisik Tepat Waktu	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	80,98 nilai	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	299.080.438	299.080.438	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0	318,593,000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah	
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4 1 3 02:02 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah Yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya > 79% dari Target	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	Prosentase Perangkat daerah yang melaporkan Progres Fisik Tepat Waktu	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	80,98 nilai	100%	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%	100%	101.849.705	90.323.545	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0	154.993.300	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4 1 3 02:03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														452.942.359	392.382.309			632.463.216		
4 1 3 02:03 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa > 79% dari target	Persentase tender/seleksi yang dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan	Prosentase Pengadaan Barang/Jasa yang terealisasi	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	80,98 nilai	100%	100%	100%	130 dokumen	100%	100%	100%	174.618.609	166.388.129	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0	243.124.816	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4 1 3 02:03 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa > 79% dari target	Persentase tender/seleksi yang terkumpul di sistem LPSE	Prosentase Pengadaan Barang/Jasa yang terealisasi	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	80,98 nilai	100%	100%	100%	120 paket	100%	100%	100%	278.323.750	225.994.180	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0	389.338.400	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4 1	SEKRETARIAT DAERAH														1.908.189.600	1.787.893.600			11.016.129.000		
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														1.224.456.000	1.164.160.000			1.349.000.000		
4 1 1 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														20.000.000	20.000.000			21.000.000		
4 1 1 02:01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	21 dokumen	21 dokumen	33,65 indeks	33,65 indeks	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	21.000.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4 1 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														712.296.000	505.500.000			780.000.000		
4 1 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	712.296.000	505.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	780.000.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4 1 1 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														180.000.000	180.000.000			200.000.000		
4 1 1 02:06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	180.000.000	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	200.000.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4 1 1 02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														-	63.000.000			0		
4 1 1 02:07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	-	63.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4 1 1 02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														276.960.000	276.960.000			300.000.000		
4 1 1 02:08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	276.960.000	276.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	300.000.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4 1 1 02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														35.200.000	118.700.000			48.000.000		
4 1 1 02:09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	22.000.000	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	23.000.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4 1 1 02:09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	4.000.000	87.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	10.000.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah									
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)													
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target								
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah														
4	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Dimanfaatkan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	9.200.000	9.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	15.000.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah				
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																						1.560.000.000		
4	1	3	02:01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																							1.440.000.000	
4	1	3	02:01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Tingkat inflasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,98 nilai	100%	100%	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	3%	3%	530.000.000	330.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0	1.090.000.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah				
4	1	3	02:01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Tingkat inflasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,98 nilai	100%	100%	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	3%	3%	153.733.600	153.733.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0	350.000.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah				
4	1	3	02:04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																							120.000.000	
4	1	3	02:04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan		Presentase kegiatan yang telah dilaksanakan	Tingkat inflasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								3%		140.000.000	DBH CHT	100%	120.000.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah					
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																							37.785.532,510	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							37.785.532,510	
4	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							145.008.000	
4	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	21 dokumen	21 dokumen	33,65 indeks	33,65 indeks	145.008.000	145.008.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	145.008.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
4	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							10.227.984.730	
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	10.227.984.730	9.985.034.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	10.227.984.730	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
4	1	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							10.000.000.000	
4	1	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yang Tercapai	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	9.023.542.080	2.629.591.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	10.000.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
4	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																							2.250.000.000	
4	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	250.000.000	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	250.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	2.000.000.000	1.068.831.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2.000.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
4	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							1.358.197,680	
4	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	-	195.079.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	450.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah				
4	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							4.950.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah							
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target				
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
4	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	4.950.000.000	5.023.372.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	4.950.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															2.429.342.145	2.110.638.845			2.429.342.100	
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Persentase Kendaran Dinas Perorangan/Jabatan yang Layak Digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	1.485.065.645	1.251.254.595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1.485.065.600	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	714.676.500	640.282.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	714.676.500	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	229.600.000	219.101.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	229.600.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	1	1	02:11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															1.000.000.000	853.575.520			1.500.000.000	
4	1	1	02:11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	400.000.000	253.575.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	500.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	1	1	02:11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	600.000.000	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1.000.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	1	1	02:12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah															1.669.539.900	1.769.824.050			1.725.000.000	
4	1	1	02:12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tercukupi	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	874.529.750	918.268.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	900.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	1	1	02:12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	persentase kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercukupi	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	492.299.050	538.269.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	500.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	1	1	02:12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah tercukupi	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	33,65 indeks	33,65 indeks	302.711.100	313.285.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	325.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	1	1	02:14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan															2.276.966.380	1.864.582.880			3.200.000.000	
4	1	1	02:14	1	Fasilitas Keprotokolan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase fasilitas keprotokolan pimpinan	Jumlah fasilitas keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	500 kali	500 kali	33,65 indeks	33,65 indeks	2.276.966.380	1.864.582.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	3.200.000.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	2				SEKRETARIAT DPRD															42.644.215.722	41.641.118.391			45.003.062,694	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															27.928.625.457	27.725.758.376			29.936.220,273	
4	2	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															35.604.540	55.157.640			74.583,075	
4	2	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	25,61 score	25,61 score	35.604.540	55.157.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	74.583,075	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															2.173.937.338	2.202.117.518			2.142.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target				
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25.61 score	25.61 score	2.173.937.338	2.202.117.518	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2,142,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													31.686.336	31.686.336				103,999,828		
4	2	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	Presentase pemenuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25.61 score	25.61 score	29.700.000	29.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	98,749,828	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	persentase peserta yang paham	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25.61 score	25.61 score	1.986.336	1.986.336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	5,250,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													1.162.294.000	711.663.000				1,219,762,920		
4	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas/operasional ASN (penghitungan=real)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25.61 score	25.61 score	1.162.294.000	711.663.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,219,762,920	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													379.553.625	967.253.925				374,773,665		
4	2	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25.61 score	25.61 score	379.553.625	967.253.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	285,523,665	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2.908.738.033	2.899.884.372				3,267,624,150		
4	2	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25.61 score	25.61 score	2.908.738.033	2.899.884.372	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2,259,624,150	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1.150.554.405	1.290.812.405				2,664,180,750		
4	2	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase kendaraan dinas yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25.61 score	25.61 score	319.961.570	319.961.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	393,374,100	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25.61 score	25.61 score	222.391.900	315.391.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	330,907,500	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25.61 score	25.61 score	608.200.935	655.458.935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,939,899,150	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD													12.736.512.350	13.726.348.350				13,465,356,900		
4	2	1	02:15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase layanan terhadap hak keuangan DPRD	terpenuhinya hak keuangan DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	12 bulan	12 bulan	25.61 score	25.61 score	12.308.657.750	13.349.493.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	12,992,856,900	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase layanan terhadap hak keuangan DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut yang dicukupi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	5 jenis	5 jenis	25.61 score	25.61 score	277.854.600	277.854.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	315,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase layanan terhadap hak keuangan DPRD	terpenuhinya hak layanan kesehatan DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	1 Kali/orang	1 Kali/orang	25.61 score	25.61 score	150.000.000	99.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	157,500,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:16		Layanan Administrasi DPRD													7.349.744.830	5.840.834.830				6,623,938,985		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
4	2	1	02:16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	jumlah dokumen pemandangan umum dan pendapat akhir	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	4 dokumen	4 dokumen	25.61 score	25.61 score	38.496.150	38.496.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	409,232,900	Sekretariat DPRD
4	2	1	02:16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas/operasional DPRD (penghitungan=reali)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	25.61 score	25.61 score	7.311.248.680	5.802.338.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6,214,706,085	Sekretariat DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															14.715.590.265	13.915.360.015			15,066,842,421	
4	2	2	02:01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD															6.318.890.000	5.934.806.800			5,015,053,575	
4	2	2	02:01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD	jumlah raperda yang dibahas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Skor	79 Skor	100%	100%	19 raperda	19 raperda	80 skor	80 skor	5.396.770.000	5.016.898.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	3,440,053,575	Sekretariat DPRD
4	2	2	02:01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang dilaksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Skor	79 Skor	100%	100%	3 dokumen	3 dokumen	80 skor	80 skor	922.120.000	917.908.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	1,575,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	02:02		Pembahasan Kebijakan Anggaran															781.080.000	866.828.000			2,428,479,712	
4	2	2	02:02	3	Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD	Pembahasan KUA-PPAS, KUPA-PPASP dan APBD, PAPBD sesuai jadwal/ tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Skor	79 Skor	100%	100%	4 dokumen	4 dokumen	80 skor	80 skor	781.080.000	866.828.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	2,428,479,712	Sekretariat DPRD
4	2	2	02:03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan															1.230.575.000	366.376.200			1,135,150,695	
4	2	2	02:03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Program-program Pemerintah Daerah	Rekomendasi DPRD atas Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Skor	79 Skor	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	80 skor	80 skor	369.150.000	114.821.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	769,060,278	Sekretariat DPRD
4	2	2	02:03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Program-program Pemerintah Daerah	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Skor	79 Skor	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	80 skor	80 skor	861.425.000	251.555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	366,090,417	Sekretariat DPRD
4	2	2	02:04		Peningkatan Kapasitas DPRD															5.352.886.265	5.715.190.015			5,580,517,439	
4	2	2	02:04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	persentase peningkatan SDM anggota DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Skor	79 Skor	100%	100%	6 bimtek	6 bimtek	80 skor	80 skor	2.821.145.920	2.821.145.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	3,429,390,195	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4	2 2 02:04 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	persentase peningkatan SDM anggota DPRD	jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Skor	79 Skor	100%	100%	50 Kegiatan	50 Kegiatan	80 skor	80 skor	1.409.614.045	1.771.917.795	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	1.946.510.790	Sekretariat DPRD	
4	2 2 02:04 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	persentase peningkatan SDM anggota DPRD	tersusunnya program kerja DPRD tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Skor	79 Skor	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	80 skor	80 skor	1.122.126.300	1.122.126.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	204.616.454	Sekretariat DPRD	
4	2 2 02:05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat														1.032.159.000	1.032.159.000				907,641,000		
4	2 2 02:05 3	Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	persentase jumlah pokir yang masuk RKPd	Jumlah Aspirasi masyarakat yang diserap	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Skor	79 Skor	70 %	70 %	90 Dokumen	90 Dokumen	80 skor	80 skor	1.032.159.000	1.032.159.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	907,641,000	Sekretariat DPRD	
5	1	PERENCANAAN														10.292.724.353	10.298.546.148				10,684,364,500		
5	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														7.294.018.093	7.267.072.443				7,593,926,500		
5	1 1 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														85.287.092	85.287.092				85,000,000		
5	1 1 02:01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	7 dokumen	7 dokumen	65 skor	65 skor	64.995.900	64.995.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	65,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1 1 02:01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	12 DOKUMEN	12 DOKUMEN	65 skor	65 skor	10.319.432	10.319.432	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1 1 02:01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	65 skor	65 skor	9.971.760	9.971.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														5.680.864.400	5.072.580.000				6,024,926,500		
5	1 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	5.550.940.830	4.950.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	5,895,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1 1 02:02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	13 dokumen	13 dokumen	65 skor	65 skor	129.923.570	121.705.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	129,926,500	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1 1 02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														163.773.761	163.773.761				9,000,000		
5	1 1 02:05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yang Tercapai	persentase peningkatan kapasitas pegawai	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	160.849.961	160.849.961	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1 1 02:05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yang Tercapai	persentase peserta yang paham	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	2.923.800	2.923.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	3,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1 1 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														404.710.800	404.710.800				523,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target					
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah											
5	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	404.710.800	404.710.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	523,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				100,000,000	
5	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%			7.274.730	341.705.530		Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				655,000,000	
5	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%			791.861.325	800.369.275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	655,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				197,000,000	
5	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Dimakan	persentase dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	33.834.205	33.834.205	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	32,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Dimakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	77.616.000	316.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	80,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Dimakan	persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	48.795.780	48.795.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																				1,906,694,000	
5	1	2	02:01		Penyusunan Perencanaan dan Pencanaan																				923,664,560	
5	1	2	02:01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	tersusunnya dokumen perencanaan / pendanaan tingkat kota	jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 kali	1 kali	3.11 skor	3.11 skor	157.206.710	29.517.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	100%	188,200,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	02:01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	tersusunnya dokumen perencanaan / pendanaan tingkat kota	jumlah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 kali	1 kali	3.11 skor	3.11 skor	175.759.150	125.358.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	100%	150,464,560	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	02:01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	tersusunnya dokumen perencanaan / pendanaan tingkat kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kota	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 kali	1 kali	3.11 skor	3.11 skor	416.905.790	402.643.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	100%	210,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	02:01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	tersusunnya dokumen perencanaan / pendanaan tingkat kota	persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi tingkat Kota	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.11 skor	3.11 skor	706.398.170	725.780.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	100%	375,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah												
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target										
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
5	1 2 02:02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															115.150.800	79.916.640			87.000.000										
5	1 2 02:02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	terpenuhinya dokumen analisis data dan informasi pemerintah daerah	persentase terpenuhinya kebutuhan data dan informasi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.11 skor	3.11 skor	115.150.800	79.916.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	100%	87.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 2 02:03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															278.037.000	216.117.000			896.029.440										
5	1 2 02:03	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	Terpelorkannya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara tepat waktu	Jumlah dokumen berita acara verifikasi pengendalian antara BAPPEDA dengan OPD	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										100%	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	3.11 skor	3.11 skor	88.685.000	74.085.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	100%	168.745.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 2 02:03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	Terpelorkannya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara tepat waktu	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										100%	100%	100%	100%	4 dokumen	4 dokumen	3.11 skor	3.11 skor	189.352.000	142.032.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	100%	727.284.440	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															1.149.248.640	1.452.140.380			1.183.744.000										
5	1 3 02:01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															502.474.000	496.033.000			543.474.000										
5	1 3 02:01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	persentase capaian target program pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan	Persentase terpenuhinya koordinasi Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Bidang Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.11 score	3.11 score	107.474.000	70.953.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase capaian target program pembangunan daerah	0	107.474.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 3 02:01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	persentase capaian target program pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan tingkat Kota	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	3.11 score	3.11 score	25.000.000	104.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase capaian target program pembangunan daerah	0	25.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 3 02:01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	persentase capaian target program pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan	jumlah dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										100%	100%	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	3.11 score	3.11 score	255.000.000	189.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase capaian target program pembangunan daerah	0	269.850.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 3 02:01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	persentase capaian target program pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (notulensi/BA verifikasi) bidang pembangunan manusia	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										100%	100%	100%	100%	3 dokumen	3 dokumen	3.11 score	3.11 score	115.000.000	132.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase capaian target program pembangunan daerah	0	141.150.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1 3 02:02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)															230.051.400	526.010.840			149.600.000										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah							
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target				
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
5	1	3	02:02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	persentase capaian target program pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan	jumlah dokumen hasil koordinasi / notulen koordinasi bidang pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	3.11 score	3.11 score	47.237.000	316.887.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase capaian target program pembangunan daerah	0	47,237,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	02:02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	persentase capaian target program pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (Notulensi / BA Verifikasi) bidang perekonomian	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	3.11 score	3.11 score	182.814.400	209.123.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase capaian target program pembangunan daerah	0	102,363,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	02:03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan													416.723.240	430.096.540				490,670,000		
5	1	3	02:03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	persentase capaian target program pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang	jumlah dokumen hasil sinkronisasi bidang infrastruktur	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	3.11 score	3.11 score	139.938.240	148.900.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase capaian target program pembangunan daerah	0	113,885,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	02:03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	persentase capaian target program pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	3.11 score	3.11 score	101.785.000	106.196.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase capaian target program pembangunan daerah	0	101,785,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	02:03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	persentase capaian target program pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang	jumlah dokumen hasil sinkronisasi bidang kewilayahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	3.11 score	3.11 score	150.000.000	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase capaian target program pembangunan daerah	0	155,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	02:03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	persentase capaian target program pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan induk serta dokumen monitoring dan evaluasi bidang	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	3.11 score	3.11 score	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase capaian target program pembangunan daerah	0	120,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2				KEUANGAN													61.211.837.484	118.801.665.851				59,219,434,746		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													52.254.302.246	51.197.071.546				50,314,533,746		
5	2	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													21.032.000	21.032.000				21,032,000		
5	2	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (RenjaRKA/PK)	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	8 dokumen	8 dokumen	65 score	65 score	21.032.000	21.032.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	21,032,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													35.298.345.046	35.367.128.046				32,990,785,046		
5	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	presentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Score	65 Score	35.298.345.046	35.367.128.046	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	32,990,785,046	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													200.000.000	200.000.000				200,000,000		
5	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	presentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 score	65 score	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													-	367.791.500				367,791,500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	2	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	-	186.827.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	186,827,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	-	180.964.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	180,964,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												16.557.925.200	14.973.000.000			16,557,925,200				
5	2	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	presentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	65 score	65 score	16.557.925.200	14.973.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	16,557,925,200	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												177.000.000	268.120.000			177,000,000				
5	2	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Dimunakan	presentase jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	65 Score	65 Score	40.000.000	61.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	40,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Dimunakan	presentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	65 Score	65 Score	50.000.000	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	50,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Dimunakan	presentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	65 Score	65 Score	87.000.000	87.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	87,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												5.620.346.198	63.601.651.905			3,659,921,000				
5	2	2	02:01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												892.592.000	906.617.600			1,142,592,000				
5	2	2	02:01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahaan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Disusun	Realisasi kinerja yang memenuhi target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	65 score	65 score	100.000.000	103.729.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	100,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahaan Perda APBD tepat waktu	Jumlah dokumen yang disusun	Realisasi kinerja yang memenuhi target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	65 score	65 score	75.000.000	78.729.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	75,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02:01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahaan Perda APBD tepat waktu	Jumlah DPA yang terfasilitasi	Realisasi kinerja yang memenuhi target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	34 dokumen	34 dokumen	65 score	65 score	35.840.120	35.840.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	35,840,120	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02:01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahaan Perda APBD tepat waktu	Jumlah DPPA yang terfasilitasi	Realisasi kinerja yang memenuhi target	Kota Madiun, Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	34 Dokumen	34 Dokumen	65 score	65 score	32.688.880	36.418.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	32,688,880	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02:01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahaan Perda APBD tepat waktu	Jumlah dokumen yang disusun	Realisasi kinerja yang memenuhi target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	65 score	65 score	250.000.000	261.188.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	250,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02:01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahaan Perda APBD tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (RenjaRKAPK)	Realisasi kinerja yang memenuhi target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	65 score	65 score	204.414.000	215.602.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	204,414,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02:01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahaan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Realisasi kinerja yang memenuhi target	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	65 score	65 score	194.649.000	175.108.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	444,649,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02:02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												250.000.000	250.000.000			250,000,000				
5	2	2	02:02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan	jumlah dokumen administrasi kasda	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	55 dokumen	55 dokumen	65 score	65 score	130.000.000	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	130,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	2	4	02:01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen penetapan surat ketetapan dan keputusan pajak daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	2%	2%	42.300.000	42.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	0	46,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02:01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen kegiatan pelayanan dan konsultasi wajib pajak	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	2%	2%	10.750.000	10.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	0	10,750,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02:01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP pelaporan pemungutan pajak daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5	1,5	1,5	1,5	150	150	2%	2%	86.905.000	63.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	0	81,865,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02:01	11	Penagihan Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan penagihan pajak daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	2%	2%	10.600.000	10.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	0	11,040,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02:01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen pemeriksaan pajak daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	2%	2%	30.600.000	30.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	0	34,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	3				KEPEGAWAIAN													8.282.901.836	8.666.700.200				9,480,373,596		
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													6.317.333.576	6.649.877.000				6,993,750,676		
5	3	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													77.162.576	61.250.000				77,162,576		
5	3	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	jumlah dokumen	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	5	5	30 poin	30 poin	77.162.576	61.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	77,162,576	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													4.008.800.000	4.063.600.000				4,300,000,000		
5	3	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	41	41	30 poin	30 poin	4.008.800.000	4.063.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	4,300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													271.400.000	240.200.000				298,540,000		
5	3	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi	Jumlah Perjalanan Dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	A Skor	A Skor	100%	100%	50	50	30 poin	30 poin	271.400.000	240.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	298,540,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													-	313.900.000				319,000,000		
5	3	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	Jenis Barang	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	11	11	30 poin	30 poin	-	313.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	319,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													789.200.000	876.406.000				767,800,000		
5	3	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	A Skor	A Skor	100%	100%	18	18	100 persen	100 persen	789.200.000	876.406.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	767,800,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1.170.771.000	1.094.521.000				1,231,248,100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
5	3	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Jumlah Kendaraan Dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	A Skor	A Skor	100%	100%	30 Kendaraan Dinas	30 Kendaraan Dinas	30 poin	30 poin	13.771.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	15,148,100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Jumlah Gedung	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	A Skor	A Skor	100%	100%	3 Gedung	3 Gedung	30 poin	30 poin	1.132.000.000	1.041.448.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,188,600,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Jenis Sarana dan Prasarana	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	A Skor	A Skor	100%	100%	9 Jenis	9 Jenis	30 poin	30 poin	25.000.000	38.073.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	27,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																					
5	3	2	02:01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																					
5	3	2	02:01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	IKM Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian	jumlah formasi	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua	88 Score	88 Score	100%	100%	400 formasi	114 formasi	23.52 persen	23.52 persen	1.019.913.060	731.554.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	1,104,801,560	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	02:01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	IKM Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	88 Score	88 Score	100%	100%	225 PNS	225 PNS	23.52 persen	23.52 persen	53.940.000	53.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	59,334,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	02:01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	IKM Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang di kelola	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua	88 Score	88 Score	100%	100%	3036 Dokumen	3036 Dokumen	23.52 persen	23.52 persen	338.787.200	622.339.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	355,726,560	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	02:02		Mutasi dan Promosi ASN																					
5	3	2	02:02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	IKM Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Jumlah Penempatan PNS	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	88 Score	88 Score	100%	100%	209 PNS	209 PNS	23.52 persen	23.52 persen	309.888.000	427.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	340,876,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	02:02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	IKM Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	88 Score	88 Score	100%	100%	2142 Dokumen	2142 Dokumen	23.52 persen	23.52 persen	53.940.000	53.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	59,334,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	02:03		Pengembangan Kompetensi ASN																					
5	3	2	02:03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	IKM Perangkat Daerah	Persentase realisasi Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Peserta	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	88 Score	88 Score	100%	100%	60 Peserta	60 Peserta	23.52 persen	23.52 persen	119.600.000	58.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	131,560,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	02:04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																					
5	3	2	02:04	7	Pembinaan Disiplin ASN	IKM Perangkat Daerah	Persentase Pelanggaran Disiplin	Jumlah Dokumen	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	88 Score	88 Score	100%	100%	591 Dokumen	591 Dokumen	23.52 persen	23.52 persen	69.500.000	69.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	76,450,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																					
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																					
5	4	2	02:01		Pengembangan Kompetensi Teknis																					
5	4	2	02:01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	10%	100%	100%	144 PNS	144 PNS	30 persen	30 persen	972.087.204	961.422.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	12%	1,541,015,204	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	4	2	02:02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																					
5	4	2	02:02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Persentase realisasi pengembangan kompetensi manajerial	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	10%	100%	100%	400 PNS	400 PNS	30 persen	30 persen	3.137.164.000	1.687.396.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	12%	4,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															610.980.307	727.489.507			653,910,000	
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															610.980.307	727.489.507			653,910,000	
5 5 2 02:01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan															446.885.147	546.635.147			475,000,000	
5 5 2 02:01 2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian	Jumlah dokumen	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	3.11 score	3.11 score	261.204.100	361.204.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	250,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 02:01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian	Jumlah dokumen	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	3.11 score	3.11 score	185.681.047	185.431.047	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	225,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 5 2 02:04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi															164.095.160	180.854.360			178,910,000	
5 5 2 02:04 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Tersusunnya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah dokumen	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	3.11 score	3.11 score	164.095.160	180.854.360	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	178,910,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6 1	INSPEKTORAT DAERAH															8.979.551.000	8.979.551.000			9,300,855,000	
6 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															6.773.789.000	7.111.597.545			6,780,189,000	
6 1 1 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															107.375.000	107.375.000			107,375,000	
6 1 1 02:01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan / pelaporan Perangkat Daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	6.5 Skor	6.5 Skor	107.375.000	107.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	107,375,000	Inspektorat
6 1 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															5.818.408.000	6.159.219.295			5,828,297,000	
6 1 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	6.5 Skor	6.5 Skor	5.818.408.000	6.159.219.295	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	5,828,297,000	Inspektorat
6 1 1 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															783.114.000	769.466.800			704,625,000	
6 1 1 02:06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	6.5 Skor	6.5 Skor	544.401.000	669.466.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	465,912,000	Inspektorat
6 1 1 02:06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	45 kali	20 kali	6.5 Skor	6.5 Skor	238.713.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	238,713,000	Inspektorat
6 1 1 02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															64.892.000	75.536.450			64,892,000	
6 1 1 02:09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Jumlah kendaraan dinas	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	1 unit	1 unit	6.5 Skor	6.5 Skor	24.912.550	35.557.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	24,892,000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah									
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target						
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah												
6	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Jumlah gedung	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	1 paket	1 paket	6.5 Skor	6.5 Skor	4.978.650	4.978.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	5,000,000	Inspektorat		
6	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Jumlah sarana dan prasarana	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	5 jenis	5 jenis	6.5 Skor	6.5 Skor	35.000.800	35.000.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	35,000,000	Inspektorat		
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																						
6	1	2	02:01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal																						
6	1	2	02:01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	30%	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	92%	92%	50.041.600	21.437.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35%	50,080,000	Inspektorat		
6	1	2	02:01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	30%	1 dokumen	1 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	92%	92%	438.147.055	361.707.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35%	578,147,000	Inspektorat		
6	1	2	02:01	3	Reviu Laporan Kinerja	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Jumlah dokumen hasil reviu	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	30%	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	92%	92%	15.779.940	15.779.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35%	15,794,000	Inspektorat		
6	1	2	02:01	4	Reviu Laporan Keuangan	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Jumlah dokumen hasil reviu	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	30%	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	92%	92%	114.452.000	114.452.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35%	165,190,000	Inspektorat		
6	1	2	02:01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Jumlah dokumen hasil movev	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	30%	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	92%	92%	20.820.405	20.820.405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35%	20,230,000	Inspektorat		
6	1	2	02:02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																						
6	1	2	02:02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30%	30%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	92%	92%	332.098.000	314.134.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35%	332,098,000	Inspektorat		
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																						
6	1	3	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																						
6	1	3	02:01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	Jumlah dokumen pendampingan dan asistensi	Jumlah dokumen sisdur pengawasan yang disusun	Level Kapabilitas APIP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	2 level	2 level	6.600.000	3.696.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100%	6,600,000	Inspektorat		
6	1	3	02:02		Pendampingan dan Asistensi																						
6	1	3	02:02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas APIP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	4 dokumen	4 dokumen	2 level	2 level	465.535.320	425.529.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100%	422,463,000	Inspektorat		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target						
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
6	1	3	02:02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	Jumlah dokumen pendampingan dan asistansi	Jumlah dokumen	Level Kapabilitas APiP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	2 level	2 level	609.916.080	590.396.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100%	777,664,000	Inspektorat
6	1	3	02:02	4	Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistansi	Jumlah dokumen	Level Kapabilitas APiP	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	0 dokumen	2 level	2 level	152.371.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100%	152,400,000	Inspektorat
7	1				KECAMATAN													12.244.910.304	12.370.280.741				13,110,920,187		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													11.417.900.730	11.379.379.567				11,512,764,726		
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													59.784.000	59.784.000				68,784,000		
7	1	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	65 Skor	65 Skor	59.784.000	59.784.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	68,784,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													9.852.245.010	9.854.964.210				9,479,554,103		
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	9.850.245.010	9.852.964.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	9,477,554,103	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	65 Skor	65 Skor	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													7.200.000	7.200.000				7,200,000		
7	1	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yang Tercapai	Persentase peserta yang paham	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	7.200.000	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	7,200,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													143.751.000	82.596.000				140,715,000		
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	143.751.000	82.596.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	140,715,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1.178.763.520	1.163.622.240				1,487,886,720		
7	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 skor	65 skor	1.178.763.520	1.163.622.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,487,886,720	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													176.157.200	211.213.117				203,624,903		
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	Persentase kendaraan dinas peralatan/ jabatan yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	59.559.200	54.153.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	59,559,200	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	71.298.000	111.759.167	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	98,765,703	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah	
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 1 02:09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercakupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65 Skor	65 Skor	45.300.000	45.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	45,300,000	Kecamatan Manguharjo
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														62.205.440	62.205.440			62,205,440		
7 1 2 02:03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum														62.205.440	62.205.440			62,205,440		
7 1 2 02:03 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/Peremuan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrman dan ketertiban masyarakat kec.	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	8 kali	100%	100%	62.205.440	62.205.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	62,205,440	Kecamatan Manguharjo
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														318.891.760	318.891.760			659,172,787		
7 1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														318.891.760	318.891.760			659,172,787		
7 1 3 02:02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	10%	12%	100%	100%	318.891.760	318.891.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	659,172,787	Kecamatan Manguharjo
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														263.985.880	427.877.480			694,850,740		
7 1 4 02:01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														129.180.440	109.875.290			324,385,300		
7 1 4 02:01 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketentrman dan ketertiban umum di kecamatan	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/Peremuan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrman dan ketertiban masyarakat kec.	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	12 kali	100%	100%	129.180.440	109.875.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketentrman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	324,385,300	Kecamatan Manguharjo
7 1 4 02:02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														134.805.440	318.002.190			235,660,000		
7 1 4 02:02 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketentrman dan ketertiban umum di kecamatan		Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrman dan ketertiban masyarakat kec.	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100%	100%			100%	14 kali	100%	100%	134.805.440	318.002.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketentrman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	235,660,000	Kecamatan Manguharjo
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														181.926.494	181.926.494			181,926,494		
7 1 5 02:01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah														181.926.494	181.926.494			181,926,494		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	1 5 02:01 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah sosialisasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat kec	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	2 kali	100%	100%	111.926.494	111.926.494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100%	111.926.494	Kecamatan Manguharjo	
7	1 5 02:01 5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Konflik yang terselesaikan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat kec	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55.000.000	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100%	55.000.000	Kecamatan Manguharjo	
7	1 5 02:01 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah buku profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat kec	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100%	15.000.000	Kecamatan Manguharjo	
7	1	KECAMATAN														1.026.435.390	1.483.000.000				1.061.172.787		
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														676.435.390	833.000.000				659.172.787		
7	1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														676.435.390	833.000.000				659.172.787		
7	1 2 02:02 3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat kec	Kota Madiun, Manguharjo	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	676.435.390	833.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	659.172.787	Kecamatan Manguharjo	
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350.000.000	650.000.000				402.000.000		
7	1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350.000.000	650.000.000				402.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 1 3 02:02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	22%	22%	350.000.000	650.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	302,000,000	Kecamatan Manguharjo		
7 1	KECAMATAN														956.059.440	1.364.308.997			869,802,300				
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														606.059.440	769.628.790			593,902,300				
7 1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														606.059.440	769.628.790			593,902,300				
7 1 2 02:02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat kec.	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	606.059.440	769.628.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	593,902,300	Kecamatan Manguharjo		
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350.000.000	594.680.207			275,900,000				
7 1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350.000.000	594.680.207			275,900,000				
7 1 3 02:02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	22%	22%	350.000.000	594.680.207	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	175,900,000	Kecamatan Manguharjo		
7 1	KECAMATAN														914.646.940	1.111.568.850			979,751,628				
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														564.646.940	691.568.850			557,251,628				
7 1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														564.646.940	691.568.850			557,251,628				
7 1 2 02:02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat kec.	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	564.646.940	691.568.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	557,251,628	Kecamatan Manguharjo		
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350.000.000	420.000.000			422,500,000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				Perangkat Daerah			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350.000.000	420.000.000				422,500,000		
7	1 3 02:02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	22%	22%	350.000.000	420.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	222,500,000	Kecamatan Manguharjo	
7	1	KECAMATAN														735.925.440	1.073.415.180				904,846,609		
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														537.925.440	701.615.180				529,846,609		
7	1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														537.925.440	701.615.180				529,846,609		
7	1 2 02:02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrman dan ketertiban masyarakat kec.	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	537.925.440	701.615.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	529,846,609	Kecamatan Manguharjo	
																		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														198.000.000	371.800.000				375,000,000		
7	1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														198.000.000	371.800.000				375,000,000		
7	1 3 02:02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	22%	22%	198.000.000	371.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	175,000,000	Kecamatan Manguharjo	
7	1	KECAMATAN														1.029.919.280	1.241.302.775				961,514,383		
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														679.919.280	815.602.775				664,426,063		
7	1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														679.919.280	815.602.775				664,426,063		
7	1 2 02:02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrman dan ketertiban masyarakat kec.	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	679.919.280	815.602.775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	664,426,063	Kecamatan Manguharjo	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target			
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7	1 2 02:02 3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	prosentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	714.926.140	818.639.538	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	700,805,004	Kecamatan Manguharjo
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													60.000.000	225.000.000				275.000.000		
7	1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													60.000.000	225.000.000				275.000.000		
7	1 3 02:02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan manguharjo	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	22%	22%	60.000.000	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	175,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	KECAMATAN													11.205.755.280	11.540.391.518				11,940,791,280		
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													10.500.786.560	10.884.217.818				11,235,822,560		
7	1 1 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													59.784.000	58.003.140				59,784,000		
7	1 1 02:01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	18 skor	18 skor	19.928.000	19.331.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	19,928,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1 1 02:01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	18 skor	18 skor	19.928.000	19.928.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	19,928,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1 1 02:01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	18 skor	18 skor	19.928.000	18.743.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	19,928,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													8.817.512.700	8.290.210.684				8,817,512,700		
7	1 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	18 skor	18 skor	8.815.512.700	8.288.210.684	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	8,815,512,700	Kecamatan Kartoharjo
7	1 1 02:02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	13 dokumen	13 dokumen	18 skor	18 skor	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1 1 02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													6.500.000	3.878.600				6,500,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	1	1	02:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yang Tercapai	persentase peserta yang paham	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	18 skor	18 skor	6.500.000	3.878.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6.500,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														107.965.000	156.615.000			138.900,000		
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan =	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	18 skor	18 skor	107.965.000	156.615.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	138,900,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														344.964.000	638.388.275			1,150,236,000		
7	1	1	02:07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	persentase gedung kantor yang representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	18 skor	18 skor	200.000.000	336.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	991,418,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	18 skor	18 skor	144.964.000	302.038.275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	158,818,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														968.849.860	1.502.327.038			939,678,860		
7	1	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	18 skor	18 skor	968.849.860	1.502.327.038	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	639,678,860	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														195.211.000	234.795.081			123,211,000		
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase kendaraan dinas/operasional Perorangan Dinas atau Kendaraan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	18 skor	18 skor	25.251.000	25.251.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	25,251,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	18 skor	18 skor	10.000.000	18.756.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	18 skor	18 skor	125.000.000	155.828.081	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	53,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	18 skor	18 skor	34.960.000	34.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	34,960,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														62.205.440	67.008.240			62,205,440		
7	1	2	02:03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum														62.205.440	67.008.240			62,205,440		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	1	2	02:03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	jumlah koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan dan ketertiban	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	88 skor	88 skor	100%	100%	6 pertemuan	6 pertemuan	100%	100%	62.205.440	67.008.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	62,205,440	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													282.558.400	266.491.210			282,558,400			
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													282.558.400	266.491.210			282,558,400			
7	1	3	02:02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase usulan Kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	100%	100%	33%	33%	282.558.400	266.491.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	282,558,400	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													188.125.520	171.476.620			188,125,520			
7	1	4	02:01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													79.405.440	75.356.540			79,405,440			
7	1	4	02:01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah koordinasi / pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan dan ketertiban	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	4 pertemuan	4 pertemuan	100%	100%	79.405.440	75.356.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	79,405,440	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4	02:02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													108.720.080	96.120.080			108,720,080			
7	1	4	02:02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah koordinasi / pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan dan ketertiban	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	9 pertemuan	9 pertemuan	100%	100%	108.720.080	96.120.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	108,720,080	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													172.079.360	151.197.630			172,079,360			
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													172.079.360	151.197.630			172,079,360			
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kewenangan yang dilaksanakan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah sosialisasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan dan ketertiban	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	60.766.640	39.884.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	60,766,640	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah							
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target			
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7	1	5	02:01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	jumlah koordinasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrangan dan ketertiban	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	100%	71.481.360	71.481.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	71.481.360	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	5	02:01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrangan dan ketertiban	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	39.831.360	39.831.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	39.831.360	Kecamatan Kartoharjo	
7	1				KECAMATAN													972.624.800	1.299.057.670				972.624.800			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													622.624.800	833.228.250				622.624.800			
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													622.624.800	833.228.250				622.624.800			
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrangan dan ketertiban	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	622.624.800	833.228.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	622.624.800	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													350.000.000	465.829.420				350.000.000			
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													350.000.000	465.829.420				350.000.000			
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase keluhan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	2 paket	2 paket	33%	33%	350.000.000	465.829.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	219.200.000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase keluhan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	100%	100%	33%	33%	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	130.800.000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1				KECAMATAN													865.220.520	1.101.418.190				865.220.520			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													515.220.520	753.868.290				515.220.520			
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													515.220.520	753.868.290				515.220.520			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	1 2 02:02 3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	515.220.520	753.868.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	515,220,520	Kecamatan Kartoharjo	
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350.000.000	347.549.900				350,000,000		
7	1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350.000.000	347.549.900				350,000,000		
7	1 3 02:02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	2 paket	2 paket	33%	33%	350.000.000	347.549.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	219,200,000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	KECAMATAN														1.038.894.510	1.392.590.540				1,038,894,510		
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														688.894.510	985.590.540				688,894,510		
7	1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														688.894.510	985.590.540				688,894,510		
7	1 2 02:02 3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegan	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	688.894.510	985.590.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	688,894,510	Kecamatan Kartoharjo	
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350.000.000	407.000.000				350,000,000		
7	1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350.000.000	407.000.000				350,000,000		
7	1 3 02:02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegan	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	2 paket	2 paket	33%	33%	350.000.000	407.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	219,200,000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	KECAMATAN														968.402.510	1.154.734.826				1,025,824,540		
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														675.824.540	791.140.076				675,824,540		
7	1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														675.824.540	791.140.076				675,824,540		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7	1 2 02:02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	675.824.540	791.140.076	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	675,824,540	Kecamatan Kartoharjo
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														292.577.970	363.594.750				350,000,000	
7	1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														292.577.970	363.594.750				350,000,000	
7	1 3 02:02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	2 paket	2 paket	33%	33%	292.577.970	363.594.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	217,200,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	KECAMATAN														922.565.340	1.183.575.348				922,565,340	
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														572.565.340	736.644.314				572,565,340	
7	1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														572.565.340	736.644.314				572,565,340	
7	1 2 02:02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	572.565.340	736.644.314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	572,565,340	Kecamatan Kartoharjo
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350.000.000	446.931.034				350,000,000	
7	1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350.000.000	446.931.034				350,000,000	
7	1 3 02:02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	2 paket	2 paket	33%	33%	350.000.000	446.931.034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	219,120,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	KECAMATAN														849.953.820	1.073.799.800				916,796,520	
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														566.796.520	746.505.000				566,796,520	
7	1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														566.796.520	746.505.000				566,796,520	
7	1 2 02:02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	566.796.520	746.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	566,796,520	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 1 3 02:02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	100%	2 paket	33%	33%	208.100.000	337.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	219,200,000	Kecamatan Kartoharjo		
7 1 3 02:02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	100%	100%	33%	33%	130.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	130,800,000	Kecamatan Kartoharjo		
7 1	KECAMATAN														891.526.840	1.208.945.993				921,147,240			
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														571.147.240	784.516.393				571,147,240			
7 1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														571.147.240	784.516.393				571,147,240			
7 1 2 02:02 3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan dan ketertiban	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	571.147.240	784.516.393	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	571,147,240	Kecamatan Kartoharjo		
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														320.379.600	424.429.600				350,000,000			
7 1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														320.379.600	424.429.600				350,000,000			
7 1 3 02:02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	2 paket	2 paket	33%	33%	320.379.600	424.429.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	219,200,000	Kecamatan Kartoharjo		
7 1	KECAMATAN														11.573.227.389	12.960.171.175				10,945,682,215			
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														10.604.727.629	11.996.844.065				10,410,013,129			
7 1 1 02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														58.967.520	58.967.520				58,967,520			
7 1 1 02:01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	20 dokumen	20 dokumen	65	25,35	58.967.520	58.967.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	58,967,520	Kecamatan Taman		
7 1 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														9.225.821.629	9.388.384.545				9,225,821,629			
7 1 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65	25,35	9.225.821.629	9.388.384.545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	9,225,821,629	Kecamatan Taman		
7 1 1 02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														18.152.000	18.152.000				4,600,000			
7 1 1 02:05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian	Persentase peserta yang paham	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100%	100%	100%	100%	65	25,35	18.152.000	18.152.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	4,600,000	Kecamatan Taman		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	1 5 02:01 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah buku profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dn Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrangan dan ketertiban masyarakat	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	25.812.960	25.812.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100%	25,812,960	Kecamatan Taman
7	1	KECAMATAN													974.653.550	1.137.479.738				974,653,340		
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													724.653.550	887.479.738				624,653,340		
7	1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													724.653.550	887.479.738				624,653,340		
7	1 2 02:02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrangan dan ketertiban masyarakat	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	724.653.550	887.479.738	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	624,653,340	Kecamatan Taman
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													250.000.000	250.000.000				350,000,000		
7	1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													250.000.000	250.000.000				350,000,000		
7	1 3 02:02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase keluhan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	100%	100%	33%	33%	250.000.000	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	250,000,000	Kecamatan Taman
7	1	KECAMATAN													980.621.520	1.357.493.670				949,676,380		
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													699.676.380	950.773.030				599,676,380		
7	1 2 02:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													699.676.380	950.773.030				599,676,380		
7	1 2 02:02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrangan dan ketertiban masyarakat	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	699.676.380	950.773.030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	599,676,380	Kecamatan Taman
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													280.945.140	406.720.640				350,000,000		
7	1 3 02:02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													280.945.140	406.720.640				350,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	33%	33%	30.945.140	240.945.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	100,000,000	Kecamatan Taman
7	1	3	02:02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	100%	100%	33%	33%	250.000.000	165.775.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	250,000,000	Kecamatan Taman
7	1				KECAMATAN													904.254.740	1.079.776.187				787,877,740		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														637.877.740	817.422.187				537,877,740	
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													637.877.740	817.422.187				537,877,740		
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	637.877.740	817.422.187	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	537,877,740	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														266.377.000	262.354.000				250,000,000	
7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														266.377.000	262.354.000				250,000,000	
7	1	3	02:02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Usulan	18 Usulan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	33%	33%	266.377.000	262.354.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	0	Kecamatan Taman
7	1				KECAMATAN														435.501.367	521.179.707				757,575,120	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														435.501.367	521.179.707				407,575,120	
7	1	2	02:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														435.501.367	521.179.707				407,575,120	
7	1	2	02:02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketertarikan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 skor	88 skor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	435.501.367	521.179.707	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 skor	407,575,120	Kecamatan Taman
7	1				KECAMATAN														1.414.742.260	1.800.230.060				1,016,742,260	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														766.742.260	1.142.104.310				666,742,260	

Pada tabel Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada misi I, secara umum target kinerja tidak mengalami perubahan, sedangkan pagu anggaran meningkat. Pada RKPD 2021 Pagu anggaran pada misi I yang dijabarkan melalui program, kegiatan, sub kegiatan yang di dukung Prioritas 6 (enam) sebesar Rp. 310.585.726.237,- sedangkan pada RKPD Perubahan 2021 sebesar Rp. 368.665.502.273,- Peningkatan yang signifikan pada misi I disebabkan oleh adanya peningkatan upaya pencapaian target SPBE pada Dinas Kominfo Kota Madiun serta yang terkait Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan disebabkan oleh adanya peningkatan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial (dampak pandemi covid-19) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
2. Pada misi II, secara umum target kinerja tidak mengalami perubahan, sedangkan pagu anggaran meningkat. Pada RKPD 2021 Pagu anggaran pada misi II yang dijabarkan melalui program, kegiatan, sub kegiatan yang di dukung Prioritas 4 (empat) dan 5 (lima) sebesar Rp. 221.254.500.543,- sedangkan pada RKPD Perubahan 2021 sebesar Rp. 225.882.210.035,- Peningkatan yang signifikan pada misi II disebabkan oleh adanya peningkatan upaya pengendalian banjir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
3. Pada misi III, secara umum target kinerja tidak mengalami perubahan, sedangkan pagu anggaran meningkat. Pada RKPD 2021 Pagu anggaran pada misi III yang dijabarkan melalui program, kegiatan, sub kegiatan yang di dukung Prioritas 2 (dua) sebesar Rp. 533.626.583.003,- sedangkan pada RKPD Perubahan 2021 sebesar Rp. 608.776.294.782,- Peningkatan yang signifikan pada misi III disebabkan oleh adanya peningkatan upaya peningkatan percepatan penanganan pandemi Covid-19 beserta pemberian Insentif kepada Tenaga Medis di Kota Madiun pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
4. Pada misi IV, secara umum target kinerja yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan target dan anggaran. Pagu anggaran yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi tidak meningkat. Pada RKPD 2021 Pagu anggaran pada misi IV yang dijabarkan melalui program, kegiatan, sub kegiatan yang di dukung Prioritas 1 (satu) dan 3 (tiga) sebesar Rp. 75.355.333.310,- sedangkan pada RKPD Perubahan 2021 sebesar Rp. 71.721.299.556,-.

Berikut rekapitulasi atas Perubahan Rencana Kerja sesuai kebutuhan dan kesesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah serta kewenangan bidang urusan dalam rangka pencapaian target indicator prioritas pembangunan Kota Madiun di Tahun 2021, sesuai tabel yang ada di bawah ini ;

Tabel 5.2
Pagu Anggaran Perangkat Daerah Pada RKPD Perubahan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Dinas Pendidikan	322.472.766.383	324.912.145.613	2.439.379.230
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	198.324.357.781	271.404.540.344	73.080.182.563
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (15%)	137.286.681.372	139.455.485.435	2.168.804.063
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35.537.031.920	36.827.699.474	1.290.667.554
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.832.767.000	16.242.118.000	2.409.351.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.327.941.000	3.327.941.000	0
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.382.794.390	21.635.130.694	-747.663.696
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.662.734.160	10.373.284.940	-289.449.220
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.961.598.000	9.961.598.000	0
10	Dinas Lingkungan Hidup	25.772.432.500	25.762.500.100	-9.932.400
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.608.826.000	7.608.826.000	0
12	Dinas Perhubungan	18.264.182.751	19.223.263.026	959.080.275
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.747.376.695	22.272.376.695	525.000.000
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.159.306.320	7.159.306.320	0
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	16.012.780.280	13.162.156.327	-2.850.623.953
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (50%)	5.274.090.239	5.207.921.045	-66.169.194
17	Dinas Perdagangan	17.167.843.000	17.117.843.000	-50.000.000
18	Sekretariat Daerah	53.992.725.079	43.934.741.049	-10.057.984.030
19	Sekretariat DPRD	42.644.215.722	41.641.118.391	-1.003.097.331
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.903.704.660	11.026.035.655	122.330.995

21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	61.211.837.484	118.801.665.851	57.589.828.367
22	Badan Pendapatan Daerah	9.968.562.000	9.968.562.000	0
23	Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia	12.392.153.040	11.315.519.270	-1.076.633.770
24	Inspektorat	8.979.551.000	8.979.551.000	0
25	Kecamatan Manguharjo	20.667.031.064	24.129.112.605	3.462.081.541
26	Kecamatan Kartoharjo	19.681.467.110	22.510.304.948	2.828.837.838
27	Kecamatan Taman	20.625.801.626	24.124.975.347	3.499.173.721
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.959.584.517	6.959.584.517	0
TOTAL		1.140.822.143.093	1.275.045.306.646	134.223.163.553

BAB VI PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dalam RKPD Perubahan 2021 mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar Program, dalam satu perangkat daerah maupun antar perangkat daerah, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun 2021 digunakan untuk acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.

6.2 Tindak Lanjut

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dalam pencapaian Visi Misi Walikota Madiun, perubahan RKPD diikuti oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berperan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD).

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun Tahun Anggaran 2021.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19750117 199602 1 001